



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN 2025-2045





BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025 - 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang

- Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 6 Nomor 2009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 32);
28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 - 204 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jambi adalah perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah daerah, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJPN.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
- (2) Rincian Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan

pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dalam bentuk visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah.

Pasal 4

Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BAB IV	: VISI DAN MISI
BAB V	: ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
BAB VI	: PENUTUP

Pasal 5

RPJPD mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jambi.

Pasal 6

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.
- (2) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Ketentuan mengenai RPJMD yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RPJPD yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 18 DESEMBER 2024
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

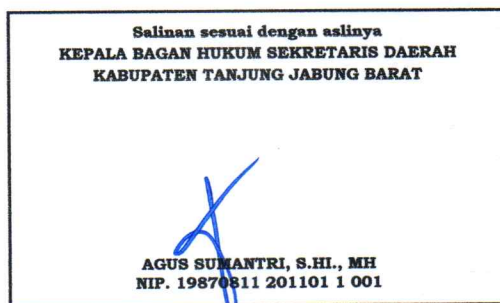
Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 18 DESEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

HERMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024
NOMOR 11



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT :
(9-73/2024).

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2045

A. UMUM

Pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah akan menopang tujuan pembangunan daerah Provinsi Jambi serta memberikan andil bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional, merupakan manifestasi dari terwujudnya satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional. Upaya tersebut diawali dari sebuah proses perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan pedoman yang akan memberikan arah sekaligus acuan sehingga akan terjadi sinkronisasi serta konsistensi tujuan yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh komponen masyarakat dalam jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. Dalam dokumen tersebut akan memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah.

Penetapan RPJP Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045 sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor .. Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Pelaksanaan RPJP Daerah 2025-2045 terbagi ke dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periode Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 (lima) tahunan.

Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045 yang disusun pada tahun 2024 sebagai akibat menunggu ditetapkannya RPJP Daerah Provinsi Jambi yang telah ditetapkan dan akan menjadi acuan bagi penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga akan tercipta sinergisitas antara tujuan pembangunan daerah Provinsi Jambi dengan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

RPJP Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan acuan dalam menyusun dan menjabarkannya ke dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang memiliki kurun waktu 5 tahunan untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam program 1 (satu) tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian maka pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat hingga tahun 2045 menjadi lebih terencana, terarah, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola sikap, pola pikir, dan pola tindak dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Hubungan RPJPD dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Lainnya	5
1.3.1 RPJPD dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jambi	5
1.3.2 RPJPD dengan RTRW	6
1.3.3 RPJPD dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK)	6
1.3.4 RPJPD dengan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).....	7
1.4 Maksud dan Tujuan	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	 10
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	10
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	10
2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi	10
2.1.1.2 Topografi	11
2.1.1.3 Geologi dan Hidrologi	12
2.1.1.4 Klimatologi	13
2.1.1.5 Penggunaan Lahan	14
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	15
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana	16
2.1.4 Kondisi Demografis	18
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	21
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ...	21
2.2.1.1 Perumbuhan PDRB	21
2.2.1.2 Laju Inflasi	29
2.2.1.3 PDRB per Kapita ADHK	30
2.2.1.4 Gini Ratio	32
2.2.1.5 Pengeluaran Per Kapita	33
2.2.1.6 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan	34
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	36
2.2.2.1 Rata-rata lama Sekolah	36
2.2.2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)	37
2.2.2.3 Angka Partisipasi Murni (APM)	39
2.2.2.4 Angka Harapan Hidup	40
2.2.2.5 Indeks Ketimpangan Gender	41
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	42
2.2.3.1 Jumlah Grup Kesenian	42
2.2.3.2 Jumlah Klub Olahraga, Gedung Olahraga dan Lapangan Olahraga.....	43
2.3 Aspek Pelayanan Umum	44
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	44
2.3.1.1 Pendidikan	44
2.3.1.2 Kesehatan	47
2.3.1.3 Pekerjaan Umum	53
2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	58
2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	60

	2.3.1.6	Sosial	65
2.3.2		Urusan Pemerintah Wajib Tidak Berkaitan	
		Pelayanan Dasar	66
	2.3.2.1	Tenaga Kerja	66
	2.3.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan	
		Perlindungan Anak	67
	2.3.2.3	Ketahanan Pangan	69
	2.3.2.4	Lingkungan Hidup	71
	2.3.2.5	Administrasi Kependudukan dan	
		Catatan Sipil	74
	2.3.2.6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..	76
2.3.3		Tata Kelola Pemerintahan.....	78
	2.3.3.1	Inovasi Daerah.....	78
	2.3.3.2	Sistem Pemerintahan Berbasis	
		Elektronik (SPBE).....	79
	2.3.3.3	Indeks Pelayanan Publik.....	80
2.4		Aspek Daya Saing Daerah.....	80
	2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah...	80
2.5		Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Publik.....	98
2.6		Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	102
	2.6.1	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).....	103
	2.6.2	Pusat Kegiatan Lokal (PKL).....	103
	2.6.3	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	103
	2.6.4	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	104
2.7		Kawasan Industri	105
2.8		Tol Trans Sumatera	105
2.9		Wisata Kawasan Lindung Pantai Mangrove dan Cagar Alam	
		Pantai Timur	106
BAB III		PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	107
3.1		Permasalahan Pembangunan	107
	3.1.1	Kemiskinan	107
	3.1.2	Kualitas Sumber Daya Manusia yang Belum	
		Merata	109
	3.1.3	Daya Jual Komoditi Pinang dan Kelapa yang	
		Rendah	110
	3.1.3.1	Ketahanan Pangan / Alih Fungsi	
		Lahan Pertanian	112
	3.1.3.2	Permukiman Kumuh	112
3.2		Isu Strategis	114
	3.2.1	Lingkup Global.....	114
	3.2.2	Lingkup Nasional.....	115
	3.2.3	Lingkup Regional.....	116
	3.2.4	Lingkup Daerah.....	117
BAB IV		VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	130
4.1		Visi	130
4.2		Misi	133
BAB V		ARAH KEBIJAKAN, DAN SASARAN POKOK DAERAH ...	135
5.1		Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung	
		Barat	135
	5.1.1	Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke I	
		(RPJMD 2025 - 2029)	135
	5.1.2	Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke II	
		(RPJMD 2030 - 2034)	148

5.1.3	Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke III (RPJMD 2035 - 2039)	160
5.1.4	Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke IV (RPJMD 2040 - 2045)	172
5.2	Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat	218
BAB VI	PENUTUP.....	234

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Jumlah Penduduk Tahun 2023	11
Tabel 2.2	Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dibedakan Menurut Klasifikasi Ketinggian	12
Tabel 2.3	Penyebaran Jenis Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	13
Tabel 2.4	Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Lahan Existing	14
Tabel 2.5	Daftar Kecamatan dan Kelurahan/Desa Rawan Bencana Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat	16
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dalam Kab. Tanjung Jabung Barat Pada Tahun 2019-2023	19
Tabel 2.7	Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 – 2023	19
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Kab.Tanjab Barat Berdasarkan Jenis Kelamin dan kelompok umur Tahun 2023	20
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) dari Tahun 2019 sampai dengan 2023	22
Tabel 2.10	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 s.d 2023 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah)	24
Tabel 2.11	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 s.d 2023 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah)	26
Tabel 2.12	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita Tanjung Jabung Barat, 2019-2023	31
Tabel 2.13	Statistik Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 – 2023	35
Tabel 2.14	Jumlah Sarana Olahraga perkecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023	43
Tabel 2.15	Jumlah Klub Olahraga Menurut Cabang Olah Raga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023	44
Tabel 2.16	Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2023	45
Tabel 2.17	Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2023	46
Tabel 2.18	Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2023	46
Tabel 2.19	Panjang Jalan Kabupaten Kab. Tanjung Jabung Barat menurut jenis permukaan dan kondisi jalan Tahun 2019 s.d. 2023	54
Tabel 2.20	Daerah Irigasi dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat	57
Tabel 2.21	Luas Kawasan Kumuh Menurut Kelurahan/Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat	59
Tabel 2.22	Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kab. Tanjung Jabung Barat	60

Tabel 2.23	Cakupan Layanan Petugas Perlindungan Masyarakat / Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 s.d. 2022.....	62
Tabel 2.24	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Tingkat Waktu Tanggap (<i>Respon Time Rate</i>) Wilayah Manajemen Kebakaran Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 s.d. 2022	63
Tabel 2.25	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2023	65
Tabel 2.26	Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (TKPA) dan tindaklanjutnya Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 s.d. 2023.....	69
Tabel 2.27	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 s.d. 2023	70
Tabel 2.28	Ketersediaan Pangan Utama Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 s.d. 2023.....	70
Tabel 2.29	Ketersediaan Energi dan Protein Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 s.d. 2023.....	71
Tabel 2.30	Ketersediaan Dokumen RPPLH Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 s.d. 2023	72
Tabel 2.31	Jumlah sampah yang ditangani dan terkelola 3R Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 s.d. 2023	73
Tabel 2.32	Jumlah Pengaduan Yang Masuk dan Yang Ditindaklanjuti Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 s.d. 2023	74
Tabel 2.33	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023	74
Tabel 2.34	Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023	75
Tabel 2.35	Jumlah Tim Penggerak PKK dari Tingkat Kabupaten sampai Tingkat Kelompok Dasa Wisma, Tahun 2017 – 2020	76
Tabel 2.36	Tabel Indeks Inovasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 - 2023	78
Tabel 2.37	Tabel Perkembangan Luas Lahan Perkebunan Pinang dan Kelapa Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019-2023.....	82
Tabel 2.38	Formulir E.56 Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD Kab. Tanjung Jabung Barat, Visi : TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, BERDAYA SAING, ADIL DAN SEJAHTERA. Periode Pelaksana : 2016-2021	87
Tabel 2.39	Proyeksi Jumlah Penduduk Kab. Tanjung Jabung Barat	98
Tabel 2.40	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kab. Tanjung Jabung Barat	99
Tabel 2.41	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kab. Tanjung Jabung Barat	99
Tabel 2.42	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kab. Tanjung Jabung Barat	100
Tabel 2.43	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kab. Tanjung Jabung Barat	100
Tabel 2.44	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kab. Tanjung Jabung Barat	101
Tabel 2.45	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kab. Tanjung Jabung Barat	101
Tabel 2.46	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat	101
Tabel 2.47	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Barat	102
Tabel 3.1	Perkembangan Luas Lahan Perkebunan Pinang dan Kelapa Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 – 2023	110
Tabel 3.2	Luas Kawasan Kumuh Menurut Kelurahan/Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat	113

Tabel 3.3	Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kab. Tanjung Jabung Barat	114
Tabel 3.4	Perkembangan Frekuensi Keberangkatan / Kedatangan Dalam Seminggu Pelabuhan Ro-ro Kuala Tungkal Tahun 2020 – 2023 ...	117
Tabel 3.5	Perkembangan Jumlah Penumpang dan Kendaraan Pelabuhan Ro-Ro Kuala Tungkal Tahun 2020 – 2023	117
Tabel 3.6	Sumber Daya dan Cadangan Energi Fosil di Prov. Jambi	119
Tabel 3.7	Distribusi dan luas lahan penyediaan Air Bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat	122
Tabel 3.8	Distribusi dan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	123
Tabel 4.1	Sasaran Visi dan Target (Tahun 2045)	132
Tabel 5.1	Arah Kebijakan	182
Tabel 5.2	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2045 Pada tiap Tahapan RPJMD	222

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	8
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat	10
Gambar 2.2	Peta Kawasan Rawan Bencana	18
Gambar 2.3	Piramida Penduduk Kab. Tanjung Jabung Barat 2023.....	20
Gambar 2.4	Inflasi Kota Jambi (Year On Year) Tahun 2019 – 2023	30
Gambar 2.5	Gini Ratio Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2019-2023	33
Gambar 2.6	Pengeluaran Per Kapita Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 – 2023 ..	34
Gambar 2.7	Rata-rata Lama Sekolah Kab. Tanjung Jabung Barat 2019 – 2023	37
Gambar 2.8	Capaian APK SD, SMP dan SMA Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019-2023	38
Gambar 2.9	Capaian APM SD, SMP dan SMA Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019-2023	40
Gambar 2.10	Angka Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019-2023	41
Gambar 2.11	Indeks Ketimpangan Gender Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2023	42
Gambar 2.12	Jumlah Grup Seni Budaya Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023	43
Gambar 2.13	Angka Kematian Bayi dan Balita Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 -2023	48
Gambar 2.14	Angka Kematian Ibu Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 – 2023	50
Gambar 2.15	Jumlah Balita gizi Buruk dan Berat Badan Dibawah Garis Merah (BGM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 – 2023	51
Gambar 2.16	Pelayanan RSUD KH Daud Arif Tahun 2020-2023	53
Gambar 2.17	Perkembangan masyarakat yang memiliki akses terhadap air minum layak Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019-2023	55
Gambar 2.18	Perkembangan Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Yang Layak Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019-2023	56
Gambar 2.19	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan keindahan) Kab. Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2019 – 2023.....	61
Gambar 2.20	Kejadian Kebakaran Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 s.d. 2023	63
Gambar 2.21	Jumlah Jenis Pelatihan dan Jumlah Peserta Pelatihan Tahun 2019 s.d. 2023 Kab. Tanjung Jabung Barat	66
Gambar 2.22	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Lokal Tahun 2018 s.d. 2022 Kab. Tanjung Jabung Barat	67
Gambar 2.23	Perkembangan Indeks Pembangunan gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 s.d. 2022	68
Gambar 2.24	Perkembangan Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 s.d. 2023	68
Gambar 2.25	Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 s.d. 2023	72
Gambar 2.26	Jumlah BUM Desa dan BUM Desa Bersama dalam Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 s.d. 2020	77
Gambar 2.27	Pendapatan Per Kapita Penduduk Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 s.d 2023.....	81
Gambar 2.28	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Sektor pertambangan dan penggalian Kab. Tanjung Jabung Barat Dari Tahun 2019 s.d. 2023.....	82
Gambar 2.29	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan yang di Tamatkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	83

Gambar 2.30	Perkembangan Nilai Investasi Kab.Tanjung Jabung Barat tahun 2019-2023	86
Gambar 2.31	Piramid Penduduk Kab. Tanjung Jabung Barat 2045.....	100
Gambar 3.1	Perkembangan Angka Kemiskinan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 – 2023	107
Gambar 3.2	Perkembangan IPM Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 – 2023	109
Gambar 3.3	Perkembangan Harga Pinang Kab. Tanjung Jabung Barat Bulan Juli 2022 – Juni 2023	111
Gambar 3.4	Perkembangan Harga Kelapa Dalam Kab. Tanjung Jabung Barat Bulan Juli 2022 - Juni 2023	112
Gambar 3.5	Perkembangan Distribusi 5 Besar Lapangan Usaha PDRB Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 – 2023	118
Gambar 3.6	Suhu Rata-rata Bulanan Indonesia	120
Gambar 3.7	Perkembangan Jumlah Penduduk Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 – 2023	121
Gambar 5.1	Pentahapan Implementasi RPJPD 2025 – 2045	135

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 2024
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT TAHUN 2025 - 2045

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedomanan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045, dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 65 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama DPRD. Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak nasional tahun 2024, bahwa Rancangan RPJPD Tahun 2025 – 2045 menjadi acuan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyusunan visi, misi, dan program pada pemilihan kepala daerah tahun 2024, serta dalam rangka untuk mendukung terwujudnya sinergitas pembangunan nasional dengan pembangunan daerah maka pemerintah menyusun RPJPD Kabupaten/kota bersamaan dengan RPJPN.

Masa berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 berakhir pada tahun 2025, dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah masih berlaku, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), maka RPJPD Kab. Tanjung Jabung Barat disusun kembali untuk periode 2025 – 2045. Begitu juga halnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional 2005 – 2025 yang berakhir masa berlakunya di tahun 2025, dan di tahun 2023 sudah dimulai penyusunannya rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025 – 2045, dalam petunjuk teknis penyusunannya yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam penyusunannya RPJPD mempedomani RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang, RPJPD sebagai arah dan prioritas pembangunan bagi daerah yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045, pemerintah daerah sudah harus menyusun Rancangan Awal RPJPD di tahun 2023 ini dan ditetapkan selambat – lambatnya pada Minggu ke-4 bulan Agustus 2024. Bilamana RPJPD tidak tersedia mempunyai beberapa resiko yaitu kehilangan arah pembanguan, Ketidakefisienan dalam Penggunaan Sumber Daya, pembangunan yang tidak berkelanjutan, dan terlambatnya pencapaian tujuan pembangunan nasional

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi

- Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 14. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ

- dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 - 204 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3).

1.3. Hubungan RPJPD dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Lainnya.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 disebutkan bahwa penyusunan RPJP daerah untuk kabupaten / kota harus memperhatikan RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW kabupaten/Kota, RPPLH Kabupaten/kota, dan memperhatikan RPJPD daerah tetangga.

1.3.1. RPJPD dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jambi

Penelaahan RPJPN dan RPJPD Provinsi dilakukan dalam rangka penyelarasan terhadap RPJPD kabupaten, penyelarasan RPJPD Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2045 terhadap RPJPN Tahun 2025 - 2045 mulai dari rumusan visi, sasaran visi, agenda pembangunan, arah kebijakan dan sasaran pokok beserta indikator utama pembangunan (IUP).

Rumusan visi RPJPD Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2045 mempedomani visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Maju, Berdaulat, dan Berkelanjutan. Rumusan Misi dalam mewujudkan visi daerah juga mempedomani misi nasional yang merupakan agenda pembangunan dalam RPJPN 2025 – 2045 yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan, dan kesinambungan pembangunan.

Rumusan arah kebijakan RPJPD Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2045 mempedomani arah kebijakan RPJPD Prov. Jambi Tahun 2025 – 2045 (sesuai buku II SEB Penyelarasan RPJPD dengan

RPJPN) dengan menyesuaikan karakteristik daerah dalam melaksanakan keotonomiannya serta indikatornya (IUP).

1.3.2. RPJPD dengan RTRW

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJPD Kabupaten harus berpedoman pada RTRW. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya.

RTRW berisi gambaran rencana tata ruang yang meliputi struktur ruang, pola ruang, dan kawasan – kawasan strategis daerah. Penggambaran rencana struktur ruang meliputi sistem perkotaan dan pusat – pusat permukiman dan jaringan infrastruktur utama yang akan dikembangkan. Sedangkan gambaran pola ruang meliputi sebaran kawasan budidaya dan kawasan lindung, serta penjelasan daya dukung dan daya tampung wilayah. Dilengkapi pula dengan arahan pengembangan kawasan strategis daerah yang diperkirakan mampu menjadi penggerak pertumbuhan dan pembangunan.

1.3.3. RPJPD dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)

Agar pembangunan industri di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berhasil guna dan berdaya guna diperlukan adanya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) kemudian ditetapkan dalam peraturan daerah sebagai pedoman yang mengatur agar industri daerah dapat lebih terarah, tepat sasaran, tepat guna serta mampu menjadi penggerak (*prime mover*) pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 – 2044 adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah kabupaten untuk mengarahkan dan mengembangkan

sektor industri di wilayahnya untuk 20 tahun kedepan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, investor, dan masyarakat, dalam mengelola pembangunan industri yang berkelanjutan dan berdaya saing. RPJPD Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2045 memperhatikan strategi dan program pembangunan industri dalam 20 tahun kedepan untuk dapat dimasukkan dalam arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

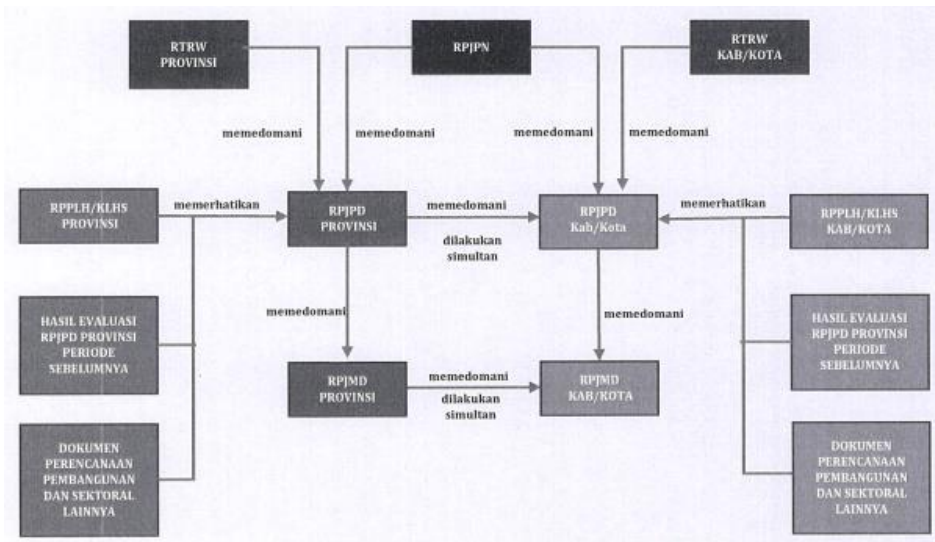
1.3.4. RPJPD dengan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, kemiskinan Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2023 sebesar 9,79 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 33.600 orang. Dari angka kemiskinan tersebut teridentifikasi miskin ekstrem di tiga kecamatan yaitu Bram Itam, Pengabuan, dan Senyerang.

Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 - 2029 sebagai dokumen pendamping khusus penanggulangan kemiskinan guna menambah bobot dokumen perencanaan. RPKD memuat strategi dan program penanggulangan kemiskinan yang dirancang khusus untuk menanggulangi kemiskinan dalam jangka waktu tertentu, yang diintegrasikan dengan arah kebijakan dan sasaran pokok berserta target kemiskinan dalam RPJPD.

Dokumen RPKD Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2024- 2029 dapat menjadi pedoman perencanaan khusus penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait yaitu instansi pemerintah daerah, masyarakat dan kalangan lembaga swadaya masyarakat serta dunia usaha dan berkewajiban melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lain



1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2045, dimaksudkan untuk keberlanjutan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan, dengan melakukan penyesuaian terhadap sasaran – sasaran pokok agar harmonisasi dengan perkembangan baik nasional maupun daerah. Kemudian Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2045 bertujuan memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan RPJMD untuk masa 4 (empat) periode lima tahunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025 disusun dalam tata urut sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

	1.3. Hubungan RPJPD dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Lainnya
	1.4. Maksud dan Tujuan
	1.5. Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
	2.1. Aspek Geografi dan Demografi
	2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
	2.3. Aspek Daya Saing
	2.4. Aspek Pelayanan Umum
	2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005 - 2025
	2.6. Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
	2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DAERAH
	3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah
	3.2. Isu Strategis
BAB IV	VISI DAN MISI
	4.1. Visi
	4.2. Misi
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH
	5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
	5.2. Sasaran Pokok
BAB VI	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

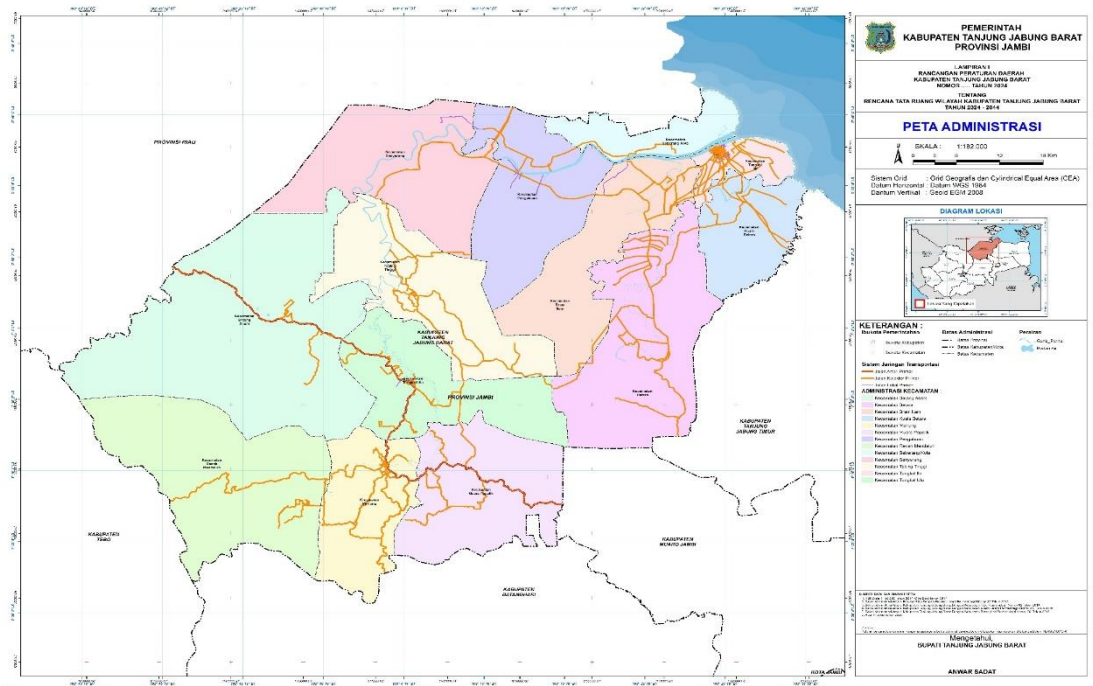
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Wilayah administrasi Kabupaten dengan luas kurang lebih 500.994 (lima ratus ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat) hektare yang terletak di antara 0° 27' 0" - 2° 27' 0" Lintang Selatan dan 101° 5' 60" - 104° 32' 60" Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbatasan dengan :

- 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Laut Cina Selatan
- 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi
- 3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo.

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kab. Tanjung Jabung Barat



Sumber : RTRW Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044

Luas wilayah keseluruhan adalah seluas ± 500.994 Ha atau sekitar $\pm 26,68$ % dari total luas Provinsi Jambi, dan berikutnya dapat dilihat luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat per kecamatan, jumlah penduduk dan jumlah Kelurahan/Desa pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Jumlah Penduduk Tahun 2023

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Ha)	Penduduk (Jiwa)	Desa	Kelurahan
1. Tungkal Ulu	Pelabuhan Dagang	345,69	14.925	9	1
2. Merlung	Merlung	311,65	16.266	9	1
3. Batang Asam	Dusun Kebun	1.042,37	35.405	10	1
4. Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	342,89	36.656	9	1
5. Renah Mendaluh	Lubuk Kambing	473,72	16.250	9	1
6. Muara Papalik	Rantau Badak	336,38	10.549	9	1
7. Pengabuan	Teluk Nilau	440,13	26.609	12	1
8. Senyerang	Senyerang	426,63	25.426	9	1
9. Tungkal Ilir	Tungkal IV Kota	100,31	74.919	2	8
10. Bram Itam	Bram Itam Kiri	312,66	19.493	9	1
11. Seberang Kota	Tungkal V	121,29	9.223	7	1
12. Betara	Mekar Jaya	570,21	31.311	11	1
13. Kuala Betara	Betara Kiri	185,89	14.026	9	1
Jumlah		500.944	331.058	114	20

Sumber : Kab. Tanjung Jabung Barat Dalam Angka Tahun 2024

2.1.1.2. Topografi

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 500 meter dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Provinsi Riau, untuk dataran rendah yang berkisar pada ketinggian 0 – 25 meter di atas permukaan laut, maka struktur tanahnya sebagian besar merupakan tanah gambut dan dipengaruhi oleh pasang/surutnya air laut.

Tabel 2.2. Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Dibedakan Menurut Klasifikasi Ketinggian.

Topografi/ Ketinggian (m/dpl)	Luas		Wilayah/ Kabupaten
	Ha	%	
Dataran Rendah (0 - 25)	213.424	42,8	Kecamatan Pengabuan, Senyerang, Tungkal Ilir, Bram Itam, Seberang Kota, Betara dan Kuala Betara.
Dataran sedang (25 - 500)	273.090	54,8	Kecamatan Tungkal Ulu, Merlung, Sebagian Batang Asam, Tebing Tinggi, Sebahagian Renah Mendaluh dan Kecamatan Muara Papalik.
Dataran Tinggi (>500)	11.910	2,4	Sebahagian Batang Asam, Sebahagian Renah Mendaluh
Jumlah	500.944	100	

Sumber : RTRW Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 - 2044

2.1.1.3. Geologi dan Hidrologi;

Kondisi geografi Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya pada dataran rendah yang terpengaruh langsung oleh pasang surutnya air laut sebagian besar terdiri dari lapisan tanah gambut dan lumpur pada permukaan tanahnya sehingga hal ini berpengaruh pada kedalaman air tanah (kedalaman lebih dari 100 meter) dengan kondisi air tanah yang mengandung mineral dan warna yang relatif tinggi sehingga memerlukan biaya produksi yang relative tinggi untuk diolah menjadi air minum yang memenuhi syarat kesehatan sedangkan pada dataran sedang dan tinggi adalah perbukitan dengan unsur penyusun utama terdiri dari tanah liat sehingga kualitas air tanahnya relatif lebih baik dibandingkan dengan dataran rendah. Selanjutnya pada tabel berikut dapat dilihat jenis tanah dan penyebarannya di masing-masing kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebagian besar atau 65,03 persen jenis tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah jenis tanah podzolik, kemudian 14,52 persen adalah jenis tanah organosol dan 11,98 persen adalah tanah endapan sebagian besar jenis tanah ini terdapat Kecamatan Tungkal Ilir, Pengabuan dan Betara. Jenis tanah ini relatif

lebih subur, sehingga sesuai untuk sektor pertanian, terutama untuk padi, sayur-sayuran dan tanaman muda lainnya. Selanjutnya untuk jenis tanah gleisol luasnya hanya 8,47 persen atau 41.630 Ha., sedangkan untuk jenis tanah andosol dan latosol tidak terdapat diseluruh kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tabel 2.3. Penyebaran Jenis Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kecamatan	Jenis Tanah			
	Organosol	Hedro Metrik	Podzolik	Gley Humic
	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)
1	2	3	4	5
1. Tungkak Ulu		15.942	18.627,4	
2. Merlung	-	-	24.348,7	-
3. Batang Asam	5.657,4	19.108,6	68.421,7	11.049,1
4. Tebing Tinggi	4.766,4	6.992,6	10.485	12.044,8
5. Renah Mendaluh	*	*	50.691,4	*
6. Muara Papalik	*	*	36.865,7	*
7. Pengabuan	27.936,8	1.289,2	-	14.787,2
8. Senyerang	27.039	-	-	15.624,3
9. Tungkak Ilir	2.187	-	-	6.432,5
10. Bram Itam	19.235,8	3.142,6	-	7.644
11. Seberang Kota	2.644,4	-	-	8.519,8
12. Betara	13.755,5	13.469,2	17.168,8	11.583
13. Kuala Betara	10.199,3	-	-	7.647,7
Jumlah	113.421,7	59.944,2	226.608,7	95.032,4
%	22,76	12,03	45,46	19,07

Sumber : Kab.Tanjung Jabung Barat dalam Angka 2017

2.1.1.4. Klimatologi

Keadaan iklim di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak jauh berbeda dengan keadaan iklim di wilayah Provinsi Jambi pada umumnya. Berdasarkan klasifikasi menurut *Schmidt dan Ferguson*, iklim di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Type Afa, yaitu type iklim hujan tropis. Suhu udara rata-rata sebesar 29,9° C, suhu udara maksimum mencapai 32° C dan suhu udara minimum 21° C. Curah hujan tahunan rata-rata berkisar antara 2.324 - 2.373 mm per tahun.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari berbagai sumber diketahui bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk daerah

belokan angin atau daerah perputaran arah awan basah sehingga peluang untuk hujan lebih tinggi baik dalam hal frekuensi maupun intensitasnya, dari informasi tersebut dapat diasumsikan bahwa air hujan adalah salah satu alternatif penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat (khususnya wilayah kecamatan klasifikasi dataran rendah dan sedang) sehingga perlu adanya beberapa usaha nyata untuk menjaga kualitas air hujan agar tidak menurun kualitasnya oleh adanya pencemaran udara.

2.1.1.5. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih didominasi oleh daerah terbangun dengan total luas 258.830 Ha atau 51,62% dari luas total Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari luas daerah terbangun tersebut masih didominasi oleh lahan tegalan/Ladang dengan total seluas 10,36%, kemudian diikuti lahan sawah (7,45 %), lahan kebun kelapa sawit (7,21 %) dan lahan bangunan dengan luas 7,17%. Sedangkan sisa penggunaan lahan lainnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah lahan kawasan hutan dengan total luas 245.663 Ha atau 49,04% dari luas total Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel 2.4. Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Lahan Existing.

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	(%)
1	Hutan Produksi Tetap	178.907	37.17%
2	Hutan Produksi Terbatas	35.343	7.34%
3	Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	624	0.13%
4	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	7.730	1.61%
5	Kawasan Perkebunan	224.706	46.68%
6	Kawasan Peruntukkan Industri Besar	1.347	0.28%
7	Kawasan badan air	4.711	0.98%
8	Hutan Lindung Gambut	15.027	3.12%
9	Kawasan Perlindungan Setempat	1.681	0.35%
10	Taman Nasional Bukit Tiga Puluh	11.102	2.31%
11	Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur	183	0.04%
	Jumlah	481.361	
Daerah Terbangun			
1	Permukiman	2.952	0,59
2	Bangunan	65.904	7,17

3	Sawah	47.382	7,45
4	Tegalan/Ladang	51.918	10,36
5	Kebun Campuran	3.269	0,65
6	Semak Belukar	14.567	2,91
7	Kebun Kelapa Sawit	36.100	7,21
8	Kebun Kelapa Dalam	34.009	6,79
9	Kebun Karet	22.755	4,54
10	Kebun Kopi	4.500	0,90
11	Kebun Pinang	8.325	1,66
12	Sungai/Rawa	6.989	1,40
Jumlah		258.830	51,62
Total Luas Penggunaan Lahan : 500.944			

Sumber : RTRW Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 - 2044

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rancangan Tata Ruang Pulau Sumatera, kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari sudut Ekonomi, kepentingan sosial dan budaya dan/atau lingkungan adalah:

- (1) Kawasan Strategis Ekonomi adalah sebagai pusat kegiatan wilayah penggerak kegiatan perdagangan dan jasa pada skala regional/wilayah; dan menciptakan iklim usaha dan peluang investasi yang kondusif, meliputi kawasan perkotaan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi, kawasan pelabuhan di Kecamatan Tungkal Ilir, dan kawasan perkotaan Merlung.

(2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi kawasan cagar alam hutan bakau pantai timur yang terletak di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Kuala Betara; dan kawasan lindung gambut terletak di Kecamatan Betara, Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Pengabuan.

Adapun Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau) yang berada di Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Batang Asam.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Dari data yang dihimpun bencana yang sering terjadi di beberapa daerah, yaitu bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), angin puting beliung dan kebakaran rumah penduduk. Ada beberapa daerah yang sering mengalami bencana yang sama setiap tahunnya.

Tabel 2.5. Daftar Kecamatan dan Kelurahan/Desa Rawan Bencana dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Bencana Karhutla	Bencana Banjir / Abrasi	Bencana Angin Puting Beliung
1. Kecamatan Kuala Betara : Desa Sungai Gebar Barat, dan Suak Labu 2. Kecamatan Betara : Desa Pematang Lumut, Desa mandala Jaya, Desa Bunga Tanjung, Desa Serdang jaya, Kelurahan Mekar Jaya, desa Sungai terap, Desa Teluk Kulbi, Desa Muntialo, Desa Terjun Jaya, dan Desa Lubuk Terentang 3. Kecamatan Bram Itam : Desa Bram Itam Kanan, dan Desa Bram Itam raya	Bencana Banjir : 1. Kecamatan Muara Papalik : Desa Intan Jaya, Desa Rantau Badak Iamo, Desa Lubuk Sibontan, Desa Lubuk Petai, Desas Kemang Manis, Desa Pematang Balam 2. Kecamatan Tungkal Ulu : Desa Pematang Pauh, Desa Kuala dasar, dan Desa Tanjung Tayas 3. Kecamatan Batang Asam : Desa Sungai Penoban, Desa Rawang Kempas, Desa Tanjung Bojo, dan Desa Dusun Kebun	1. Kecamatan Betara : Desa Mandala jaya, Desa Serdang Jaya 2. Kecamatan Kuala Betara : desa suak labu, Desa Sungai Dualap 3. Kecamatan Pengabuan : Kelurahan Teluk Nilau, dan Desa Parit Bilal 4. Kecamatan Bram Itam : Kelurahan Bram Itam Kiri 5. Kecamatan Tungkal Ilir : Kel. Tungkal IV Kota, Kel. Sriwijaya, Kel. Tungkal I, dan Kel. Tungkal III. 6. Kecamatan Tungkal Ulu : Kelurahan Pelabuhan Dagang

Bencana Karhutla	Bencana Banjir / Abrasi	Bencana Angin Puting Beliung
4. Kecamatan Pengabuan : Desa Suak samin, Desa Parit Bilal, Desa Parit Pudir, desa Sungai Baung 5. Kecamatan Senyerang : desa Margo Rukun, desa Lumahan, dan Kelurahan Senyerang 6. Kecamatan Tebing Tinggi : Desa Kelagian, dan Desa Dataran Kempas 7. Kecamatan Batang Asam : desa Suban, desa Sungai Panoban, Desa Rawang Kempas, Desa Sri Agung, desa Lubuk Bernai, dan Desa Tanjung Bojo 8. Kecamatan Tungkallir : Kelurahan Sungai Nibung	Bencana Abrasi : 1. Kecamatan Tungkallir : Desa Tungkallir I	

Sumber : BPBD Kab. Tanjung Jabung Barat, 2024

Potensi banjir dapat terjadi akibat limpasan air permukaan di wilayah dengan topografi datar-bergelombang dengan kelerengan daerah kurang dari 15%. Peningkatan debit air permukaan dipengaruhi pula oleh jenis tanah lempungan, dimana resapan air relatif kecil. Pada musim penghujan dimana curah hujan cenderung tinggi, genangan air permukaan semakin meningkat pada daerah-daerah tersebut. Di beberapa wilayah kecamatan dengan karakteristik alam seperti itu, jaringan drainase seringkali belum ada, sehingga sering terjadi banjir. Untuk wilayah perkotaan banjir semakin berpotensi terjadi karena diperburuk kondisi drainase di beberapa jalur / jalan tidak berfungsi.

Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di daerah – daerah tersebut diatas lebih banyak disebabkan faktor manusia, yang dengan

Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dalam Kab. Tanjung Jabung Barat Dari tahun 2019 s.d 2023.

Kecamatan	Jumlah Penduduk				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Tunkal Ulu	14.029	14.520	14.674	14.575	14.925
2. Merlung	16.105	16.196	16.232	16.260	16.266
3. Batang Asam	33.070	32.423	33.309	33.990	35.405
4. Tebing Tinggi	35.630	36.228	36.316	36.420	36.656
5. Renah Mendaluh	15.104	15.166	15.485	15.494	16.250
6. Muara Papalik	10.218	10.831	10.848	10.462	10.549
7. Pengabuan	26.273	25.514	25.644	26.529	26.609
8. Senyerang	24.920	24.249	24.357	25.163	25.426
9. Tunkal Ilir	73.897	72.795	73.056	75.204	74.919
10. Bram Itam	18.931	18.345	18.678	19.220	19.493
11. Seberang Kota	9.136	8.824	8.858	9.144	9.223
12. Betara	29.223	29.810	29.652	30.218	31.311
13. Kuala Betara	13.582	13.227	13.497	13.851	14.026
Jumlah Total / Rata-rata	320.108	317.498	320.606	326.530	331.058

Sumber: Kab.Tanjung Jabung Barat Dalam Angka Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024

Bertambahnya jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap tingkat kepadatan penduduk pada suatu wilayah, kab. Tanjung Jabung Barat dengan luas wilayah 5.503,5 km² dengan jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 331.058 jiwa, maka rata-rata 59,34 jiwa per Km². Berikut perkembangan kepadatan penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7. Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tanjab Barat Tahun 2019-2023.

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1	2019	320.108	58,16
2	2020	317.498	57,69
3	2021	320.606	58,26
4	2022	326.530	59,34
5	2023	331.058	60,15

Sumber: Kab.Tanjung Jabung Barat Dalam Angka Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

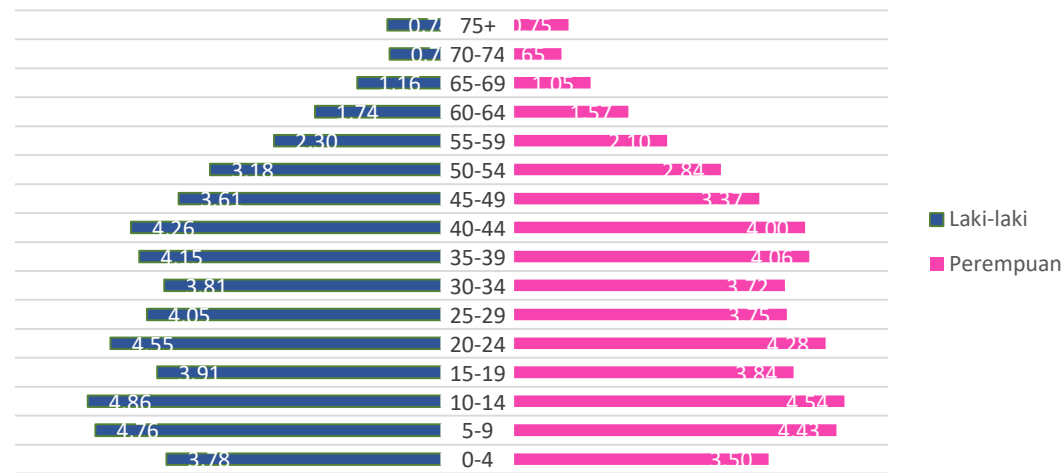
Dilihat dari kelompok umur, penduduk Kabupten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2023 dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Kab.Tanjab Barat Berdasarkan Jenis Kelamin dan kelompok umur Tahun 2023.

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 4	12.508	11.580	24.088
5 - 9	15.575	14.671	30.246
10 - 14	16.102	15.044	31.146
15 - 19	12.936	12.725	25.661
20 - 24	15.067	14.172	29.239
25 - 29	13.402	12.412	25.814
30 - 34	12.620	12.333	24.953
35 - 39	13.749	13.438	27.187
40 - 44	14.127	13.241	27.368
45 - 49	11.958	11.158	23.116
50 - 54	10.527	9.413	19.940
55 - 59	7.619	6.959	14.575
60 - 64	5.754	5.197	10.951
65 - 69	3.833	3.477	7.310
70 - 74	2.364	2.162	4.526
75 +	2.465	2.473	4.938
Jumlah Total	170.606	160.452	331.058

Sumber: Kabupaten Tanjab Barat Dalam Angka Tahun 2024

Gambar 2.3
Piramida Penduduk Kab. Tanjung Jabung Barat 2023



Berdasarkan tabel di atas, maka sebagian besar penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat tergolong dalam kelompok penduduk usia sekolah 5-14 tahun yaitu sebesar 18,54%, sedangkan untuk kelompok usia produktif (15 – 64 tahun) sebesar 69,11%.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Perkembangan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) dari Tahun 2019 sampai dengan 2023

No.	Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.44	0.86	4.54	5,19	6,39
2	Pertambangan & Penggalian	6.62	-1.98	-0.56	-0,12	-0,47
3	Industri Pengolahan	0.93	0.89	-2.41	4,57	5,29
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.87	5.67	17.00	19,91	16,38
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, limbah, dan daur ulang	3.98	1.21	4.21	2,84	1,03
6	Konstruksi	7.35	-0.06	9.05	-0,74	8,18
7	Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	6.17	-5.30	6.74	5,04	9,25
8	Transportasi dan pergudangan	5.49	-3.68	7.78	13,32	5,42
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	6.05	-8.13	4.87	11,39	8,30
10	Informasi dan komunikasi	7.55	7.82	3.64	8,04	7,22

No.	Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
11	Jasa keuangan dan asuransi	2.81	4.83	5.32	-0,63	1,59
12	Real Estate	6.89	-0.30	4.41	3,72	3,57
13	Jasa Perusahaan	4.07	-5.79	5.01	12,85	13,72
14	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	5.60	-2.69	1.04	-0,87	2,90
15	Jasa Pendidikan	5.68	3.01	1.33	2,46	2,49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.15	5.72	15.06	-3,02	4,20
17	Jasa lainnya	4.10	-4.27	1.64	6,63	7,76
	PDRB	5.01	-0.60	1.36	2,56	3,51

Sumber: PDRB Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2017- 2021, 2018 – 2022, 2019 – 2023, BPS Kab. Tanjung Jabung Barat

Tabel 2.10. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 s.d 2023 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah)

No.	Sektor	2019		2020		2021		2022		2023	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.731,15	25,17	6.789,23	30.31	7.097,49	31.13	7.466,60	29,76	7.943,46	33,12
2	Pertambangan & Penggalian	13.148,87	38,15	12.888,04	26.84	12.816,26	29.15	12.899,45	32,90	12.839,37	26,39
3	Industri Pengolahan	5.452,03	16,93	5.500,68	19.62	5.368,23	17.46	5.613,33	17,19	5.910,22	18,49
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.13	0,02	4.37	0,02	5,11	0.03	6,12	0,03	7,12	0,03
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, limbah, dan daur ulang	16,02	0,06	16,21	0.08	16,89	0.07	17,37	0,06	17,55	0.07
6	Konstruksi	1.394,44	4,67	1.393,57	5.47	1.519,64	5.43	1.508,38	4,73	1.631,83	5,20
7	Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	988.58	3,98	936.16	4.52	999.25	4.51	1.049,60	4,31	1.146,64	4,92
8	Transportasi dan pergudangan	235.67	0,82	227.00	0.90	244.65	0.87	275,65	0,87	290,60	0,96
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	130.13	0,52	119.55	0.55	125.38	0.51	139,66	0,48	151,26	0,52
10	Informasi dan komunikasi	527.66	2,06	568.92	2.58	589.63	2.36	637,00	2,14	682,98	2,25

No.	Sektor	2019		2020		2021		2022		2023	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
11	Jasa keuangan dan asuransi	295.07	1,05	309.33	1.25	325.78	1.22	323,73	1,09	328,87	1,12
12	Real Estate	198.94	0,74	198.34	0.88	207.09	0.82	214,78	0,76	222,46	0,79
13	Jasa Perusahaan	330.04	1,19	310.94	1.35	326.53	1.30	365,01	1,32	415,09	1,56
14	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	454.44	1,82	442.24	2.20	446.84	1.95	442,86	1,56	455,69	1,60
15	Jasa Pendidikan	528.86	1,82	544.80	2.25	552.03	2.04	565,63	1,80	579,69	1,86
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	142.97	0,48	151.15	0.61	173.91	0.63	169,18	0,52	176,29	0,56
17	Jasa lainnya	165.98	0,50	158.88	0.58	161.49	0.52	172,19	0,49	185,55	0,55
PDRB		30.976,20	100	30.654,41	100	31.072,19	100	31.866,61	100	32.984,75	100

Sumber: PDRB Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2017- 2021, 2018 – 2022, 2019 – 2023, BPS Kab. Tanjung Jabung Barat

Tabel 2.11. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 s.d 2023 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah)

No.	Sektor	2019		2020		2021		2022		2023	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10 795,04	25,08	11 198,47	30,14	13.087.91	31.13	14.903.79	29,76%	16.844,21	33,63%
2	Pertambangan & Penggalian	16 435,48	38,18	9 994,20	26,90	12256.13	29.15	16.478,14	32,90%	13.420,48	26,80%
3	Industri Pengolahan	7 271,47	16,89	7 369,26	19,83	7339.82	17.46	8.608,13	17,19%	9.403,13	18,78%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,51	0,02	9,10	0,02	10.93	0.03	13,63	0,03%	16,35	0,03%
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, limbah, dan daur ulang	27,93	0,06	28,48	0,08	30.00	0.07	31,69	0,06%	34,15	0,07%
6	Konstruksi	2 012,30	4,68	2 028,16	5,46	2282.01	5.43	2.367,11	4,73%	2.645,40	5,28%
7	Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	1 725,00	4,01	1 675,38	4,51	1894.70	4.51	2.158,19	4,31%	2.504,10	5,00%
8	Transportasi dan pergudangan	355,53	0,83	327,73	0,88	364.12	0.87	434,96	0,87%	486,86	0,97%

No.	Sektor	2019		2020		2021		2022		2023	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	225,75	0,52	206,72	0,56	215.22	0.51	242,66	0,48%	265,60	0,53%
10	Informasi dan komunikasi	891,69	2,07	955,55	2,57	992.66	2.36	1.069,82	2,14%	1.143,99	2,28%
11	Jasa keuangan dan asuransi	443,04	1,03	469,49	1,26	511.35	1.22	544,33	1,09%	569,22	1,14%
12	Real Estate	319,48	0,74	322,65	0,87	346.53	0.82	381,30	0,76%	401,29	0,80%
13	Jasa Perusahaan	516,34	1,20	500,40	1,35	546.90	1.30	661,60	1,32%	793,54	1,58%
14	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	797,16	1,85	810,37	2,18	819.59	1.95	781,54	1,56%	814,51	1,63%
15	Jasa Pendidikan	791,02	1,84	820,60	2,21	858.17	2.04	899,00	1,80%	944,65	1,89%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	208,65	0,48	225,07	0,61	266.03	0.63	262,65	0,52%	283,08	0,57%
17	Jasa lainnya	217,72	0,51	212,25	0,57	217.42	0.52	242,95	0,49%	281,64	0,56%
	PDRB	43,042,12	100	37.,153,88	100	42039.50	100	50.081,53	100	50.852,27	100
	PDRB Non Migas	22,308,09	51,83	22.774,42	61,30	29783.37	60,70%	29.125,45	58,16%	32.761,48	64,42%

Sumber: PDRB Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2017- 2021, 2018 – 2022, 2019 – 2023, BPS Kab. Tanjung Jabung Barat

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha (sektor), yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat
13. Jasa Perusahaan

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya

Struktur ekonomi Kab. Tanjung Jabung Barat sangat ditentukan oleh besaran peranan berbagai lapangan usaha ekonomi yang memproduksi barang dan jasa. Nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

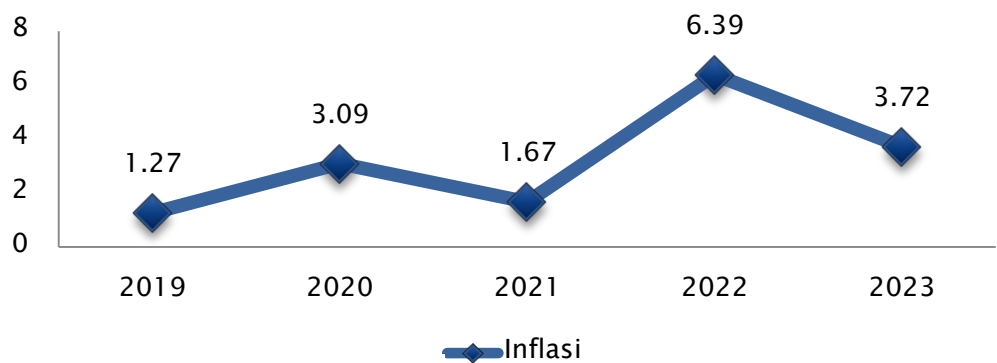
Pada tahun 2023, struktur perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah bergeser dari kategori Pertambangan dan Penggalian ke kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Hal ini terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana sumbangan terbesar pada tahun 2023 berasal dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 33,12 persen. Berbeda dengan tahun 2022 kategori Pertambangan dan Penggalian sebagai lapangan usaha penyumbang terbesar yaitu 32,90%.

Pergeseran ini disebabkan menurunnya beberapa produksi pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, kemudian disisi usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami peningkatan produksi.

2.2.1.2. Laju Inflasi

Laju inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat hingga saat ini masih berpegang pada laju inflasi Kota Jambi yang dapat dilihat dari data Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Jambi sebagaimana ditampilkan pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.4
Inflasi Kota Jambi (Year On Year) Tahun 2019 - 2023



Sumber Data : BPS Provinsi Jambi

Dalam kurun waktu tahun 2019 - 2023, inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 6,39 %, Inflasi Kota Jambi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada lima kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 2,28 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,50 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,01 persen; kelompok Transportasi sebesar 0,26 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,65 persen, dan menurun menjadi 3,72 (yoy) di akhir tahun 2023.

2.2.1.3. PDRB per Kapita ADHK

PDRB perkapita adalah pembagian antara PDRB suatu daerah dengan jumlah orang yang tinggal di daerah tersebut. PDRB Perkapita mencerminkan pendapatan rata-rata setiap orang pada tahun tersebut dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, banyak sedikitnya jumlah penduduk sangat mempengaruhi nilai PDRB per kapita, penduduk dengan jumlah sedikit cenderung menghasilkan nilai PDRB Per Kapita tinggi begitu juga sebaliknya penduduk dengan jumlah besar cenderung menghasilkan nilai PDRB per kapita rendah. Sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang

penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 dengan tren meningkat. Hanya saja pada tahun 2020 ke 2021 mengalami perlambatan. Pada tahun 2019, PDRB per kapita tercatat sebesar 128,58 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 153,60 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas dasar harga konstan 2010 sejak tahun 2019 hingga 2023 dengan tren meningkat. Pada tahun 2019 tercatat PDRB per kapita sebesar 92,05 juta rupiah secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 99,63 juta rupiah.

Tabel 2.12. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita Tanjung Jabung Barat, 2019-2023

Nilai PDRB	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHB (milyar rupiah)	42.945,45	37.133,85	42.080,58	50.081,47	50.852,27
PDRB ADHK Tahun 2010 (milyar rupiah)	30.744,99	30.654,42	31.072,19	31.866,59	32.984,75
PDRB Perkapita ADHB (ribu rupiah)	128,58	117,14	131,09	154,57	153,60*
PDRB Perkapita ADHK Tahun 2010 (ribu rupiah)	92,05	96,70	96,80	98,35	99,63*
Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK Tahun 2010 (persen)	3,11	5,05	0,10	1,60	1,28

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Lapangan Usaha 2019-2023.BPS Kab. Tanjung Jabung Barat

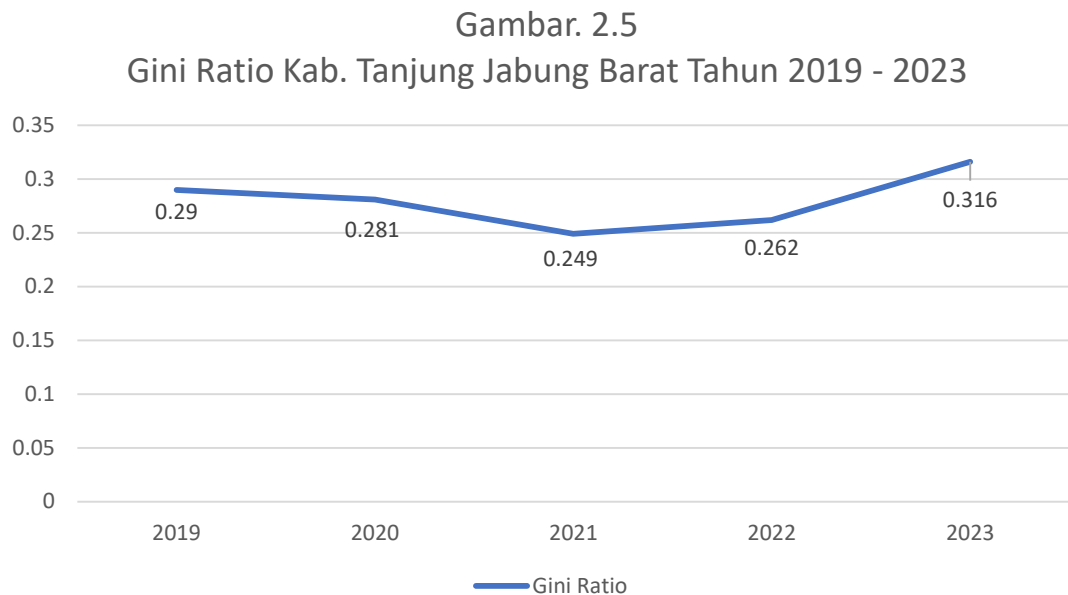
Berbanding dengan PDRB per kapita Prov. Jambi yang sebesar 79,80 juta rupaih (PDRB perkapita ADHB) dan 45,986 juta rupiah (ADHK) pada tahun 2023, PDRB per kapita Kab. Tanjung Jabung Barat masih lebih tinggi dibanding PDRD per kapita Prov. Jambi, namun

tingkat pertumbuhan PDRB per kapita Prov. Jambi diatas tingkat pertumbuhan PDRB per kapita Kab. Tanjung Jabung Barat.

2.2.1.4. Gini Ratio

Indikator utama yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh adalah Gini Ratio. Semakin tinggi nilai koefisien gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi (Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1). Tingkat ketimpangan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami perkembangan yang fluktuatif. Angka Gini Ratio pada tahun 2019 dan 2020 tercatat sebesar 0,28, kemudian pada tahun 2021 tercatat sebesar 0,25. Pada tahun 2022 gini ratio sebesar 0,26 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 0,31. Menurut Harry T. Oshima, nilai Indeks Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”. Nilai Tingkat Ketimpangan Pendapatan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada pada tingkatan Moderat.

Ketimpangan pendapatan lebih disebabkan oleh pembangunan infrastruktur, wilayah, dan sosial yang belum merata, di beberapa wilayah (kecamatan/desa) masih tertinggal dari wilayah (kecamatan/desa) lain dari sisi ketersediaan infrastruktur dasar. Kesempatan/peluang daerah untuk berkembang yang kecil akan menurunkan kemampuan masyarakatnya dalam memperoleh pemasukan/pendapatan, faktor lain yang ikut menyebabkan ketimpangan pendapatan adalah konsentrasi kekayaan yang tidak merata

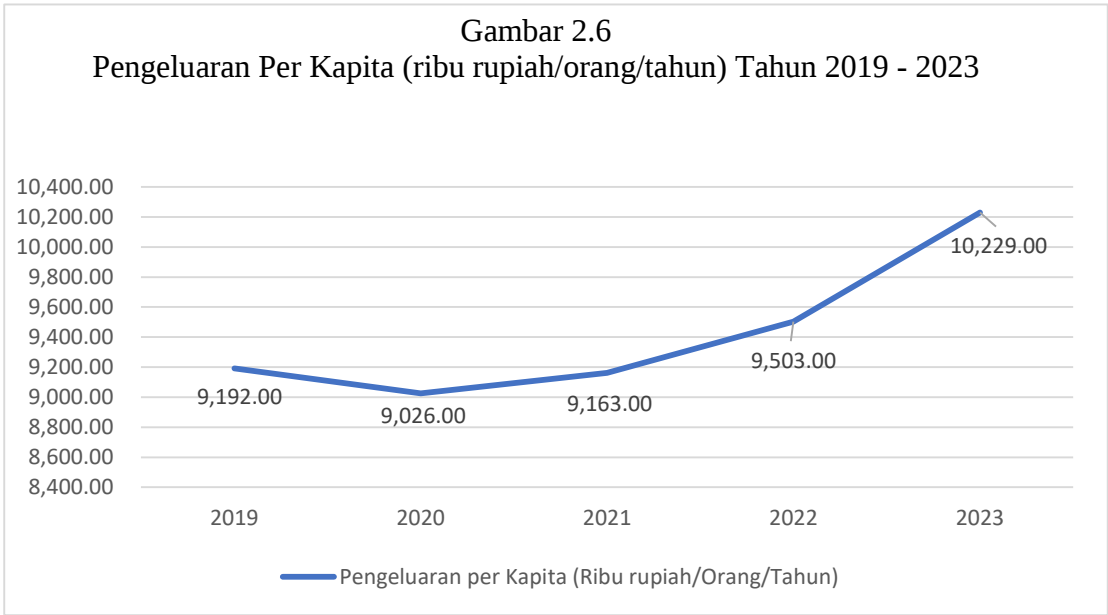


Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2023

Dilihat dari grafik diatas, koefisien gini Kab. Tanjung Jabung Barat terakhir tahun 2023 sebesar 0,316 adalah termasuk dalam kategori sedang. Masih adanya kesenjangan di kabupaten ini bisa disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, hanya pada sektor-sektor tertentu yang tidak dinikmati oleh masyarakat luas. Selain itu akibat tidak meratanya perkembangan pembangunan antar kecamatan sehingga terlihat kesenjangan (*gap*) antar wilayah kecamatan.

2.2.1.5. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran rata-rata perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga, baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut (BPS, 2022). Pengeluaran perkapita sebagai satu salah indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang ditunjukkan melalui tingkat daya beli masyarakat, disamping itu pengeluaran perkapita sebagai salah satu komponen yang digunakan dalam melihat status pembangunan manusia di suatu daerah.



Sumber: BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, 2024

Secara tren perkembangan pengeluaran per kapita Kab. Tanjung Jabung Barat mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dari tahun 2019 ke 2020 pengeluaran per kapita masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat mengalami penurunan dari sebesar Rp.9.192.000,- menjadi Rp. 9.026.000,-, penurunan ini disebabkan dampak dari pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 yang mulai terjadi diakhir tahun 2019 berlanjut ke tahun 2020 hingga 2021 melanda sebagian besar negara – negara didunia yang menyebabkan aktivitas perekonomian dunia menurun termasuk negara Indonesia juga. Pasca pandemi covid-19 mulai menurun di tahun 2021 berdampak positif terhadap perekonomian, seiring menurunnya pandemi covid-19 pengeluaran per kapita Kab. Tanjung Jabung Barat mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi sebesar Rp.10.229.000,-

2.2.1.6. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu strategis. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.

Tabel 2.13. Statistik Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 – 2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (Rp.)	464.012,-	396.113,-	409.631,-	453.956,-	499.318,-
JumlahPenduduk Miskin (000 Jiwa)	35,12	34,79	36,10	33,95	33,60
Penduduk Miskin (%)	10,56	10,29	10,75	10,00	9,79

Sumber : BPS Tanjung Jabung Barat, 2024

Selama kurun waktu tahun 2019-2023, statistik kemiskinan Kab. Tanjung Jabung Barat berfluktuasi, jumlah penduduk msikin dari tahun 2019 ke tahun 2020 penduduk mengalami penurunan, dari 35.120 jiwa (10,56%) menjadi 34.790 jiwa (10,29%), kemudian tahun 2021 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dari 34.790 jiwa (10,29%) di tahun 2020 meningkat menjadi 36.100 jiwa (10,75%) di tahun 2021, peningkatan jumlah penduduk miskin ini disebabkan dampak dari pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 yang mulai terjadi diakhir tahun 2019 berlanjut ke tahun 2020 hingga 2021 melanda sebagian besar negara – negara didunia yang menyebabkan aktivitas perekonomian dunia menurun termasuk negara Indonesia juga. Kemudian terakhir di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 33.600 jiwa atau 9,79%.

Bila menurut kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, Tingkat kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada diurutan ke 10 dari 11 kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi. Serta masih

jauh diatas rata – rata tingkat kemiskinan 11 kabupaten/kota (7,58%).

Masih besarnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan kriteria miskin disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah air bersih, listrik, lantai bangunan kayu, luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang, tidak memiliki fasilitas buang air besar dan pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah SD atau tidak tamat SD, aksesibilitas layanan kesehatan dan pendidikan.

2.2.2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

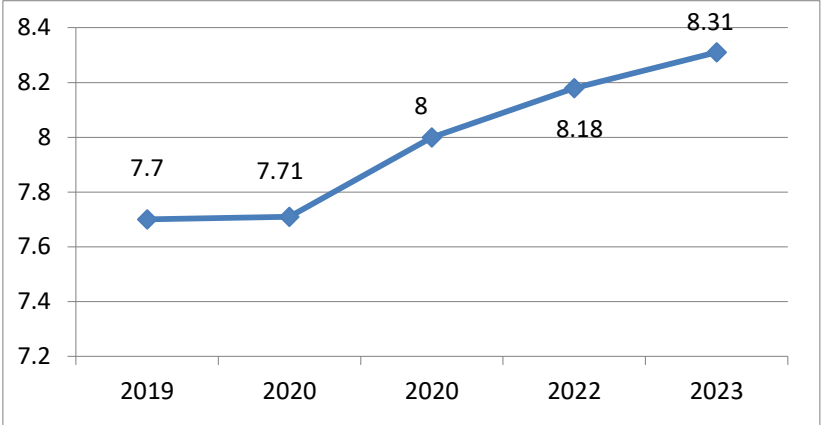
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, indeks ketimpangan gender

2.2.2.1. Rata – rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah mengacu pada nilai numerik yang menggambarkan jumlah tahun yang dihabiskan individu dalam pendidikan formal. Ini dapat dihitung dengan menjumlahkan lama sekolah dari setiap individu dalam suatu populasi dan membaginya dengan jumlah individu tersebut. Rata-rata lama sekolah adalah indikator yang digunakan dalam analisis pendidikan dan pengembangan manusia, karena dapat memberikan gambaran tentang tingkat pendidikan dalam suatu masyarakat atau negara. Jadi, secara sederhana, pengertian rata-rata lama sekolah adalah angka rata-rata tahun yang dihabiskan oleh individu dalam pendidikan formal.

Rata – rata lama sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih tergolong rendah yaitu hanya selama 8,31 tahun, artinya rata – rata penduduk hanya menyelesaikan pendidikan sampai kelas 2 SMP/MTs.

Gambar 2.7 Rata – rata lama sekolah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019-2023



Sumber : Kab. Tanjung Jabung Barat dalam Angka Tahun 2019 s.d 2024, BPS Tanjung Jabung Barat

2.2.2.2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pendidikan digunakan Angka Partisipasi Kasar (APK). Dimana APK merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

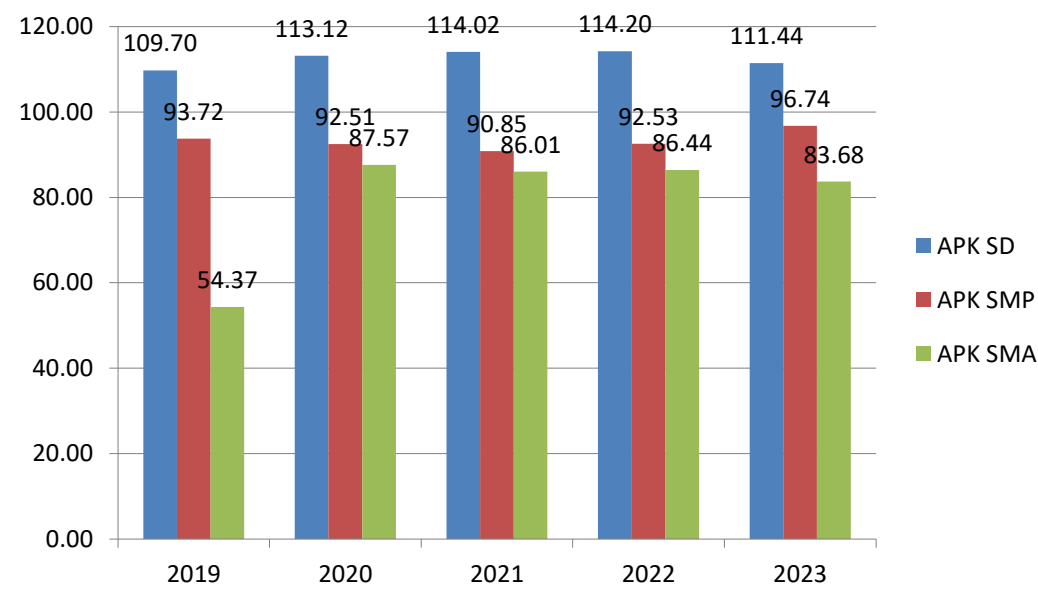
Sesuai dengan konsep tersebut, APK untuk SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 % karena populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun).

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023, Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat bervariasi pada setiap jenjang pendidikan. APK SD/MI/Sederajat sebesar 111,44 persen, APK SMP/MTs/Sederajat sebesar 96,74 persen, dan APK SMA/MA/Sederajat sebesar 83,68 persen

Capaian APK untuk SD/MI Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2019-2023 relatif tetap. Secara rata-rata capaian APK untuk SD/MI adalah 112,49 % per tahun artinya dengan capaian masih di atas 100, meskipun pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 4,30% dari 114,00% menjadi 109,70%. Kondisi ini karena

populasi siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2019-2023 mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI yaitu anak bersekolah di SD/MI berumur kurang dari 7 tahun dan/atau lebih dari 12 tahun. Tingginya angka APK SD/MI dikarenakan Pemerintah daerah terus menambah jumlah unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB) untuk mengimbangi perkembangan penduduk.

Gambar 2.8. Capaian APK SD, SMP dan SMA Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019-2023



Sumber : Kab. Tanjung Jabung Barat dalam Angka Tahun 2020,2021,2023,2024
BPS Tanjung Jabung Barat

Untuk capaian APK SMP/MTs Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 5 tahun 2019 sampai dengan 2023 diatas 90% dengan rata – rata sebesar 93,27%, ini menunjukkan bahwa jumlah siswa usia sekolah (13 – 15 tahun) tidak sebanding atau kurang dari jumlah penduduk usia 13- 15 tahun artinya masih terdapat penduduk usia sekolah tidak bersekolah di SMP/MTs/paket B. Pada tahun 2021 APK SMP/MTs berada pada capaian terendah yaitu 90,85%, mengalami penurunan sebesar 1,66% dari tahun sebelumnya, penurunan ini disebabkan dampak pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak penduduk termasuk bersekolah.

Capaian APK SMA/MA/SMK selama kurun waktu tahun 2019-2023 dengan rata – rata 79,61%, ini menunjukkan bahwa jumlah siswa usia sekolah (16 – 18 tahun) tidak sebanding atau kurang dari

jumlah penduduk usia 16- 18 tahun artinya masih terdapat penduduk usia 16 – 18 tahun tidak bersekolah di SMA/MA/paket C.

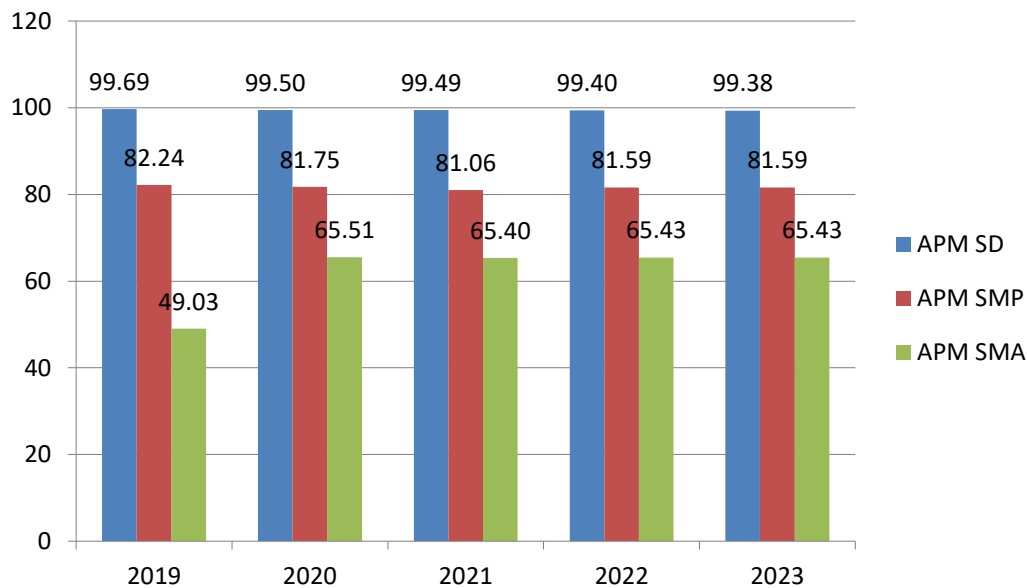
2.2.2.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Untuk melihat penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah pada jenjang pendidikan usia sekolahnya, digunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran dalam hal ini adalah APM untuk tingkat SD/MI yang merupakan proporsi jumlah murid SD/MI yang berusia 7–12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 – 12 tahun.

Apabila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat pada jenjang pendidikan usia sekolahnya, maka nilai APM akan mencapai 100 persen. Sebaliknya, jika hanya sebagian anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan lebih kecil dari 100 persen. Sejalan dengan itu, nilai APM akan selalu lebih kecil dari 100 atau sama dengan 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari nilai APK, karena APK menyangkut anak diluar usia sekolah dan beberapa jenjang pendidikan.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023, Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat bervariasi pada setiap jenjang pendidikan. APM SD/MI/Sederajat sebesar 99,38 persen, APM SMP/MTs/Sederajat sebesar 81,71 persen, dan APM SMA/MA/Sederajat sebesar 53,35 persen, artinya tidak seluruh anak kelompok usia SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, dan SMA/MA/ Sederajat yang dapat bersekolah sesuai jenjang pendidikan usia sekolahnya.

Gambar 2.9. Capaian APM SD, SMP dan SMA Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019-2023



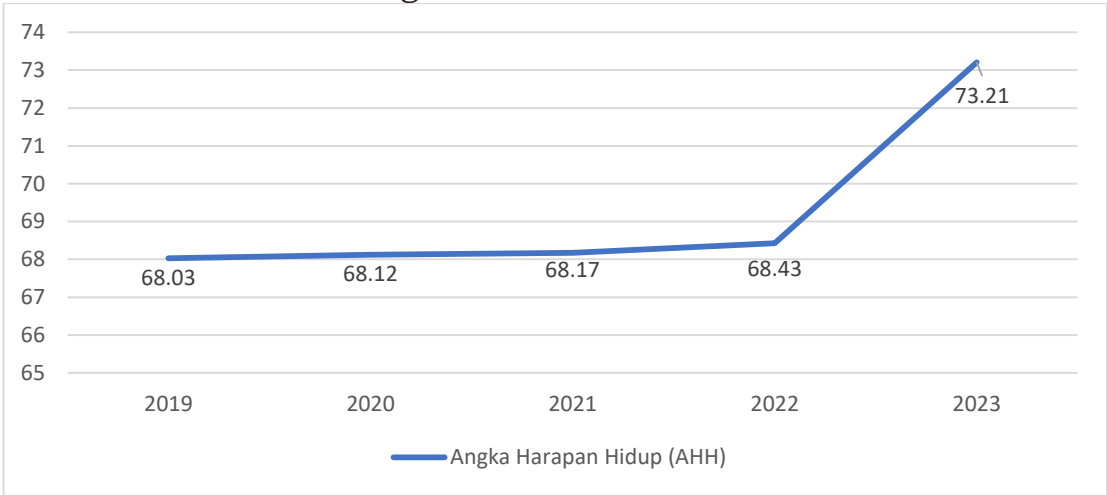
Sumber : Kab. Tanjung Jabung Barat dalam Angka Tahun 2020 s.d. 2024, BPS
Tanjung Jabung Barat

2.2.2.4. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah perkiraan jumlah tahun hidup di suatu wilayah dari sekelompok manusia tertentu. Angka harapan hidup merupakan cermin dari Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir serta kondisi kesehatan penduduk yang memiliki kemampuan bertahan hidup atau umur lebih lama karena kesehatannya lebih baik. Indikator panjang umur dari seseorang di suatu wilayah atau negara bukan hanya upaya individu tetapi merupakan upaya masyarakat secara keseluruhan (dalam kasus ini, di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan) untuk menggunakan sumber daya yang ada sehingga dapat memperpanjang hidupnya. Dapat dikatakan seseorang akan bertahan hidup lebih panjang apabila memiliki harapan hidup yang tinggi saat lahir (status gizi dan kesehatan prenatal dan postnatal), selalu sehat, atau jika sakit dapat segera berobat untuk mempercepat kesembuhannya.

Indikator angka harapan hidup dapat mengevaluasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Gambar 2.10. Angka Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Tanjung Jabung Barat, 2024

Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023, dengan rata – rata peningkatan sebesar 1,29 tahun. Angka Harapan Hidup Provinsi Jambi terakhir tahun 2023 adalah 71,77 lebih tinggi dari angka harapan hidup Kab. Tanjung Jabung Barat di tahun yang sama.

Tersedianya fasilitas kesehatan berupa 2 rumah sakit, 16 puskesmas, 71 puskesmas pembantu, 159 posyandu, dan 122 klinik / poskesdes serta ditunjang dukungan pemerintah dengan program Jaminan Persalinan daerah (jampersal) mendukung peningkatan Angka Harapan Lahir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

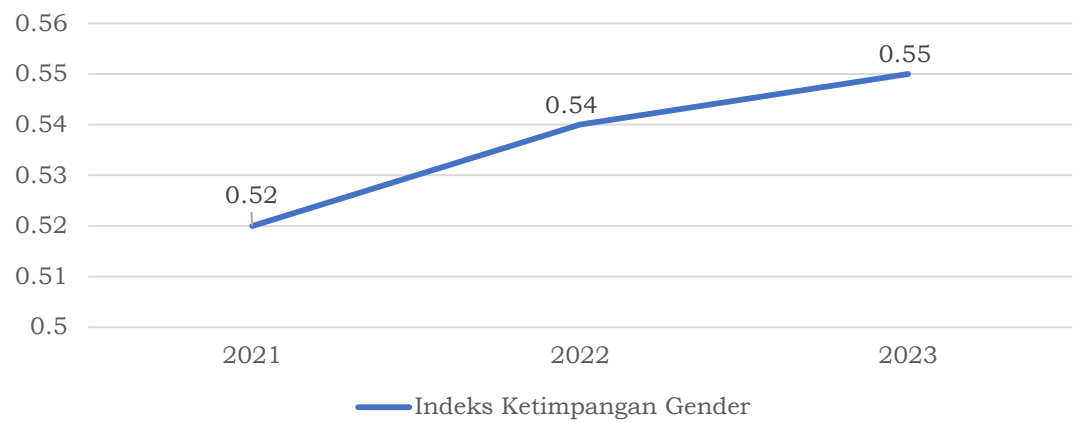
2.2.2.5. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (Gender Inequality Index atau GII) adalah sebuah indikator yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) untuk mengukur ketidaksetaraan gender di berbagai daerah. Indeks ini berfokus pada tiga dimensi utama yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.

Indeks ini berfungsi untuk menggambarkan sejauh mana ketimpangan gender terjadi di suatu daerah. Semakin tinggi nilai GII, semakin tinggi pula ketimpangan gender di daerah tersebut, yang menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki akses yang lebih rendah terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan

ekonomi dibandingkan laki-laki. Indeks ini membantu dalam mengidentifikasi area di mana ketidaksetaraan gender perlu ditangani melalui kebijakan dan intervensi.

Gambar. 2.11. Indeks Ketimpangan Gender Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2023



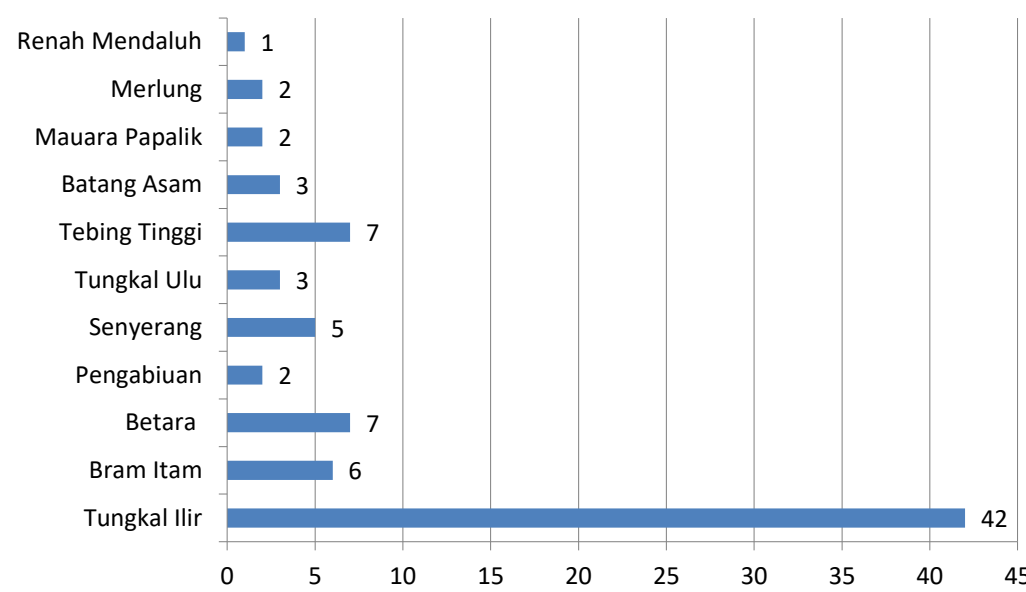
Indeks Ketimpangan Gender Kab. Tanjung Jabung Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 00,52 di tahun 2021 menjadi 0,55 di tahun 2023, artinya tingkat ketimpangan gender tersebut tergolong cukup signifikan. Ada ketimpangan yang signifikan dalam akses perempuan terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi, tetapi belum mencapai tingkat yang ekstrem.

2.2.3. FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

2.2.3.1. Jumlah Grup Kesenian

Dalam lima tahun terakhir jumlah grup seni budaya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami peningkatan dari 76 grup seni budaya di tahun 2019 menjadi 81 ditahun 2023, peningkatan ini menunjukkan jumlah grup seni budaya yang sudah ada mampu bertahan keberadaannya, kemudian peningkatan minat kelompok masyarakat untuk mendirikan grup seni budaya baru dalam kehidupan yang semakin maju dan canggih.

Gambar 2.12. Jumlah Grup Seni Budaya Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat, 2023

2.2.3.2. Jumlah Klub Olah Raga, Gedung Olahraga, dan Lapangan Olahraga

Gedung olah raga dalam Kab. Tanjung Jabung Barat tercatat sebanyak 22 gedung dan lapangan olah raga sebanyak 310, terjadi peningkatan yang cukup besar pada sarana olah raga, sebelumnya di tahun 2017 tercatat ada 4 gedung olah raga dan 109 lapangan olah raga. Olahraga futsal, bola volley, dan bulu tangkis masih menjadi trend bagi kalangan remaja dan masyarakat pada umumnya. Seiring meningkatnya jumlah sarana olah raga diikuti juga dengan bertambahnya jumlah klub – klub olah raga seperti klub olahraga futsal, bulutangkis, bola kaki, bola volly, takraw serta olahraga lainnya seperti panahan, dan bela diri.

Tabel 2.14. Jumlah Sarana Olahraga perkecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Sarana	
		Gedung Olahraga	Lapangan Olahraga
1	Tungkal Ilir	3	17
2	Betara	2	49
3	Kuala Betara	4	21
4	Bram Itam	-	16

5	Senyerang	0	27
6	Pengabuan	1	8
7	Tebing Tinggi	1	11
8	Tungkal Ulu	-	1
9	Batang Asam	3	19
10	Merlung	7	39
11	Renah Mendaluh	1	35
12	Muara Papalik	-	30
13	Seberang Kota	0	37
	Jumlah	22	310

Sumber : Disparpora Kab. Tanjung Jabung Barat, 2024

Tabel 2.15. Jumlah Klub Olahraga Menurut Cabang Olah Raga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023

No.	Nama Cabor	Jumlah
1	Badminton	33
2	Karate	1
3	Panahan	1
4	Pencak Silat	11
5	Sepak Bola	21
6	Tarung Derajat	5
	Jumlah	72

Sumber : Disparpora Kab. Tanjung Jabung Barat, 2023

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB

2.3.1.1. Pendidikan

Ketersediaan sekolah dan guru mewujudkan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat hingga ke daerah – daerah, semakin banyak dan merata jumlah sekolah dan tenaga pendidik artinya akan semakin banyak anak usia sekolah dapat bersekolah.Secara umum, arah pembangunan jangka panjang bidang sumber daya manusia adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang dilakukan

melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu pelayanan sosial dasar, termasuk pendidikan. Berikut jumlah sekolah tingkat dasar (SD), pertama (SMP), dan atas (SLTA) pada tahun 2023.

Tabel 2.16. Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan diKabupaten Tanjung Jabung Barat, 2023

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid - Guru
1. Tungkal Ulu	11	1.688	97	17,40
2. Merlung	11	1.974	118	16,73
3. Batang Asam	15	4.861	207	23,48
4. Tebing Tinggi	20	3.893	202	19,27
5. Renah Mendaluh	11	2.088	107	19,51
6. Muara Papalik	11	1.137	82	13,87
7. Pengabuan	25	2.313	188	12,30
8. Senyerang	23	2.412	150	16,08
9. Tungkal Ilir	30	7.223	431	16,76
10. Bram Itam	12	1.510	116	13,02
11. Seberang Kota	10	835	71	11,76
12. Betara	20	3.595	222	16,19
13. Kuala Betara	17	1.108	116	9,55
Jumlah	216	34.637	2.107	16,44

Sumber : Dapodikdasmen Kemendikbud, 2023

Sebagaimana dinyatakan bahwa indikator rasio murid perguru dapat menunjukkan keefektifan seorang guru dibanding dengan jumlah siswa yang dilayani, Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, standar ideal rasio murid-guru adalah 20:1 untuk SD, 20:1 untuk SMP, 20:1 untuk SMA, dan 15:1 untuk SMK. Pada tahun 2023 rasio murid – guru SD sebesar 16,44 artinya seorang guru melayani sebanyak 16 orang murid, untuk rasio murid - guru SMP sebesar 11,50, dan untuk rasio guru - murid SMA sebesar 14,70. Rasio perbandingan guru-murid yang rendah karena adanya sekolah- sekolah di daerah perdesaan dengan jumlah murid sedikit atau kurang dari 100 orang.

Tabel 2.17. Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2023

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid - Guru
1. Tungkal Ulu	4	380	46	8,26
2. Merlung	4	642	47	13,66
3. Batang Asam	8	1.544	93	16,60
4. Tebing Tinggi	9	1.509	117	12,90
5. Renah Mendaluh	4	509	41	12,41
6. Muara Papalik	3	246	31	7,94
7. Pengabuan	5	305	47	6,49
8. Senyerang	7	484	70	6,91
9. Tungkal Ilir	6	2.051	126	16,28
10. Bram Itam	2	69	15	4,60
11. Seberang Kota	3	100	23	4,35
12. Betara	7	1.035	85	12,18
13. Kuala Betara	4	202	33	6,12
Jumlah	66	9.076	789	11,50

Sumber : Dapodikdasmen Kemendikbud, 2023

Tabel 2.18. Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2023

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid - Guru
1. Tungkal Ulu	1	277	18	15,39
2. Merlung	2	540	41	13,17
3. Batang Asam	2	712	39	18,26
4. Tebing Tinggi	3	902	53	17,02
5. Renah Mendaluh	3	322	23	14,00
6. Muara Papalik	1	158	18	8,78
7. Pengabuan	3	468	38	12,32
8. Senyerang	4	407	30	13,57
9. Tungkal Ilir	4	1727	121	14,27
10. Bram Itam	1	101	4	25,25
11. Seberang Kota	-	0	-	-

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid - Guru
12. Betara	4	777	48	16,19
13. Kuala Betara	1	79	7	11,29
Jumlah	29	6.470	440	14,70

Sumber : Dapodikdasmen Kemendikbud, 2023

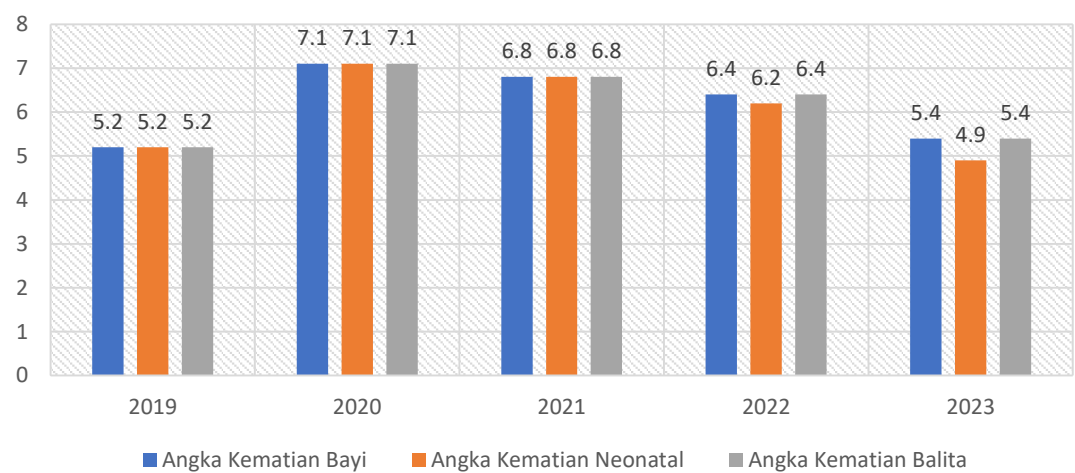
Secara keseluruhan rasio murid guru SD, SMP, dan SMA di atas terlihat bahwa kecukupan guru untuk pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas secara relatif sudah memadai, namun dilihat secara kecamatan ada beberapa kecamatan memiliki rasio murid guru diatas rata – rata kabupaten seperti Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tungkal Ilir, dan Kecamatan Tebing Tinggi, disamping itu ada beberapa kecamatan yang rasio murid guru yang dibawah rata – rata rasio murid guru kabupaten seperti Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Bram Itam, dan Muara Papalik artinya sebaran murid dan guru tidaklah merata.

2.3.1.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Pemeliharaan kesehatan salah satu upaya pembangunan kesehatan yang dimulai dari kehamilan, persalinan, bayi hingga lanjut usia.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Terdapat 116 sarana kesehatan dalam mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan, yang terdiri dari 2 rumah sakit, 16 puskesmas, 75 puskesmas pembantu, 15 klinik, dan 20 apotik.

Gambar 2.13. Angka Kematian Bayi dan Balita Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 -2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat, 2024

Angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Selama lima tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan 2023 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita berfluktuasi, ditahun 2019 AKB dan Angka Kematian Balita sebesar 5,2 per 1.000 kelahiran kemudian mengalami peningkatan hingga 7,1 baik AKB maupun Angka Kematian balita ditahun 2020, dan mengalami penurunan himnga 6,4 ditahun 2022, dan terakhir di tahun 2023 Angka kmeatian bayi, neonatal, dan balita mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan target MDG's (23 per 1.000 kelahiran hidup) maka masih jauh lebih baik. faktor penyebab langsung dan faktor penyebab tidak langsung. Faktor penyebab langsung yaitu: Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), Kekurangan oksigen (Asfiksia) dan Infeksi. Adapun faktor penyebab tidak langsung yaitu: Keterlambatan dalam proses rujukan dikarenakan akses yang dipengaruhi oleh faktor geografis (daerah perairan dan pasang surut), belum terbentuknya

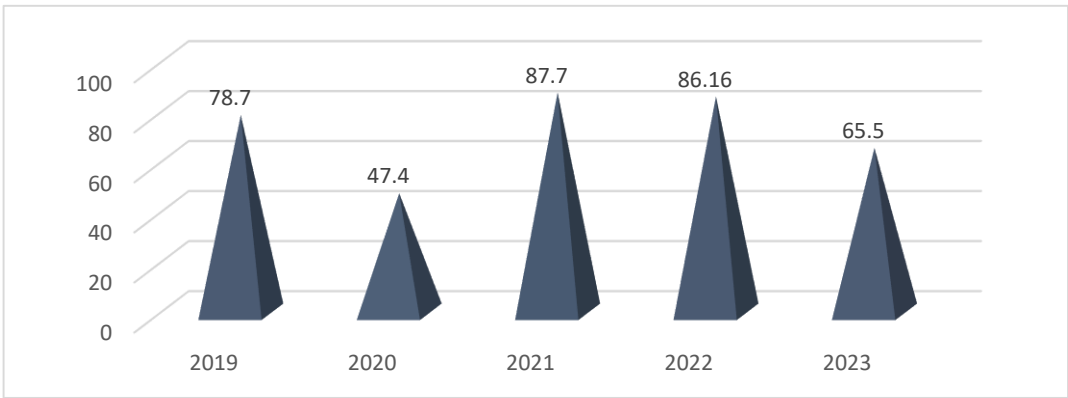
regionalisasi rujukan kasus maternal dan neonatal ditingkat puskesmas, berkurangnya kelengkapan Tim PONED (Pelayanan Obsetri Neonatal Esensial Dasar) Puskesmas yang sudah dibentuk dan dilatih dikarenakan pindah tempat bertugas sehingga dibutuhkan pelatihan tim yang baru.

Untuk mengatasi faktor penyebab tersebut dibutuhkan beberapa solusi yaitu: optimalisasi sistem rujukan dengan proses pembentukan regulasi regionalisasi rujukan tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas), melakukan pelatihan Tim PONED Puskesmas Perawatan dan Memantapkan kembali Kemitraan bidan dan dukun bayi terutama bagi desa yang belum maksimal menjalani kemitraan sehingga mengurangi peran dukun bayi secara langsung dalam menolong persalinan dengan mengalihkan peran dukun tersebut sebagai pendamping bidan dalam menolong persalinan.

Selain Angka Kematian Bayi, Neonatal dan Balita ada Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate (MMR)* juga untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Kasus kematian ibu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2019 terdapat 5 kasus dari 6.353 kelahiran hidup (AKI 78,7 per 100.000 KLH) dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 3 kasus dari 6.331 kelahiran hidup (AKI 47,4 per 100.000 KLH), pada tahun 2021 meningkat menjadi 5 kasus dari 5.702 kelahiran hidup (AKI 87,7 per 100.000 KLH) dan terakhir pada tahun 2023 menjadi 4 kasus dari 5.803 kelahiran hidup (AKI 65,5 per 100.000 KLH) angka kematian Ibu pada tahun 2023 masih dibawah target kabupaten yaitu 205 per 100.000 KLH, sedangkan target SDGs (Sustainable Development Goals), pada tahun 2030 mengurangi rasio angka kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 KLH.

Dimana penyebab kematian disebabkan oleh eklamsi 1, partus macet 1, inpartu dengan sesak 1 (riwayat asma) dan 2 suspect covid-19. Dimana penyebab tersebut dapat dideteksi secara dini jika dilakukan pemeriksaan ANC secara teratur. Berikut di gambarkan Grafik angka Kematian Ibu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2017 - 2022:

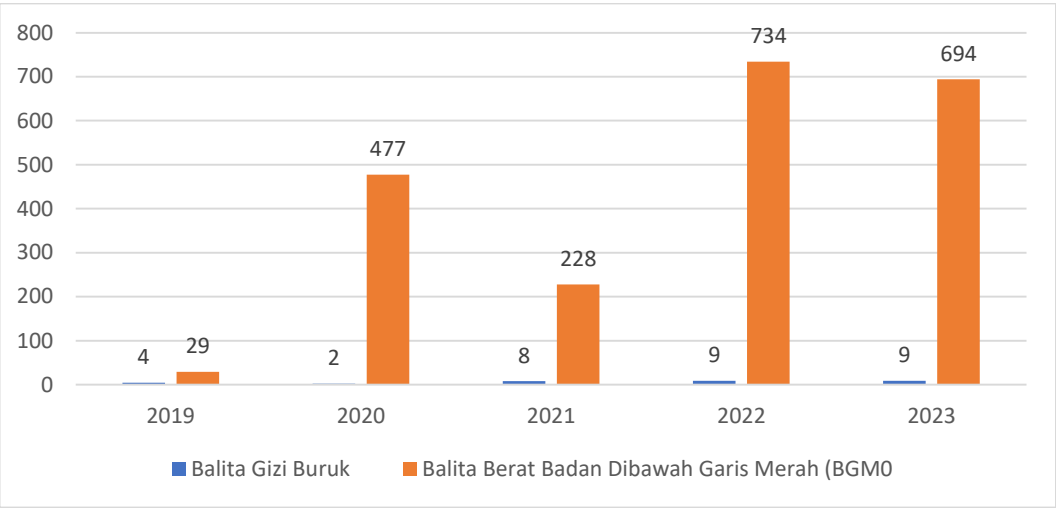
Gambar 2.14. Angka Kematian Ibu Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2019 - 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

Status gizi seseorang sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung juga dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perkembangan keadaan gizi masyarakat dapat dipantau berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan program gizi. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat jumlah kasus gizi buruk berfluktuasi, pada tahun 2019 kasus gizi buruk sebanyak 4 kasus dan pada tahun 2020 menurun menjadi 2 kasus dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 8 kasus, kemudian meningkat lagi menjadi 9 kasus di tahun 2022 dan 2023. Berikut dibawah ini grafik perkembangan jumlah balita gizi buruk dan berat badan dibawah garis merah (BGM) dari tahun 2019 sampai dengan 2023.

Gambar 2.15. Jumlah Balita gizi Buruk dan Berat Badan Dibawah Garis Merah (BGM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 - 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

Menurunnya kasus gizi buruk seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan pendidikan orang tua, tingkat ekonomi keluarga, kebersihan lingkungan.

Gambaran kinerja dan perkembangan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah KH Daud Arif Tahun 2019-2023 pada Grafik dibawah ini :

1. BOR (*Bed Occupation Rate*)

Indikator ini untuk mengukur tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur. Lima tahun terakhir dari 2019 s.d. 2023 pemanfaatan tempat tidur berfluktuasi, dengan rata – rata 52,48

Pada tahun 2021, pemanfaatan jumlah tidur mencapai 60,33 dikarenakan banyaknya pasien covid yang dirawat inap di RSUD Kh. Daud Arif sehingga untuk pemaikan tempat tidur tinggi. Pada tahun 2022 terjadi penurunan dikarenakan tempat tidur khusus isolasi banyak yang kosong, sehingga penghitungan indikator penyebab BOR menurun.

2. AvLOS (*Length of Stay*) merupakan salah satu indikator mutu pelayanan Rumah Sakit. Pada tahun 2023 angka AvLOS mengalami penurunan dari tahun – tahun sebelumnya menjadi sebesar 2,96. Dari aspek medis, semakin lama angka AvLOS maka bisa menunjukkan kinerja kualitas medis yang kurang baik karena pasien harus dirawat lebih lama (lama sembuhnya). Dari aspek ekonomis, semakin lama nilai AvLOS berarti semakin tinggi biaya yang

nantinya harus dibayar oleh pasien kepada pihak rumah sakit. Jadi diperlukan adanya keseimbangan antara sudut pandang medis dan ekonomis untuk menentukan nilai AvLOS yang ideal. Nilai AvLOS ideal yang disarankan yaitu 3-12 hari (Sudra, 2010:45) 2014. Walaupun meningkat 0,1 hari tetapi masih dibawah nilai ideal AvLOS yang disarankan artinya semakin cepat sembuhnya pasien RSUD.

3. TOI (*Turn Over Interval*)

Indikator ini untuk mengukur rata – rata hari tempat tidur tidak ditempati saat ke saat sampai terisi berikutnya. Pada tahun 2023 TOI sebesar 2,5, sebelumnya tahun 2022 TOI sebesar 23,29 hari meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 14,19 hari, sedangkan standar nasional untuk TOI berkisar 1 – 3 hari. Semakin besar Angka TOI, berarti semakin lama waktu “menganggurnya” tempat tidur tersebut yaitu semakin lama saat dimana sebuah tempat tidur tidak digunakan oleh pasien. Hal ini berarti tempat tidur semakin tidak produktif. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan dari segi ekonomi bagi pihak manajemen rumah sakit. Semakin kecil angka TOI, berarti semakin singkat saat tempat tidur menunggu pasien berikutnya. Hal ini bisa berarti tempat tidur bisa sangat produktif, apalagi jika TOI = 0 berarti tempat tidur tidak sempat kosong satu haripun dan segera digunakan lagi oleh pasien berikutnya. Hal ini bisa sangat menguntungkan secara ekonomi bagi pihak manajemen rumah sakit, tapi bisa merugikan pasien karena tempat tidur tidak sempat disiapkan secara baik. Akibatnya, kejadian infeksi nosokomial mungkin saja meningkat, beban kerja tim medis meningkat sehingga kepuasan dan keselamatan pasien terancam. Berkaitan dengan pertimbangan tersebut, maka nilai ideal TOI yang disarankan adalah 1-3 hari (Sudra, 2010:51).

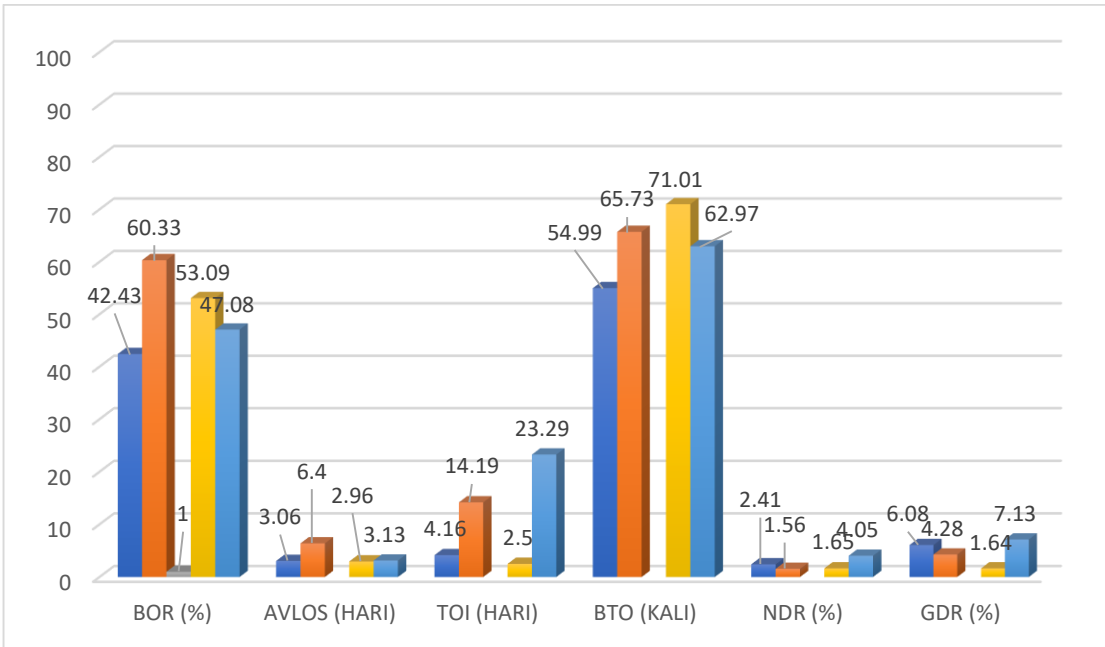
4. GDR (*Gross Death Rate*) atau Angka Kematian Kasar.

Indikator ini digunakan untuk menilai angka kematian dibawah 48 jam setelah dirawat. Tahun 2023 angka kematian kasar sebesar 1,64 mengalami penurunan dari tahun 2022 (7,13 %), sedangkan standar Nasional untuk GDR yaitu dibawah dari 3%.

5. NDR (*Net Death Rate*) atau Angka Kematian Bersih

Indikator ini digunakan untuk menilai angka kematian diatas 48 jam setelah dirawat. Terjadi penurunan NDR yaitu dari 4,05 % di tahun 2022 menjadi 1,65 % di tahun 2023, sedangkan standar nasional untuk NDR yaitu dibawah dari 2,5%.

Gambar 2.16. Pelayanan RSUD KH Daud Arif Tahun 2020-2023



2.3.1.3. Pekerjaan umum

Infrastruktur merupakan unsur penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi, ketersediaan Infrastruktur terutama infrastruktur dasar sebagai jalan menggerakkan roda perekonomian yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan meringankan kemiskinan.

Jalan

Berdasarkan surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 600/707/DPU/2016 tentang Penetapan Ruas Jalan Kabupaten Dalam Jaringan Jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ditetapkan panjang jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 1.265,204 KM. Terakhir tahun 2023 panjang jalan kolektor primer empat dan jalan lokal menurut jenis permukaan dan kondisi jalan yang terdiri dari jalan aspal sepanjang 416,769 km (32,95), jalan kerikil / koral sepanjang 590,976 km (46,72%), dan jalan tanah sepanjang 105,45 km (8,30%), dengan kondisi jalan baik sepanjang 297,491 km (23,52%),

jalan dengan kondisi sedang sepanjang 282,392 km (22,32%), jalan dengan kondisi rusak sepanjang 290,754 km (22,98%), dan jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 394,587 (31,19%).

Tabel. 2.19. Panjang Jalan Kabupaten Kab. Tanjung Jabung Barat menurut jenis permukaan dan kondisi jalan Tahun 2019 s.d. 2023

Keadaan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
I. Jenis Permukaan					
a. Aspal	218,09	253,05	254,854	297,984	416.769
b. Kerikil	475,67	392,23	390,431	416,701	590.976
c. Tanah	563	506,86	506,862	467,122	105,45
d. Perkerasan Rigid/Beton	8,52	113,05	113,057	83,397	152.009
*(dalam kilometer)					
Jumlah	1265,20	1265,20	1265,20	1265,20	1265,20
II. Kondisi jalan					
a. Baik	161,50	177,38	179,176	242,626	297.491
b. Sedang	389,69	310,48	304,585	302,842	282.392
c. Rusak	501,64	22,28	28,23	240,272	290,754
d. Rusak berat	212,35	755,01	753,213	479,464	394.587
*(dalam kilometer)					
	1265,20	1265,20	1265,20	1265,20	1265,20
III. Kelas jalan					
a. Kelas I					
b. Kelas II					
c. Kelas III					
d. Kelas IIIA					
e. Kelas IIIB	1265,20*	1265,20*	1265,20*	1265,20*	1265,20*
f. Kelas IIIC					
*(dalam kilometer)					
	1265,20	1265,20	1265,20	1265,20	1265,20

Sumber : Dinas PUPR Kab. Tanjung Jabung Barat, 2023

Tahun 2023 kondisi jalan dalam keadaan baik dan sedang sepanjang 579,883 atau 45,84%, kondisi jalan baik dan sedang masih dibawah kondisi jalan dalam kondisi Rusak/Rusak Berat, lambatnya peningkatan kondisi jalan lebih disebabkan faktor topografi sebagian wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat, terdapat enam kecamatan memiliki permukaan tanah dengan jenis tanah organosol, tanah berjenis organosol bersifat lembek sehingga kurang kompatibel terhadap ketahanan / umur pakai.

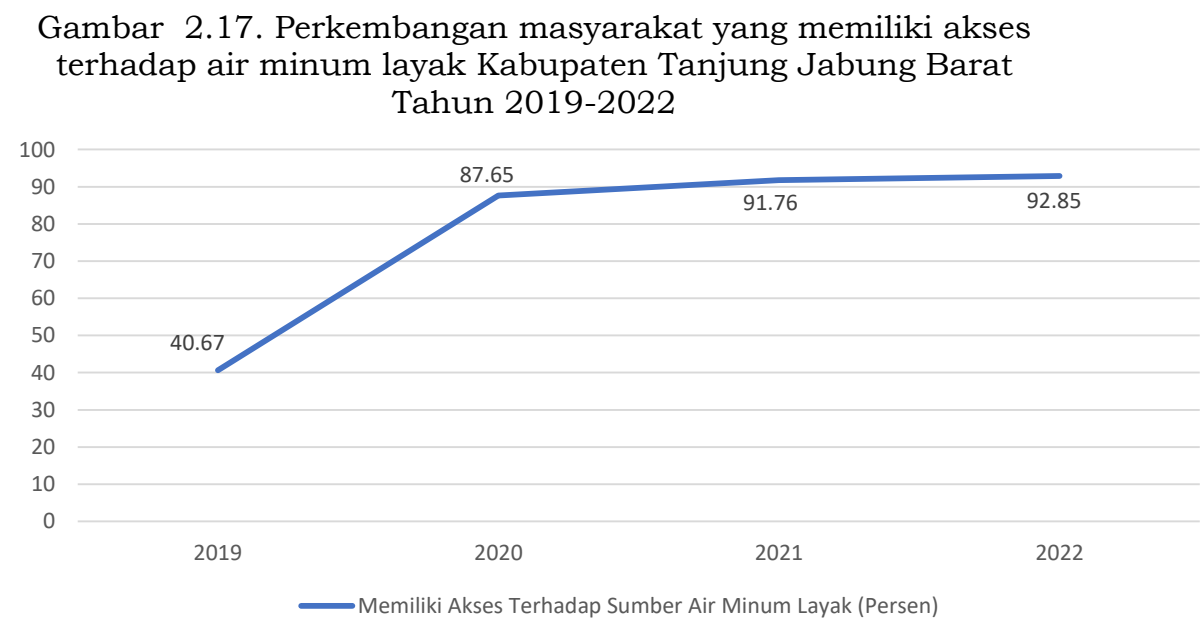
Mulai tahun 2018 perkerasan rigid/beton mulai diterapkan untuk peningkatan struktur jalan, penggunaan perkerasan rigid/beton dianggap lebih baik dari perkerasan aspal, bila dilihat secara jangka panjang *life-cycle-cost* lebih murah dibanding dengan perkerasan aspal aktivitas transportasi darat perekonomian maupun peningkatan kelas jalan.

Air Bersih

Penyediaan air bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilakukan melalui produksi PDAM, sumur bor, penampungan air hujan dan lainnya. Kondisi alam Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadikan air bersih tidak mudah didapati, bagi masyarakat yang kurang mampu biasanya mengandalkan air hujan yang turun untuk ditampung, bagi masyarakat menengah ke atas air bersih bisa diperoleh dengan menyambung akses pipa PDAM, atau juga bisa membuat sumur bor atau membeli air yang disalurkan oleh pemilik sumur bor.

Atas dasar amanat Undang – undang nomor 23 tahun 24 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan dasar merupakan urusan wajib dan berhak diterima oleh setiap warga negara. Standar pelayanan minimal (SPM) bidang urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan nomor 29/PRT/M/2018, terdapat dua jenis pelayanan yaitu pemenuhan kebutuhan air minum dan akses air limbah yang layak dan aman bagi masyarakat.

Berdasarkan data BPS jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap air minum layak setiap tahunnya mengalami peningkatan dari 40,67 persen ditahun 2019 meningkat menjadi 92,85 persen di tahun 2022, berikut di bawah ini grafik perkembangan masyarakat yang memiliki akses terhadap air minum layak dari tahun 2019 sampai dengan 2022.

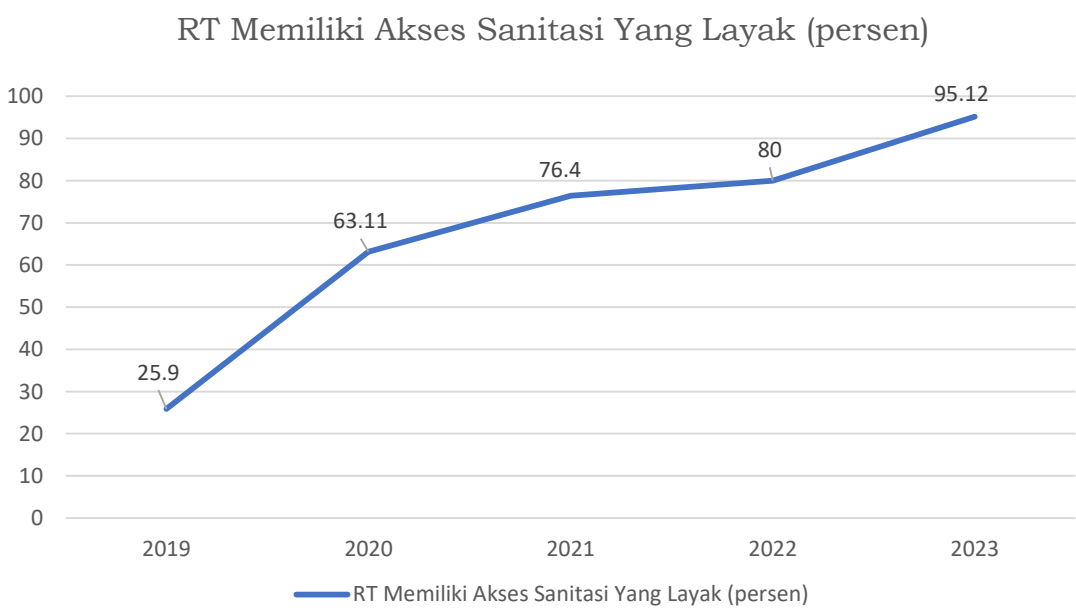


Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, 2023

Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) meliputi: infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik dan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik meliputi Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Merlung, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Tungkal Ulu. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik meliputi Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Merlung, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Tungkal Ulu

Melalui program pelayanan air limbah dengan septic tank dan wc cubluk yang terus dilakukan pemerintah daerah mampu meningkatkan akses air limbah yang layak bagi masyarakat setiap tahunnya.

Gambar 2.18. Perkembangan Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Yang Layak Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas PUPR Kab. Tanjung Jabung Barat, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kreteria dan Penetapan Status Irigasi, terdapat delapanbelas daerah dalam wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditetapkan menjadi daerah irigasi permukaan (DI) dan daerah irigasi rawa (DIR) yang menjadi wewenang

dan tanggung jawab kabupaten, dan Daerah Irigasi Sei. Suban yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan daerah, dan keberlangsungan perkebunan masyarakat perlu dukungan irigasi yang baik guna memasok kebutuhan air, menjaga persediaan air di musim kemarau, dan lainnya.

Tabel. 2.20.
Daerah Irigasi dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat

JENIS DAERAH IIRIGASI	NAMA DAERAH IIRIGASI	LUAS (Ha)
I. Daerah Irigasi (Teknis)	<u>Kewenangan Provinsi</u>	
	1. D.I. Sei.Suban	1.121
	<u>Kewenangan Kabupaten</u>	
	1. D.I. Sei. Bungin – Kec. Renah Mendaluh	125
	2. D.I. Sei. Melawai – Kec. Tungkal Ulu	150
II. Daerah Irigasi Rawa	<u>Kewenangan Pemerintah Pusat</u>	
	1. D.I.R Parit Pudin – Kec. Pengabuan	4.342
	2. D.I.R Pematang Lumut – Kec. Betara	3.000
		1.318
	<u>Kewenangan Provinsi</u>	1.250
	1. D.I.R Senyerang – Kec. Senyerang	1.510
	2. D.I.R. Teluk Ketapang – Kec. Senyerang	
	3. D.I.R. Teluk Nailau – Kec. Pengabuan	315
		315
		535
	<u>Kewenangan Kabupaten</u>	
	1. D.I.R. Bram Itam – Kec. Bram Itam	825
		241
	2. D.I.R. Betara – Kec. Betara	
	3. D.I.R. Kayu Aro Kanan – Kec. Senyerang	100
		808
	4. D.I.R. Kayu Aro Kiri – Kec. Senyerang	980
		142
	5. D.I.R. Kelagian Baru - Kec. Tebing Tinggi	736
		600
	6. D.I.R. Kempas Jaya – Kec. Senyerang	222
		500
	7. D.I.R. Lumahan – Kec. Tebing Tinggi	
		875
	8. D.I.R. Margo Rukun – Kec. Senyerang	
		450
		82

JENIS DAERAH IRIGASI	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS (Ha)
	9. D.I.R. Mekarjati – Kec. Pengabuan 10. D.I.R. Pasar Senen – Kec. Pengabuan 11. D.I.R. Rawa Asam 12. D.I.R. Srindit – Kec. Pengabuan 13. D.I.R. Sungai Gebar – Kec. Kuala Betara 14. D.I.R. Sungai Rambai – Kec. Senyerang 15. D.I.R. Sungai Raya – Kec. Pengabuan 16. D.I.R. Tebing Tinggi – Kec. Tebing Tinggi	

Sumber Data : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 14/PRT/M/2015

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai jumlah penduduk 326.530 jiwa yang tersebar di 13 wilayah Kecamatan, dengan rata – rata kepadatan penduduk sebesar 65,18 jiwa per km2. Kecamatan Tungkal Ilir merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, kemudian diikuti Kec. Tebing Tinggi dan Kec. Batang Asam. Tercatat kawasan permukiman perkotaan dengan luas 8.474 ha dan kawasan permukiman perdesaan dengan luas 7.806 ha.

Berdasarkan pada Lampiran I peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018-2038, tercatat jumlah rumah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 72.986 unit, dari 72.986 unit tersebut sebanyak 52.946 unit (72,54%) yang memenuhi syarat sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya, dan sebanyak 20.040 unit (27,46%) yang tidak memenuhi syarat sebagai tempat tinggal/Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.

Berdasarkan SK Bupati Nomor 438/Kep.Bup/Bappeda.2017 tentang Penetapan Lokasi Perkumuhan Dan Permukiman Kumuh, ditetapkan lokasi kawasan kumuh menurut kelurahan/kecamatan sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 2.21.

Luas Kawasan Kumuh Menurut Kelurahan/Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Kecamatan	Kelurahan	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Tingkat Kekumuhan	Legalitas Lahan	Prioritas Penanganan
1.	Tungkal Ilir	Tungkal Harapan	Pusat Kota Kuala Tungkal	122,9	Kumuh Berat	Legal	Prioritas 1
		Patunas					
		Sriwijaya					
		Tungkal IV Kota					
2.	Tungkal Ilir	Tungkal II	Pusat Kota Kuala Tungkal	77,3	Kumuh Berat	Legal	Prioritas 1
		Tungkal III					
		Kampung Nelayan		35,1	Kumuh Sedang		
		Sungai Nibung		9,85			
3.	Bram Itam	Bram Itam Kiri	Pusat Kota Bram Itam Kiri	10,05	Kumuh Sedang	Legal	Prioritas 1
	Luas Total Kawasan Kumuh			255,2			

Sumber Data : SK Bupati Tanjung Jabung Barat No. 438/Kep.Bup/BAPPEDA/2017 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kawasan kumuh (di perkotaan) sebagian besar berada dalam pusat Kota Kuala Tungkal (Ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat), seperti Kel. Tungkal Harapan, Kel. Patunas, Kel. Sriwijaya, dan Kel. Tungkal IV Kota, dengan luas kumuh 122,9 ha (48,16%) dengan tingkat kekumuhan “kumuh berat”.

Sampai dengan tahun 2023 luas kawasan kumuh yang ditargetkan penangananya dari 255,20 ha (ditetapkan) berkurang menjadi 9,79 ha. Beberapa upaya penanganan kawasan kumuh yang telah dilakukan seperti peningkatan/perbaikan jalan, pembangunan drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, rehabilitasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan reahabilitasi gedung sekolah/pembangunan RKB, serta peningkatan kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2022 telah disusun Dokumen Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) oleh Dinas Perkim Kab. Tanjung Jabung Barat, berdasarkan data RP2KPKPK melalui surat keputusan bupati

ditetapkan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kab. Tanjung Jabung Barat, dengan kawasan kumuh seluas 123,75 ha pada 6 (enam) kecamatan 8 (delapan) kelurahan/kawasan kumuh, sebagai berikut :

Tabel 2.22 Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kab. Tanjung Jabung Barat

No.	Kecamatan	Kawasan di kelurahan	Luas (ha)	Keterangan
1.	Tungkal Ilir	1. Sriwijaya 2. Tungkal II 3. Kpg. Nelayan	9,79 40,7 9,95	Ringan Ringan Ringan
2.	Merlung	4. Merlung	8,2	Ringan
3.	Tebing tinggi	5. Tebing Tinggi	3,4	Ringan
4.	Pengabuan	6. Teluk Nilau	12,6	Ringan
5.	Kuala betara	7. Betara Kiri	29,34	Sedang
6.	Betara	8. Mekar Jaya	9.77	Ringan
Jumlah			123,75	

Sumber Data : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 71/Kep.Bup/Perakim/2024 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kab.Tanjung Jabung Barat

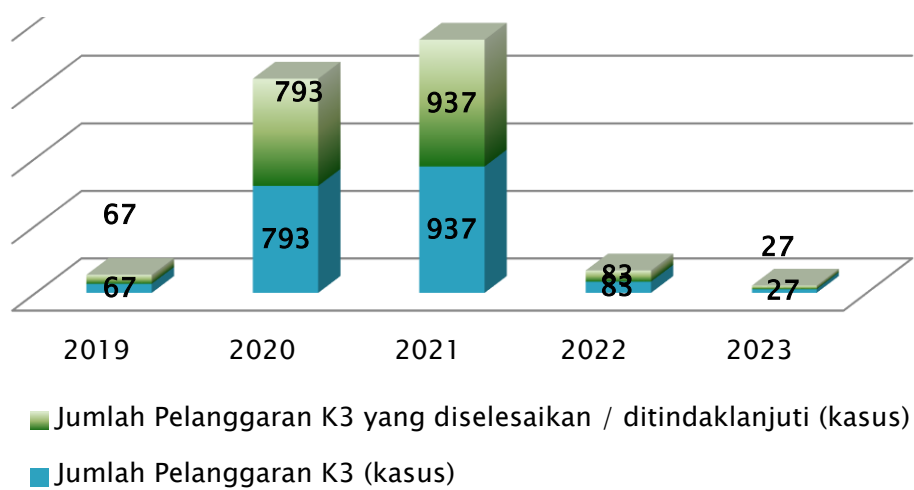
2.3.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan masyarakat

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014), ketentrman dan ketertiban umum merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menerbitkan peraturan daerah terkait pengaturan sebagai upaya menjaga ketentrman dan ketertiban diantaranya Perda No. 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, Perda No. 9 Tahun 2016 Tentang Pelarangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila, dan lainnya.

Terdapat Kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat yang meliputi Kodim 0419/Tanjab, Makro Brimob, polsek yang tersebar di tujuh kecamatan, kompleks markas rayon militer, Sub Denpom II/2-2 Kuala Tungkal, Kanminvetcad II/09

Kuala Tungkal, Klinik Pratama 02.10.13 Kodim 0419/Tanjab. lapangan tembak Kec. Betara Kab. Tanjab Barat, Posal Jambi, Komplek merkas Kepolisian Resor Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kecamatan Tungkal Ilir; dan Komplek Markas Kepolisian Sektor berada di beberapa kecamatan, Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Kuala Tungkal, Komplek Markas Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan.

Gambar 2.19.
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan keindahan) Kab. Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2019 - 2023



Sumber data : Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat , Tahun 2024

Jenis pelanggaran yang banyak ditemukan atau teridentifikasi pada tahun 2020 dan 2021 adalah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019. Seperti banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker dan toko-toko yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Pada tahun 2022 dan 2023 pelanggaran K3 sudah menurun karena beriringnya penurunan kasus covid. Selain pelanggaran Perda Covid 19 jenis pelanggaran yang banyak ditemukan atau teridentifikasi adalah pelanggaran terhadap Perda Trantibum seperti PKL, gelandangan, pengemis, prostitusi dan penggunaan zat adiktif.

Tabel. 2.23.
Cakupan Layanan Petugas Perlindungan Masyarakat / Pol PP
Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 s.d. 2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Petugas Pol PP	294	294	292	288	260
2	Jumlah Wilayah Kerja	13 kec.	13 kec.	13 kec.	13 kec.	13 kec.

Sumber Data : Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat, Tahun 2024

Wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan, 20 (dua puluh) Kelurahan, 144 (seratus empat belas) Desa, dengan jumlah personil sebanyak 294 orang pada tahun 2019 jumlah tersebut berkurang setiap tahunnya hingga turun menjadi 260 orang di tahun 2033. Dengan jumlah tersebut seluruh wilayah kerja masih dapat terlayani, Kota Kuala Tungkal sebagai ibu kota kabupaten mendapatkan porsi terbanyak keberadaan petugas Polisi Pamong Praja.

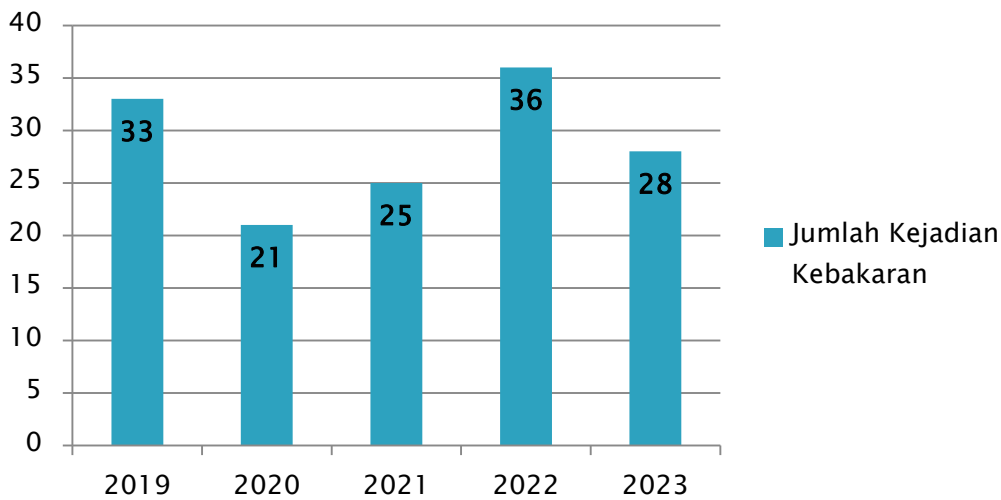
Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan juga merupakan bagian dari bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 11/KPTS/2000 Tanggal 1 Maret 2000 Tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan, bahwa waktu tanggap layanan pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ditentukan tidak melebihi 15 (lima belas) menit, dan luasan daerah layanan setiap WMK tidak boleh melebihi radius 7,5 km, diluar daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah yang tidak dapat terlayani/terjangkau.

Tabel. 2.24
 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Tingkat Waktu Tanggap
 (*Respon Time Rate*) Wilayah Manajemen Kebakaran
 Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 s.d. 2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan pelayanan wilayah bencana kebakaran kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK	36%	43%	40%	63%	74%

Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat, 2024

Gambar 2.20.
 Kejadian Kebakaran Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 s.d. 2023



Sumber data : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat, Tahun 2023

Dalam lima tahun terakhir kejadian kebakaran berfluktuasi, terakhir tahun 2023 jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 sebanyak 28 (dua puluh delapan) kejadian, dari 28 tersebut 15 kejadian kebakaran tersebut diantaranya ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam waktu tanggap 15 (lima belas), 6 kejadian kebakaran ditangani oleh relawan kebakaran yang dibentuk atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten

Tanjung Jabung Barat, dan sisanya 7 kejadian kebakaran berada diluar waktu tanggap WMK.

Sampai dengan tahun 2020 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih memiliki 2 Pos Unit yaitu Pos Unit Mako Kecamatan Tungkal Ilir dan Pos Unit Teluk nilau. Seiring berjalannya waktu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkembang dan memiliki tambahan 3 Pos yaitu Pos Kecamatan Betara, Pos Kecamatan Pelabuhan Dagang. Dan pos Kec. Tebing Tinggi hingga sampai dengan tahun 2024 berjumlah 5 Pos Unit.

Adapun hal – hal yang mempengaruhi dalam proses meningkat dan menurunnya kejadian kebakaran pada umumnya adalah sebagai berikut :

1. Pos – pos unit layanan Damkar dan Penyelamatan yang masih sedikit jumlah nya sampai dengan tahun 2022 adalah 5 pos untuk 5 Kecamatan sedangkan jumlah Kecamatan ada 13 Kecamatan , sehingga masih 8 Kecamatan yang belum tersedia.
2. Masih Kurangnya sumber air dalam penanggulangan bahaya kebakaran. Penyediaan Embung Air / Kolam yang masih sedikit sehingga akan menyulitkan pemadaman ketika membutuhkan supkay air.
3. Untuk Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) yaitu 15 menit sudah tiba di lokasi kebakaran, menghadapi beberapa kendala antara lain :
 - a. Jalan yang rusak atau kecil, portal jalan yang rendah, akses jalan bergelombang dan banyak tikungan sehingga mobil pemadam tidak bisa melaju dengan maksimal dan dapat menyebabkan lambatnya penanganan kebakaran.
 - b. Masih banyak warga yang belum memahami situasi kebakaran sehingga menghalangi lalu lintas mobil Pemadam Kebakaran
 - c. Informasi dari masyarakat yang terlambat disampaikan kepada petugas piket Damkar.
4. Masih minimnya anggaran belanja daerah untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur (SDA) Pemadam Kebakaran.

5. Belum terlaksananya pelatihan dan pembinaan terhadap Organisasi serta Masyarakat yang peduli api (Balakar) dikarenakan keterbatasan anggaran.
6. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyediakan peralatan pemadam, seperti APAR, terkhusus yang memiliki tempat usaha seperti Rumah Makan, hotel dan gedung layanan publik lainnya.

2.3.1.6. Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial diketahui bahwa terjadi penambahan jumlah PMKS, yang mana jika tahun sebelumnya jumlah PMKS hanya sebanyak 22 jenis, saat ini bertambah menjadi 26 jenis PMKS.Adapun empat jenis PMKS baru yang dicantumkan dalam Permensos RI tersebut meliputi kategori Anak dengan Kedisabilitasan, Pemulung, Kelompok Minoritas serta Korban Trafficking.

Tabel. 2.25. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	62	
2	Anak jalanan	37	Orang terlantar Th. 2023
3	Tuna susila	-	
4	Gelandangan dan pengemis	-	
5	Korban trafficking	3	
6	Bekas Korban Penyalahgunaan NAPZA	-	
7	Fakir miskin	50.671	KK
8	Wanita rawan sosial ekonomi	550	Orang
9	Penyandang disabilitas	722	orang
10	Korban bencana alam dan sosial	902	Jiwa
11	Anak berhadapan dengan hukum	51	Orang
12	Lanjut usia terlantar	937	orang

Dari data PMKS yang tergambar dalam tabel diatas, jumlah terbesar adalah kelompok Fakir miskin, kemudian diikuti oleh kelompok korban bencana alam dan sosial, kemudian Penyandang

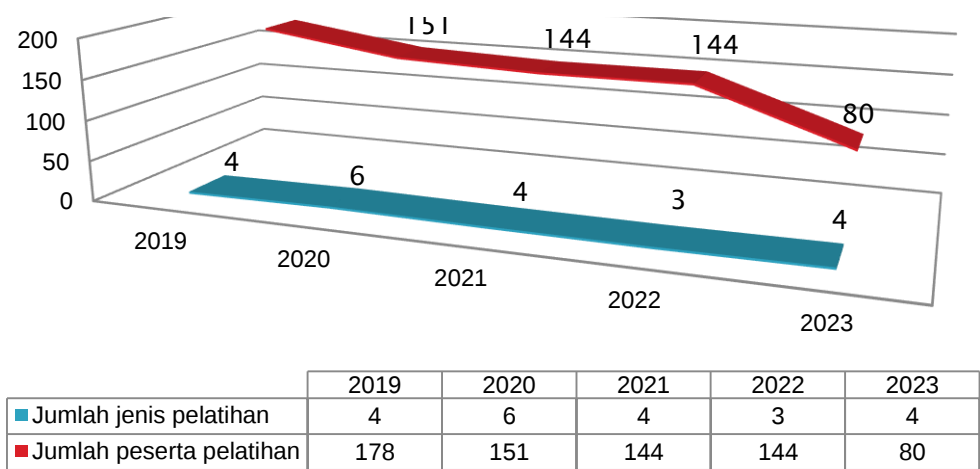
disabilitas, walaupun persentase penduduk miskin menurun dari tahun 2022 dari 10,00 persen menjadi 9,79 persen tetaplah kelompok fakir miskin menjadi kelompok PMKS terbesar. Adalah yang menjadi pemicu kemiskinan adalah Kondisi ekonomi nasional yang tidak stabil penyebab masih tingginya inflasi, selain itu penambahan jumlah penduduk serta berkurangnya sumber daya alam di daerah menyebabkan berkurangnya porsi lapangan kerja.

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Upaya - upaya pengurangan jumlah pengangguran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan melalui perangkat daerah yang menangani urusan tenaga kerja diantaranya melalui berbagai jenis pelatihan yaitu pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan kewirausahaan, seperti pelatihan menjahit, perbengkelan, batik, computer, las, tata boga, dan lainnya. Sumber dana pelatihan selain berasal dari APBD juga bersumber dari APBN, dengan penempatan tenaga kerja dari rahun 2019 sampai tahun 2023 berjumlah 2497 orang.

Gambar 2.21.
Jumlah Jenis Pelatihan dan Jumlah Peserta Pelatihan Tahun 2019 s.d. 2023 Kab. Tanjung Jabung Barat



Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat, 2024

Gambar 2.22.
Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Lokal Tahun 2019 s.d. 2023
Kab. Tanjung Jabung Barat



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat, 2024

Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal. PERDA ini kemudian ditindaklanjuti dengan MoU dan PKS (Perjanjian Kerjasama) antara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan 20 Perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan PERDA, MoU dan PKS ini, penempatan tenaga kerja lokal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus meningkat setiap tahunnya. dari tahun 2019 sebanyak 426 dan mengalami peningkatan sampai tahun 2023 sebanyak 1000 orang.

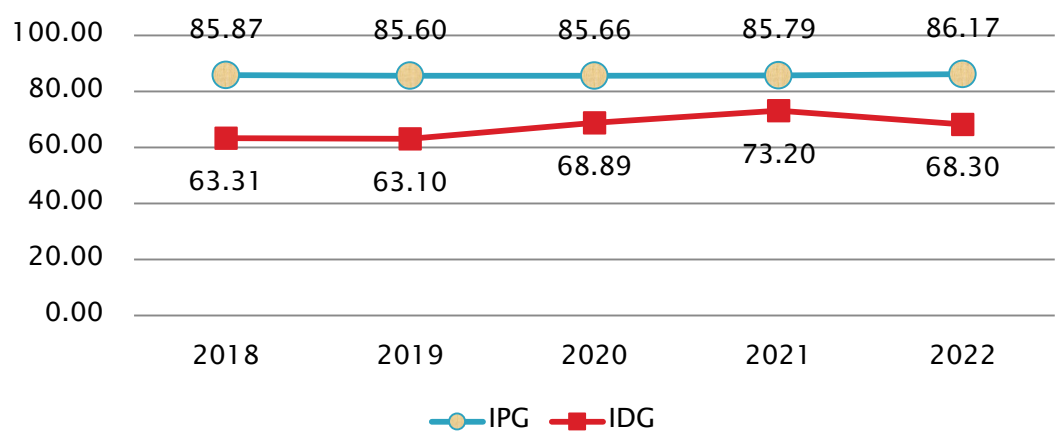
2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Salah satu indikator *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang ingin dicapai adalah kesetaraan gender, perlu upaya bagi negara Indonesia umumnya dan kabupaten/kota khususnya dalam pencapaiannya. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2022 pada angka 86,17, belum mencapai 100 artinya masih terdapat kesenjangan dalam pembangunan manusia laki – laki dan perempuan, dimana peran kaum laki – laki dalam aktivitas publik seperti bersekolah dan bekerja lebih dominan daripada kaum perempuan.

Untuk melihat sejauh mana peranan aktif perempuan dalam kehidupan baik dibidang ekonomi maupun politik dapat dilihat dari capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG kab. Tanjung Jabung Barat berfluktuasi dalam kurun waktu 2018-2022, dari 68,31 di tahun 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi

63,10, namun dari tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan dari 68,89 pada tahun 2020 menjadi 73,46 di tahun 2022, menunjukkan ada peningkatan keterlibatan perempuan di lembaga legislatif, sebagai pimpinan / pejabat dalam struktur organisasi, dan meningkatnya penghasilan perempuan.

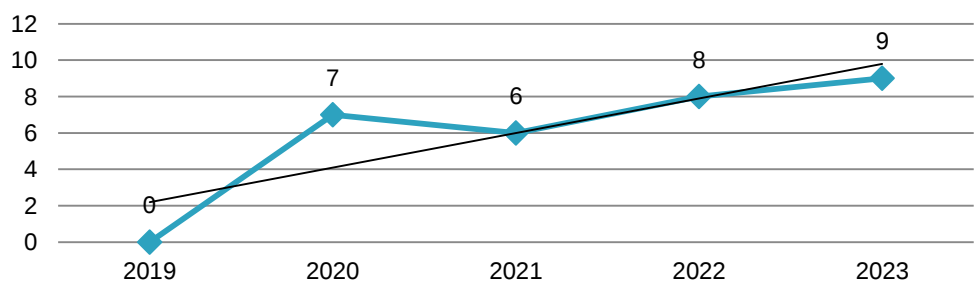
Gambar 2.23.
Perkembangan Indeks Pembangunan gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 s.d. 2022



Sumber : Dinas P3AP2KB Kab. Tanjung Jabung Barat, 2023 (Simfoni)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kab. Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun terakhir secara tren menunjukkan peningkatan dari 7 kasus di tahun 2020 menjadi 9 kasus di tahun 2023.

Gambar 2.24.
Perkembangan Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 s.d. 2023



Sumber : Dinas P3AP2KB Kab. Tanjung Jabung Barat, 2024

Jumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak berfluktuasi dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023, dengan rata – rata berjumlah 23,8 kasus pertahunnya. Untuk jumlah

perempuan korban kekerasan berfluktuasi dari tahun 2019 sampai dengan 2023, namu secara tren mengalami penurunan dari 28 kasus menjadi 9 kasus. Dari semua kasus yang terjadi telah ditindaklanjuti /diselesaikan baik secara hukum maupun kekeluargaan. Terbentuknya unit – unit layanan pengaduan tindak kekerasan seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres, unit layanan di Puskesmas dan RSUD, unit Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang berada disetiap kecamatan dan kabupaten sangat membantu dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Perhatian Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat terhadap anak juga melalui penerbitan Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2018 tentang Kabupaten layak Anak (KLA), dimana pembangunan kabupaten Tanjung Jabung Barat mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

Tabel.2.26.

Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (TKPA) dan tindaklanjutnya Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 s.d. 2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kasus TKPA	28	30	29	23	39
2	Jumlah perempuan korban kekerasan	20	30	29	23	37
3	Rasio Kekerasan terhadap perempuan	12	18	18	14	23

Sumber Data: Dinas P3AP2KB Kab. Tanjung Jabung Barat, 2024

2.3.2.3. Ketahanan pangan

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas konsumsi pangan adalah melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH Konsumsi didefinisikan sebagai proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan. Pola konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100.

Skor PPH Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu lima tahun dari 2015 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan, yaitu dari 81,20 menjadi 90,00 namun masih dibawah angka ideal 100, kemudian mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga 2023. hal ini menunjukkan konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam dimana masih tingginya konsumsi padi – padian, masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur, buah, kacang – kacangan, dan umbi – umbian.

Tabel 2.27.
 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Komsumsi Masyarakat
 Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 s.d. 2023

2019	2020	2021	2022	2023
88,80	94,50	90,00	89,50	86,30

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat, 2024

Kelompok padi – padian yaitu beras dan jagung, merupakan kelompok tertinggi penyumbang energi selain kelompok minyak dan lemak. Dari sebelas komoditi pangan utama tersebut dibawah ini yang dihasilkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat empat komoditi yang sudah mampu mencukupi kebutuhan penduduk, yaitu beras, jagung, daging unggas, dan ikan.

Tabel.2.28
 Ketersediaan Pangan Utama Kab. Tanjung Jabung Barat
 Tahun 2018 s.d. 2023

No	Uraian	Ketersediaan Pertahun (ton)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Pangan Nabati						
	1. Beras	30.501	27.152	26.141	23.364	25.575	10.156
	2. Jagung	1.710	2.504	2.823	1.840	742	1.472
	3. Kedelai	1.920	2.006	1.901	1.974	1.879	2.053
	4. Kacang Tanah	6	3	4	18	31	139
	5. Ubi Kayu	3.138	2.977	3.450	5.197	5.065	5.058
	6. Ubi Jalar	973	1.080	1.301	1.367	1.260	1.663
	7. Sayuran	3.612	3.673	3.637	2.574	3.121	2.268
	8. Buah-buahan	37.277	37.911	37.911	50.439	49.348	35.191
II	Pangan Hewani						
	1. Daging Sapi/Kerbau	253	257	257	244	141	183
	2. Daging Ayam	3.914	3.908	4.381	4.166	5.113	852
	3. Telur	791	805	818	778	849	460
	4. Susu	818	-	831	845	845	845
	5. Ikan	23.979	24.387	23.125	21.987	20.298	9.879

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat, 2024

Adapun gambaran ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi dapat ditunjukkan dari hasil Neraca Bahan Makanan (NBM), terakhir di tahun 2023 ketersediaan bahan pangan energi Kab. Tanjung Jabung Barat sebesar 2.994 kkal/kapita/hari sudah melampaui angka anjuran atau angka ideal nasional yaitu 2.400 kkal/kapita/hari. Namun belum berimbang dimana ketersediaan energi tersebut lebih didominasi oleh pangan nabati sebesar 3.258 kkal/kapita/hari (95%), dan pangan hewani hanya sebesar 183 kkal/kapita/hari (5%).

Berdasarkan data terakhir tahun 2023, ketersediaan protein Kab. Tanjung Jabung Barat sebesar 39,50 gram/kapita/hari, angka ini belum memenuhi angka kecukupan protein yang di anjurkan secara nasional yaitu 63 gram/kapita/hari. Dimana ketersediaan protein lebih didominasi bersumber dari protein nabati sebesar 75,87%, dan bersumber dari pangan hewani sebesar 24,13%.

Tabel.2.29.
Ketersediaan Energi dan Protein
Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 s.d. 2023

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Energi (kkal)	3.724	3.442	3.588	4.143	4.016	2.994
2	Protein (Gram) :						
	- Nabati	45,36	44,05	42,98	42,65	43,29	29,97
	- Hewani	23,89	25,60	23,02	115,41	22,96	9,53
	Total Protein (gram)	69,25	69,65	66,00	158,07	66,25	39,50

Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat

2.3.2.4. Lingkungan Hidup

Sesuai Undang – undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah disetiap tingkatan wajib menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dalam UU tersebut pada pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya melindungi wilayah negara kesatuan republik indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem masih banyak lagi tujuan lainnya.

Tabel.2.30. Ketersediaan Dokumen RPPLH
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 s.d. 2023

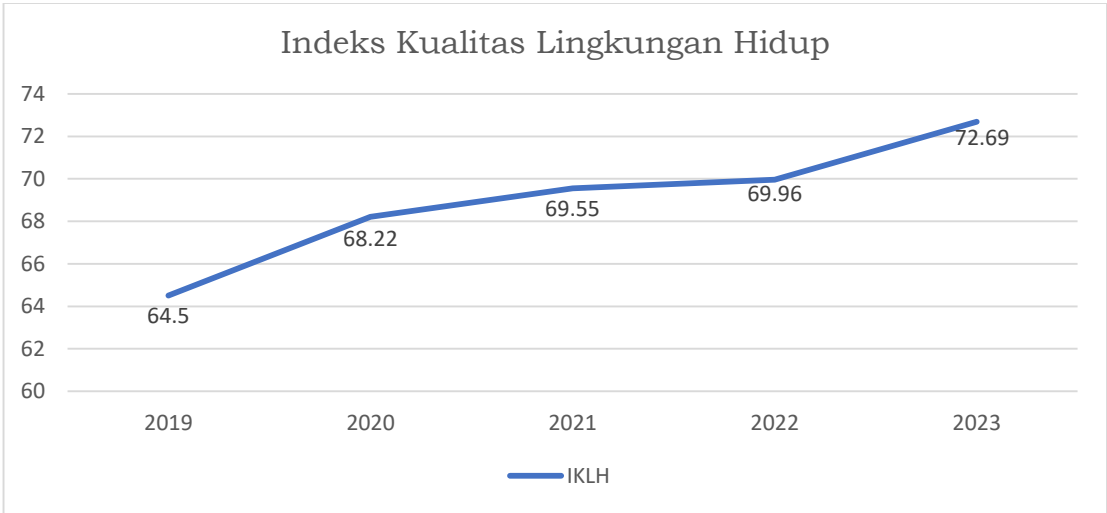
Ketersediaan Dokumen RPPLH	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Mulai tahun 2020 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) selain mencakup kualitas air (IKA), udara (IKU), tutupan lahan (IKTL) juga menghitung kualitas air laut (IKAL). Dalam wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat pada tahun 2019 s.d. 2023, menunjukkan kualitas air berada dalam klasifikasi sedang dan kualitas udara dalam klasifikasi baik/sangat baik. Pada tahun terakhir 2023 terdapat 38 perusahaan PMA/PMDN dengan skala usaha sedang-besar yang beroperasi dalam wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat, cara pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang selenggarakan perusahaan akan memberikan pengaruh terhadap kualitas air, udara, tutupan lahan, dan air laut.

Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 IKLH Kab. Tanjung Jabung Barat terus mengalami peningkatan dari 64,50 di tahun 2019 menjadi 72,69, hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas air, udara, dan tutupan lahan.

Gambar 2.25.
Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan
Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 s.d. 2023



Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat 2024

Sampah yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat adalah kategori sampah rumah tangga yang dapat terangkut untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Jumlah sampah yang tertangani terus meningkat dari sejumlah 14.887 ton di tahun 2019 meningkat menjadi 15.607 ton di tahun 2023. Meningkatnya jumlah sampah yang ditangani seiring dengan bertambahnya ketersediaan sarana penanganan sampah seperti kendaraan pengangkut sampah dan bak – bak sampah.

Tempat pembuangan sampah (TPS) yang ada belum dikelola dengan pola *Reduce, Reuse, Recycle* (3R), Berdasarkan Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dimana penyelenggaraan TPS menggunakan pola 3R mutlak harus dilakukan, pengolahan sampah pada TPS 3R adalah untuk mengurangi kuantitas dan/atau memperbaiki karakteristik sampah, yang akan diolah secara lebih lanjut di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Tabel.2.31.
Jumlah sampah yang ditangani dan terkelola 3R
Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 s.d. 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sampah yang ditangani	14.887 ton	16.425 ton	11.428 ton	14.499 ton	15.607 ton
2	Jumlah sampah yang terkelola 3R	-	-	-	-	-

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat 2024

Tingkat kesadaran baik dunia usaha maupun masyarakat terhadap pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, salah satu indikatornya ditunjukkan dengan jumlah pengaduan terkait lingkungan hidup yang masuk. Dari tahun 2019 sampai dengan 2023 jumlah pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti berfluktuasi dengan tren mengalami peningkatan.

Tabel 2.32.
 Jumlah Pengaduan Yang Masuk dan Yang Ditindaklanjuti
 Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 s.d. 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pengaduan Yang Masuk	3	1	2	2	4
2	Jumlah Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	3	1	2	2	4

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat 2024

2.3.2.5. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Data kependudukan yang digunakan adalah data teregistrasi yang diolah dan dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dikonsoldasikan dan dibersihkan menjadi Data Konsoldasi Bersih (DKB) di Server Data Center Pusat oleh Kementerian Dalam Negeri, dan data kependudukan dari lintas sektor terkait.

Untuk rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK) terakhir pada tahun 2023 adalah 99,86 persen artinya belum seluruh Kepala Keluarga yang ada telah memiliki Kartu Keluarga, hanya 0,14% yang belum memiliki KK, hal ini menggambarkan kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya mendaftarkan diri sebagai penduduk dan memiliki dokumen kependudukan.

Tabel.2.33. Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dalam
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah yang memiliki KK	Jumlah yang belum memiliki KK	Rasio Kepemilikan KK (%)
1. Tungkal Ulu	4.653	4.647	6	99,87
2. Merlung	5.322	5.314	8	99,85
3. Batang Asam	10.602	10.578	24	99,77
4. Tebing Tinggi	10.835	10.817	18	99,83
5. Renah Mendaluh	5,101	5.094	7	99,86
6. Muara Papalik	3.362	3.357	5	99,85
7. Pengabuan	8.453	8.447	6	99,93

Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah yang memiliki KK	Jumlah yang belum memiliki KK	Rasio Kepemilikan KK (%)
8. Senyerang	8.237	8.232	5	99,94
9. Tungkal Ilir	22.916	22.877	39	99,83
10. Bram Itam	6.113	6.107	6	99,90
11. Seberang Kota	3.052	3.049	3	99,90
12. Betara	9.652	9.636	16	99,83
13. Kuala Betara	4.577	4.571	6	99,87
Jumlah	102.875	102.726	149	99,86

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2024

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk disuatu wilayah administrasi Indonesia. Berdasarkan Undang – undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, KTP el wajib dimiliki oleh semua penduduk yang berusia diatas 17 tahun keatas atau mereka yang berumur dibawah 17 tahun tetapi sudah pernah menikah, dimana KTP el berlaku seumur hidup. Pada tahun 2023 rasio kepemilikan KTP dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 97,55% artinya masih ada sebesar 2,45% penduduk wajib KTP belum memiliki KTP.

Tabel.2.34. Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023

Kecamatan	Wajib KTP	Sudah memiliki KTP	Belum memiliki KTP	Rasio Kepemilikan KTP (%)
1. Tungkal Ulu	10.774	10.488	286	97,35
2. Merlung	11.771	11.484	287	97,56
3. Batang Asam	24.223	23,422	801	96,69
4. Tebing Tinggi	25.817	24.989	828	96,79
5. Renah Mendaluh	11.497	11.313	184	98,40
6. Muara Papalik	7.651	7.455	196	97,44
7. Pengabuan	20.119	19.559	560	100,38
8. Senyerang	19.140	18.637	503	97,37
9. Tungkal Ilir	55.190	53.923	1267	97,70
10. Bram Itam	14.307	13.987	320	97,76
11. Seberang Kota	7.015	6.876	139	98,02
12. Betara	22.208	21.853	355	98,40
13. Kuala Betara	10.426	10.275	151	98,55
Jumlah	240.138	234.261	5.877	97,55

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

2.3.2.6. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih memfokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pemberdayaan masyarakat ini mendukung upaya-upaya penurunan angka kemiskinan. Selain fokus pada bidang ekonomi pemberdayaan masyarakat juga menyentuh bidang sosial budaya, yang difokuskan pada penguatan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai sosial budaya, penguatan kelembagaan pemerintahan desa, dan penguatan kelembagaan organisasi kemasyarakatan masyarakat desa, serta peningkatan taraf pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta lainnya.

Salah satu upaya pemerintah daerah bersama masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan peran keluarga dan perempuan dalam pembangunan yaitu melalui program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).

Tabel 2.35. Jumlah Tim Penggerak PKK dari Tingkat Kabupaten sampai Tingkat Kelompok Dasa Wisma, Tahun 2019 – 2023

No.	Tingkatan PKK	Jumlah kelompok				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	TP PKK Kabupaten	1	1	1	1	1
2.	TP PKK Kecamatan	13	13	13	13	13
3.	TP PKK Kelurahan / Desa	134	134	134	134	134
4.	Kelompok PKK Dusun / Lingkungan	309	309	327	368	377
5.	Kelompok PKK RT	1126	1126	1136	1136	1136
6.	Kelompok Dasawisma	2674	2674	3014	3134	3424

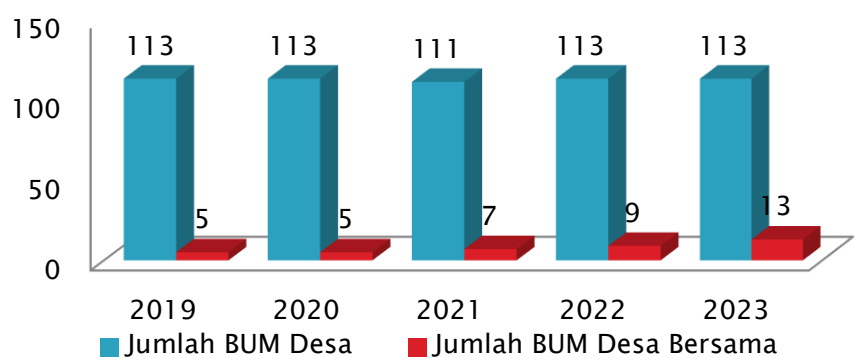
Sumber Data: Dinas Dinas Pembaerdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, 2024

Ada 134 TP PKK tingkat kelurahan/desa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, keseluruhannya aktif dalam mengerjakan

pemberdayaan masyarakat. Kegiatan – kegiatan yang diselenggarakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat berpedoman pada 10 program pokok PKK seperti kegiatan penyuluhan peraturan perundang – undangan, pengadaan lomba – lomba terkait kegiatan 10 program pokok PKK, pembinaan, pelatihan peningkatan keterampilan, dan kegiatan memperingati hari PKK dan BBGRM.

Pengembangan potensi dan sumber daya perdesaan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan seperti pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa), Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesa Bersama), Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan / Teknologi Tepat Guna (Posyantekdes / Posyan TTG). Posyantekdes/Posyan TTG ini dikembangkan berbagai teknologi ramah lingkungan yang ditujukan untuk mengembangkan potensi an sumber daya yang ada di sekitar masyarakat perdesaan tersebut.

Gambar 2.26. Jumlah BUM Desa dan BUM Desa Bersama dalam Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 s.d. 2023



Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanjung Jabung Barat

Dalam lima tahun terakhir jumlah BUM Desa tetap sama sebanyak 113, sedangkan jumlah BUM Desa Bersama mengalami peningkatan setiap tahunnya dari berjumlah 5 BUM Desa Bersama di tahun 2019 meningkat menjadi 13 BUM Desa Bersama pada than 2023.

2.3.3.Tata Kelola Pemerintahan

2.3.3.1. Inovasi Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa “pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah” dan “pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi”

Pelaksanaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik praktik inovasi yang baik secara kontinu perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya. Untuk itu salah satunya adalah melalui penilaian inovasi daerah melalui supervisi secara periodik dan berkelanjutan, sehingga didapatkan gambaran bagaimana praktik-praktik penyelenggaraan inovasi diselenggarakan oleh pemerintah daerah berikut dampaknya.

Tabel 2.36 Tabel Indeks Inovasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 - 2023

Tahun	Nilai	Kategori	Urutan	Keterangan
2020	1.204*	Sangat Inovatif	121 dari 415 kabupaten	Sistem penilaian metode lama
2021	52,29	Inovatif	81 dari 415 kabupaten	
2022	52,58	Inovatif	133 dari 415 kabupaten	
2023	48,80	Inovatif	138 dari 415 kabupaten	

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023)

Indeks inovasi Kab. Tanjung Jabung Barat dalam empat tahun terakhir masih dalam kategori inovatif, namun secara nilai

mengalami penurunan , dari 52,29 di tahun 2021 menurun menjadi 48,80 di tahun 2023., begitu juga dengan urutan inovasi menurut kabupaten mengalami penurunan, dari urutan 81 dari 415 kabupaten se-Indonesia turun menjadi urutan 138 di tahun 2023. Pemerintah daerah perlu menggiatkan praktik – praktik inovasi terutama inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pelayanan publik.

2.3.3.2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.

Dalam rangka mendukung pencapaian birokrasi yang berkualitas dimana tata kelola pemerintahan semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik semakin mudah, cepat, dan terjangkau, dan untuk optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang mebidangi urusan komunikasi dan informatika menyusun peraturan bupati tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 – 2029.

Berdasarkan hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia, dua tahun terakhir indeks SPBE Kab. Tanjung Jabung Barat mengalami peningkatan dari nilai 1,10 (predikat kurang) meningkat menjadi 1,63 (predikat kurang). Pemerintah daerah perlu meningkatkan layanan publik sektoral berbasis elektronik terkait layanan publik. Sektoral.

2.3.3.3. Indeks Pelayanan Publik

Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik mematuhi Standar pelayanan . standar pelayanan tersebut merupakan pedoman penyelenggaraan layanan dan menjadi tolak ukur penilaian kualitas pelayanan yang diberikan. Terdapat beberapa perangkat daerah Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya perangkat daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, penanaman modal, sosial, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, ketentraman dan ketertiban umum serta kewilayahan (kecamatan).

Dalam dua tahun terakhir tingkat kepatuhan pelayanan publik yang dinilai oleh Ombudsman terhadap perangkat – perangkat daerah tersebut diatas. Pada tahun 2022 nilai tingkat kepatuhan pelayanan publik Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat sebesar 79,80 kategori B dengan opini kualitas tinggi, meningkat menjadi 86,99 kategori B dengan opini kualitas tinggi. Penilaian tersebut meliputi pengukuran kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, standar pelayanan serta pengelolaan pengaduan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari :

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran perkapita sebagai satu salah indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Lebih jauh penggunaan indikator ini dapat memberi petunjuk sampai sejauh mana dampak luas pemanfaatan anggaran pembangunan dan belanja daerah (APBD) . Ada 2 (dua) jenis pengeluaran per kapita yaitu pengeluaran per Kapita penduduk untuk makanan dan pengeluaran per kapita penduduk untuk bukan makanan.

Untuk pengeluaran per kapita penduduk Kab. Tanjung Jabung Barat dalam lima terakhir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, secara tren mengalami kenaikan dari sebesar Rp.9.192.000,- di tahun 2019 menjadi Rp. 10.229.000,- di tahun 2023, pada tahun 2020 pengeluaran per kapita mengalami penurunan menjadi Rp. 9.026.000,- disebabkan oleh pandemi covid – 19 yang sangat berdampak pada kondisi perekonomian baik nasional maupun global.

Gambar 2.27
Pendapatan Per Kapita Penduduk Kab. Tanjung Jabung Barat
Tahun 2019 s.d. 2023



Sumber Data : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat

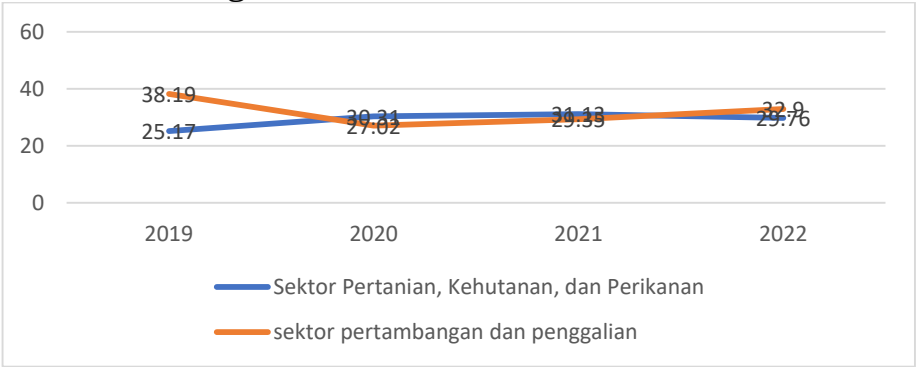
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021 dan Maret 2022/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey, dalam dua terakhir 2022 dan 2023, pengeluaran per kapita penduduk Kab. Tanjung Jabung Barat lebih besar untuk makanan/ pangan disbanding bukan makanan/pangan, dengan perbandingan sebesar 56,80 persen dan 52,95 persen untuk makanan di tahun 2022 dan 2023 dan 43,20 persen dan 47,05 persen untuk non makanan/pangan di tahun 2022 dan 2023, kondisi ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

b. Sektor Unggulan Daerah

Dalam lima tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi kontributor utama dalam PDRB Kab. Tanjung Jabung Barat, dengan rata – rata per tahunnya sebesar 31 persen. Nilai sub sektor

perkebunan tahunan menjadi penyumbang terbanyak untuk sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selebihnya di sumbang oleh sub sektor perikanan dan tanaman pangan dan hortikultura. Sementara sektor pertambangan dan penggalian merupakan kontributor kedua dalam PRDB Kab. Tanjung Jabung Barat dengan rata – rata per tahunnya sebesar 28 persen, nilai sub sektor Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi menjadi penyumbang terbanyak untuk sektor pertambangan dan penggalian. Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat memiliki cadangan sumber daya mineral dan energi yang banyak seperti minyak dan gas bumi serta batu bara. Telah terdapat beberapa blok eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi yang dikelola oleh perusahaan migas, dan penggalian batu bara di beberapa area.

Gambar 2.28 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Sektor pertambangan dan penggalian Kab. Tanjung Jabung Barat Dari Tahun 2019 s.d. 2023.



Jenis perkebunan tahunan yang dominan di wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat adalah perkebunan sawit, pinang, dan kelapa dalam. Sebagian besar wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat memiliki kontur tanah berjenis rawa dan gambut dimana Tanaman pinang (*Areca catechu*) dan kelapa dalam (*Cocos nucifera*) dapat tumbuh subur.

Tabel 2.37 Tabel Perkembangan Luas Lahan Perkebunan Pinang dan Kelapa Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 – 2023

No	Jenis Perkebunan	Luas Lahan (Ha)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pinang	11.353	11481	9.823	13.645	13.750
2	Kelapa Dalam	55.349	55.394	55.384	51.539	51.479
3	Kelapa Sawit	62.904	73.155	73.872		88.159

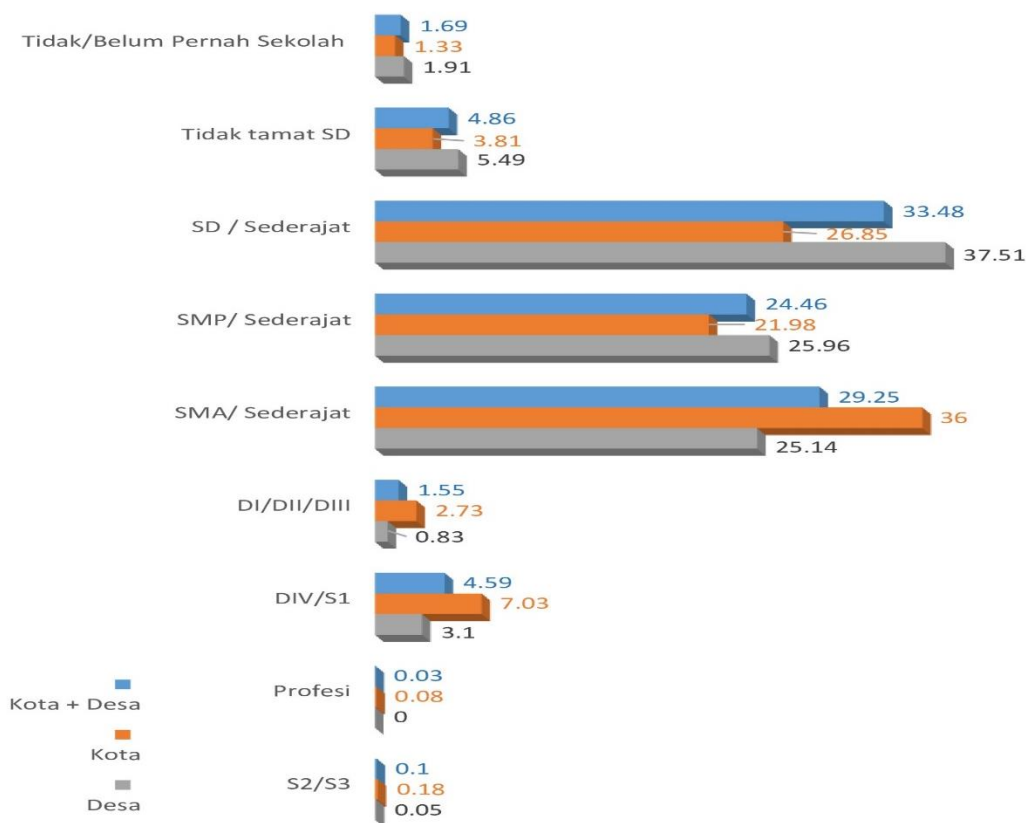
Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Tanjung Jabung Barat, Tahun 2024

Dilihat dari tabel diatas luas lahan perkebunan pinang dan kelapa sawit mengalami peningkatan setiap tahunnya, luas lahan pinang dari 11.353 Ha di tahun 2019 menjadi 13.750 Ha di tahun 2023, luas lahan kelapa sawit dari 62.904 Ha di tahun 2019 menjadi 88.159 Ha di tahun 2023, peningkatan luas tanam tersebut menunjukkan ketertarikan masyarakat untuk berusaha dibidang perkebunan pinang dan kelapa sawit yang dianggap mempunyai prospek yang baik. Sama seperti halnya perkebunan pinang dan kelapa sawit, luas lahan perkebunan kelapa dalam cukup stabil tahun 2019 sampai dengan 2023 berada di kisaran diatas 55.000 ha.

c. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) oleh BPS dengan pemutakhiran dilakukan pada bulan Mei 2022, mayoritas penduduk Kab. Tanjung Jabung Barat yang berumur 15 tahun ke atas berpendidikan Sekolah Dasar atau Sederajat sebesar 33,84 persen, dan sekolah menengah pertama (SMP)/sederajat sebesar 24,46, dan sekolah menengah atas (SMA) / sederajat sebesar 29,25 persen.

Gambar 2.29 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Yang Di Tamatkan Di Kab. Tanjung Jabung Barat



Sumber : Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 Kab. Tanjung Jabung Barat, BPS

Tingginya jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas berpendidikan sekolah dasar sangat berkaitan dengan tingkat kemiskinan Kab. Tanjung Jabung Barat yang mencapai 10,56 persen di tahun 2019, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab anak putus atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, kondisi ekonomi yang sulit membuat orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anak. Selain faktor ekonomi, faktor akses pendidikan terutama di perdesaan danau terpencil, akses ke sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas sangat terbatas dimana jarak sekolah yang jauh dan infrastruktur transportasi yang kurang memadai.

d. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Jaringan Jalan

Berdasarkan surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 600/707/DPU/2016 tentang Penetapan Ruas Jalan Kabupaten Dalam Jaringan Jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ditetapkan panjang jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 1.265,204 KM. Terakhir tahun 2023 panjang jalan kolektor primer empat dan jalan lokal menurut jenis permukaan dan kondisi jalan yang terdiri dari jalan aspal sepanjang 416,769 km (32,95%), jalan kerikil / koral sepanjang 590,976 km (46,72%), dan jalan tanah sepanjang 105,45 km (8,30%), dengan kondisi jalan baik sepanjang 297,491 km (23,52%), jalan dengan kondisi sedang sepanjang 282,392 km (22,32%), jalan dengan kondisi rusak sepanjang 290,754 km (22,98%), dan jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 394,587 (31,19%).

Energi

Kebutuhan listrik untuk Kota Kuala Tungkal dan kecamatan – kecamatan dalam Kab. Tanjung Jabung Barat dipasok dari jaringan listrik Sumatera Barat dan Sumatera selatan, dengan beroperasinya gardu induk Desa Sungai Saren membantu pasokan listrik menjadi aman, stabil, dan efisien dari pembangkit listrik ke konsumen akhir.

Sebagian besar masyarakat wilayah ulu yang terdiri dari enam kecamatan (Kec. Tebing Tinggi, Kec. Tungkal Ulu, Kec. Batang Asam, Kec. Merlung, Kec. Muara Papalik, dan Kec. Renah Mendaluh)

mendapat pasokan listrik dari Perusahaan Listrik Tenaga Mesin dan Gas (PLTMG) dengan kapasitas 8 Megawatt yang ada di Desa Sungai Keruh Kec. Tebing Tinggi.

Hub Logistik

Pelabuhan Ro-Ro adalah salah satu dermaga penyeberangan orang dan barang dengan menggunakan kapal Ro-Ro, ditahun 2023 terdapat tiga kapal Ro-Ro yang beroperasi melayani angkutan orang dan barang/kendaraan dari Kuala Tungkal menuju Dabo Singkep dan Batam.

Pelabuhan ro-ro dimanfaatkan sebagai jalur logistik hasil pertanian dan barang dagangan lainnya dari luar daerah seperti Kabupaten Kerinci, Padang, bahkan Medan untuk dipasarkan ke Dabo Singkep, Batam dan sekitarnya. Sejak mulai beroperasi di tahun 2017 sampai tahun 2023, pelabuhan ro-ro mengalami perkembangan baik dari frekwensi maupun jumlah penumpang dan barang, terakhir di tahun 2023 jumlah penumpang pulang/pergi mencapai 10.635 orang dan jumlah kendaraan mencapai 7.158 unit.

Kawasan Industri

Kawasan peruntukan industri besar terdapat di Kecamatan Senyerang dan Kecamatan Tebing Tinggi dengan luas 1.347 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh) hektar. Pembangunan kawasan peruntukan industri besar diprioritaskan berada di sekitar simpul TOL Sumatera di Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Muara Papalik dan Kecamatan Tebing Tinggi.

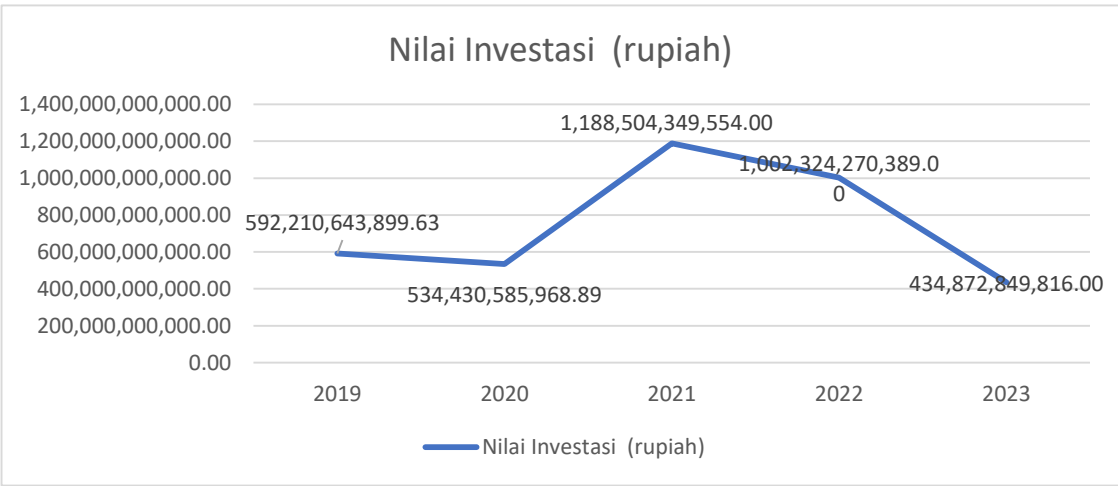
e. Daya Saing Iklim Investasi

Investasi memiliki peran kunci dalam memicu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di tingkat daerah. Pemerintah daerah dituntut harus mampu meningkatkan investasi di daerahnya agar dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menarik para calon investor, faktor kepastian hukum adalah faktor atau patokan utama yang tidak kalah pentingnya di samping faktor

kestabilan politik dan ekonomi maupun keamanan, faktor kestabilan politik merupakan aspek yang sangat diperhatikan oleh investor.

Dalam rangka meningkatkan daya saing iklim investasi Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Kebijakan dalam peraturan daerah tersebut bertujuan untuk menarik minat investor untuk berinvestasi di Kab. Tanjung Jabung Barat.

Gambar 2.30 Perkembangan Nilai Investasi Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 – 2023



Sumber : DPMPTSP Kab. Tanjung Jabung Barat, 2014

Tabel 2.38
Formulir E. 56
Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD Kab. Tanjung Jabung Barat
Visi : TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, BERDAYA SAING, ADIL DAN SEJAHTERA
Periode Pelaksana: 2016 – 2021

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten/Kota				Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten/Kota				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabuapten/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten/Kota (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten/Kota		Usulan Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)				(7)				(8)	(9)	(10)
				2005-2010	2011-2016	2016-2021	2021-2025	2005-2010	2011-2016	2016-2021	2021- 2025	2005-2010	2011-2016	2016-2021	2021-2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berahlak mulia	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,30	61,49	65,91	67,83	75,30	61,49	65,91	68,17	71,44	100	100	100	94,87	Ada tiga faktor yang mempengaruhi capaian IPM yaitu dimensi kesehatan yang diukur dengan indikator usia harapan hidup (UHH), dimensi pendidikan yang diukur dengan indikator Rata-rata lama sekolah dan Harapan lama sekolah, dimensi ekonomi yang diukur dengan indikator pengeluaran per kapita. ketiga faktor tersebut beserta variabelnya masih pada capaian yang rendah dan peningkatan yang tidak signifikan, pada tahun 2022 capaian UHH sebesar 68,43,	Terdapatnya kebijakan mandatory spending untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional . Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan	Mengoptimalkan program / kegiatan pengelolaan pendidikan dasar dan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, disamping untuk pengelolaan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas yang menjadi kewenangan Pemkab. Prov. Jambi dilakukan melalui koordinasi. kemudian memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa atau bantuan penyelesaian tugas akhir untuk mahasiswa perguruan tinggi.

																		HLS sebesar 12,64, RLS sebesar 8,18, dan Pengeluaran per kapita sebesar Rp.9.968.000,- ..angka UHH dipengaruhi oleh sanitasi, ketersediaan fasilitas kesehatan penolong kelahiran misalnya puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit. dan tenaga medis, kemudian HLS dan RLS dipengaruhi ketersediaan sejumlah infrastruktur pendidikan dan tenaga pengajaran antara lain: jumlah sekolah, jumlah ruang kelas, jumlah guru dan jumlah murid. Tingkat pengeluaran per kapita dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. Daya beli adalah kemampuan individu untuk membeli barang dan jasa	dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN). Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

		b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,50	80	84,81	87	89,50	80	84,81	85,79	86,17	100	100	96,60	96,27	kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, masih kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk program / kegiatan peningkatan pembangunan dan pemberdayaan gender	Capaian pembangunan dan pemberdayaan gender menjadi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026	Optimalisasi Program/kegiatan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang netral gender dan tidak berpihak maupun kebijakan-kebijakan yang berpihak sebagai affirmative action untuk mewujudkan kesetaraan
		c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,00	59	60,93	61,03	70,00	59	60,93	73,20	73,46	100	100	100	100			
	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dari segi keimanan dan ketaqwaan, kerukunan inter dan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	85	70	75,47	80	85	-	-	-	-	-	-	-	-	Masih terdapat sekelompok masyarakat dengan sikap fanatisme, cara-cara agresif dalam dakwah agama yang ditujukan kepada orang yang telah beragama atau agama lain, pendirian tempat ibadah tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengaburan nilai-nilai ajaran agama	Terdapat lembaga Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan mendapat alokasi anggaran untuk operasionalnya (hibah). Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat meluncurkan program bantuan bagi dai dan petugas syara berupa pemberian honorarium	Membentuk lagi beberapa kampung kerukunan umat beragama di setiap kecamatan guna mempererat hubungan antar umat beragama. Menambah jumlah kuota dai dan petugas syara yang mendapat bantuan honorarium
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, dengan derajat kesehatan yang semakin meningkat yang ditunjukkan angka kematian (mortalitas), status gizi masyarakat, dan usia harapan hidup	a. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	25	39	24	32	25	39	35	39	37	100	68,57	82,05	64,10	- Sarana dan Prasarana pendukung belum maksimal - sebaranTenaga tenaga kesehatan yang belum merata	- Adanya Perbub SK AMPSR (audit Maternal Perinatal Surveillance dan Renspon) dalam pelayanan Kesehatan ibu dan Anak - Optimalisasi kerjasama lintas sektor dalam pencegahan dan penurunan	- pemenuhan Sarana dan Prasarana penunjang (ruang Poned dan kelengkapan ruang pada Puskesmas), saat ini baru tersedia 5 Puskesmas - Peningkatan kapasitas tenaga sesuai kompetensi dalam pelayanan bayi dan ibu melahirkan

																	permasalahan Kesehatan Ibu dan Anak	
	b. Prevalensi gizi buruk pada Balita	5	19,6	15	12	10	50,8	50,8	19,8	9,9	38,58	29,52	75,75	99,00	- Sarana dan Prasarana pendukung belum maksimal - keterbatasan jumlah Tenaga Nutrisionis	-Adanya kebijakan pemerintah dalam mendukung kegiatan penanggulangan gizi(Adanya regulasi) - Optimalisasi kerjasama lintas sektor dalam pencegahan dan penurunan permasalahan gizi	- pemenuhan Tenaga Nutrisionis - pemenuhan Sarana dan Prasarana penunjang - Peningkatan kapasitas tenaga Nutrisionis	
	c. Angka Usia harapan hidup	77,7	67,44	73,8	75,5	77,7	67,44	67,71	68,17	68,43	100	100	89,89	100	Keterbatasan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, seperti rumah sakit, puskesmas, pustu, posyandu yang masih mengalami kekurangan sarana - prasarana.	Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kot a dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	Pemenuhan sarana / prasarana serta tenaga medis yang memadai mulai dari rumah sakit, puskesmas, pustu, hingga posyandu	

	Terkendalinya jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk sesuai daya dukung dan daya tampung wilayah	Nilai rata – rata laju pertumbuhan penduduk (5 tahun terakhir)	1,50%	2,50%	2,40%	1%	1,50%	2,50%	2,16%	0,73%	1,01%	100	100	100	100	Belum sebagian besar masyarakat/ keluarga menjadi peserta KB aktif, tahun 2020 cakupan peserta KB aktif sebesar 62,70%	Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengaturan kelahiran dan jumlah anak . Tersedianya Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) untuk setiap desa	Terus menggiatkan program pembinaan keluarga berencana terutama ditujukan untuk pasangan yang baru menikah. Optimalisasi peran Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) di setiap desa
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang berkualitas	Terbangunnya konektivitas antar wilayah dan terciptanya integrasi antar moda transportasi	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	85%	15%	77,74%	80,10%	85%	15%	40,25%	38,53%	40,00%	100	51,77	48,10	100	Faktor topografi wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat, dimana hampir sebagian wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat berkontur tanah lunak seperti di Kec. Tungkal Ilir, Kec. Pengabuan, Kec. Senyerang, Kec. Seberang Kota, Kec. Kuala Betara, Kec. Bram Itam, dan Kec. Betara. Yang sangat rentan mengalami kerusakan apabila jalan dilalui beban berat atau terendam air.	Undang-undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa	Pembangunan jalan lebih mengutamakan penggunaan jenis konstruksi beton untuk sifat dan daya dukung tanah dasar yang lunak
	Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang sesuai kebutuhan, baik di perkotaan maupun dipedesaan	Rasio Elektrifikasi	100%.	43,19%	70%	80%	100%	43,19%	55,25%	77,39%	95,25%	100	78,92	96,73	100	Faktor Geografi wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat, dimana daerah - daerah yang belum terjangkau aliran listrik adalah daerah wilayah pesisir/ sungai, dengan akses melalui sungai.	Menjadi target pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah daerah untuk mencapai 100%	Terus berkoordinasi dan bersinergitas dalam melaksanakan penyediaan akses listrik bagi masyarakat.

	Meningkatnya pembangunan jaringan infrastruktur informasi dan komunikasi yang mencapai seluruh wilayah kabupaten	Cakupan layanan informasi dan komunikasi	95%	70%	80%	85%	95%	-	-	66,41%	91,04%	-	-	78,12	95,83	Faktor Geografi wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat, dimana daerah - daerah yang belum terjangkau layanan jaringan informasi dan komunikasi adalah desa-desa wilayah pesisir/sungai, dengan akses melalui sungai dan jalan yang tidak bagus, kemudian penyebaran penduduk yang tidak merata.	Menjadi target Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah daerah untuk mencapai layanan informasi dan komunikasi sebesar 100% (seluruh desa dalam Kab. Tanjung Jabung Barat)	Melakukan koordinasi secara kontinyu ke Pemprov. Jambi, untuk merencanakan pembangunan tower/jaringan informasi/komunikasi di desa - desa yang masih tidak ada/lemah sinyal.
	Tersedianya infrastruktur layanan air minum terutama bagi masyarakat perkotaan	Persentase rumah tangga mempunyai akses terhadap air bersih berkelanjutan	95%	19,80%	90%	100%	100%	-	-	85,24%	87,00%	-	-	85,24	87,00	Faktor Geografi wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat, dimana sumber air baku jauh dari perkotaan, dibutuhkan biaya cukup besar untuk mendistribusikan air, disamping itu kondisi pipa jaringan induk cukup banyak mengalami kebocoran	Tersedianya air baku, dan masih ada capacity idle yang bisa digunakan untuk melayani pemasangan baru sambungan rumah tangga (SR)	Memberikan subsidi untuk operasional, menekan jumlah kebocoran air

Tewujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang berbasis pada agroindustri dan SDA	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dengan mengutamakan sektor agroindustri, pertambangan, pertambangan dan penggalian	a. Angka pertumbuhan ekonomi di tahun 2025	5,25%	6,87%	8,14%	7,50%	5,25%	6,87%	6,15%	1,36%	2,56%	100	75,55	18,00	48,76	Pandemi Covid-19 dari akhir tahun 2019 s.d. 2022, dan inflasi	Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dicanangkan Pemerintah Pusat, untuk dilaksanakan pemerintah daerah. Tersedianya sumber daya alam Kab. Tanjung Jabung Barat, dan dukungan Pihak Swasta melalui CSR	Memprioritaskan pelaksanaan program/kegiatan baik pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah seperti pembangunan jalan logistik, jalan produksi, jalan usaha tani, pelatihan kewirausahaan, bantuan sarana/prasarana usaha, promosi investasi dan kemudahan investasi, serta perluasan akses layanan informasi dan komunikasi. dan membangun sinergitas dengan Forum TJSLP untuk mendukung program/kegiatan
--	---	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	---	---	--

			b. Tingkat Pendapatan Perkapita	Rp.72.217.000,	14.687.000,-	Rp.40.140.000	Rp.68.540.000	Rp.72.217.000 0,-	Rp.7.244.004,-*	Rp.10.476.084,-*	Rp.9.639.000,-	Rp.10.229.000,-	NA	NA	NA	NA	Pandemi Covid-19 dari akhir tahun 2019 s.d. 2022, dan meningkatnya pengangguran	Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dicanangkan Pemerintah Pusat, untuk dilaksanakan pemerintah daerah. Tersedianya sumber daya alam Kab. Tanjung Jabung Barat, dan dukungan Pihak Swasta melalui CSR	Memprioritaskan pelaksanaan program/kegiatan baik pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah seperti pembangunan jalan logistik, jalan produksi, jalan usaha tani, pelatihan kewirausahaan, bantuan sarana/prasarana usaha, promosi investasi dan kemudahan investasi, serta perluasan akses layanan informasi dan komunikasi. dan membangun sinergitas dengan Forum TJSLP untuk mendukung program/kegiatan
			c. Persentase Penduduk Miskin	c. 8%	c.12%	c. 11,61%	c.10,25%	c.8%	12%	11,81%	10,75%	9,79%	100	98,30	99,44	81,71	Pandemi Covid-19 dari akhir tahun 2019 s.d. 2022, dan meningkatnya pengangguran	Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dicanangkan Pemerintah Pusat, untuk dilaksanakan pemerintah daerah. Tersedianya sumber daya alam Kab. Tanjung Jabung Barat dan dukungan Pihak Swasta melalui CSR	Memprioritaskan pelaksanaan program/kegiatan baik pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah seperti pembangunan jalan logistik, jalan produksi, jalan usaha tani, pelatihan kewirausahaan, bantuan sarana/prasarana usaha, promosi investasi dan kemudahan investasi, serta perluasan akses layanan informasi dan komunikasi.

																		dan membangun sinergitas dengan Forum TJSLP untuk mendukung program/kegiatan
		d. Tingkat Pengangguran Terbuka	3%.	2,05%	1,75%	1,32%	3%	4,90%	2,68%	2,53%	2,95%	41,83	65,29	47,83	100	Pandemi Covid-19 dari akhir tahun 2019 s.d. 2022	Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dicanangkan Pemerintah Pusat, untuk dilaksanakan pemerintah daerah. Tersedianya sumber daya alam Kab. Tanjung Jabung Barat dan dukungan Pihak Swasta melalui CSR	Meningkatkan promosi investasi, meningkatkan pelatihan kewirausahaan yang disertai pemberian bantuan sarana/prasarana usaha
Terwujudnya masyarakat dan pemerintahan yang baik dan menjunjung tinggi supremasi hukum	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif, efisien, dan bersih	a. Opini BPK	a. "WTP"	a.WDP	a. "WTP"	a. "WTP"	a. "WTP"	.WDP	WDP	WTP	WTP	100	0	100	100	Sistem Pengendalian Intern opd dan ketidakpatuhan terhadap peraturan	Adanya pembinaan dan pemeriksaan dari Inspektorat secara rutin	Meningkatkan kinerja pengelolaan aset/barang milik daerah dan pengelolaan keuangan daerah
		b. Predikat SAKIP oleh Kemenpan dan RB	b. "BB"	b.CC	b.CC	b.CC	b. "BB"	CC	CC	CC	B	100	100	100	50	Kualitas sumber daya manusia	Adanya komitmen Bupati Tanjung Jabung Barat beserta jajaran pejabat untuk meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Tahun 2022 Kab. Tanjung Jabung Barat sudah memperoleh predikat SAKIP "B"	Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan atau pelatihan SAKIP kepada OPD hingga kecamatan

Tewujudnya pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Pemerataan akses pelayanan pendidikan, akses pelayanan kesehatan, akses pelayanan informasi dan komunikasi, pemerataan pembangunan ekonomi, pemerataan pendapatan masyarakat ke seluruh wilayah Tanjung Jabung Barat	Gini Ratio	0,25	0,4	0,35	0,3	0,25	0,4	0,33	0,249	0,316	100	100	100	79,11	Tidak meratanya ketersediaan infrastruktur dasar antar kecamatan/desa. Nilai tukar petani (komoditas pinang dan kelapa dalam) yang rendah.	Tersedianya cukup banyak sumber daya alam, dan pembangunan desa tertinggal menjadi prioritas pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	Meningkatkan nilai tukar petani (untuk komoditi pinang dan kelapa dalam) dengan menarik investor untuk berinvestasi pembangunan usaha pengolahan dari bahan baku menjadi barang jadi
	. Meningkatnya pembangunan pada daerah yang belum berkembang, dengan memanfaatkan a) Potensi sumber daya alam dan produk unggulan daerah, b) Dan meningkatkan perdagangan antar daerah	Persentase desa berstatus swasembada	20	5	10	15	20	5	10	12	21	100	100	80,00	100	kurang tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, tidak memanfaatkan sumber daya alam secara optimal	Tersedia jumlah sumber daya manusia dan sumber daya alam yang cukup	Mendorong pemerintah desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
	Terciptanya keserasian pembangunan berlandaskan keadilan dan berwawasan lingkungan yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Rasio ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	82,92%	95%	-	-	82,92	95	Masih terdapat masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan RTRW	Adanya Peraturan Daerah tentang RTRW Kab. Tanjung Jabung Barat	Menggiatkan sosialisasi peraturan RTRW Kab. Tanjung Jabung Barat, memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran RTRW, tidak memberikan rekomendasi IMB bagi permohonan yang tidak sesuai RTRW
	Mewujudkan kemandirian pangan masing – masing wilayah, dengan memperhatikan kualitas gizi dan ketersediaan anekaragaman jenis pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90	70	95	85	90	70	79,80	90,00	86,30	100	86,73	100	95,88	Pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal seperti umbi, jagung, dan sagu pun masih rendah, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan yang tidak merata	Tersedianya sumber - sumber pangan lokal yang cukup	Menggalakan konsumsi pangan lokal dengan melakukan variasi penyajian/olahan

	Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam (SDA) beserta lingkungan hidupnya, sebagian besar wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki potensi sumber daya alamnya masing – masing. Pemanfaatan sumber daya alam dalam skala menengah keatas wajib memperhatikan pengelolaan sumber daya alamnya itu sendiri dan lingkungan hidupnya untuk menjaga kelestarian SDA dan terpeliharanya fungsi dan daya dukung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,5	60	63,5	65	68,5	-	-	66,20	72,69	-	-	100	100	Keterbatasan sumber daya manusia untuk pengawasan lingkungan hidup (PPLH), masih rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Adanya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Menyusun dokumen RPPLH, Menambah jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Optimalisasi peran PPLH yang ada, mendorong perusahaan untuk melaksanakan AMDAL
Rata-rata capaian kinerja (%)												96,57	84,56	86,65	91,14			
Predikat kinerja												Sangat tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat tinggi			
Sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional :																		
Usulan tindak lanjut dalam RPJPD Kabupaten/Kota																		

2.5 Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Publik

Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai wilayah seluas 5.503,5 Km², terkahir pada tahun 2023 dengan jumlah penduduk sebesar 331.058 jiwa, penduduk merupakan salah satu potensi sumber daya pembangunan, dengan srategi yang tepat penduduk dapat menjadi kekuatan yang besar dalam memwujudkan cita – cita pembangunan. Sisi lain jumlah penduduk yang semakin bertambah akan meningkatkan kebutuhan sarana prasarana kelengkapannya, sarana prasarana seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, penyediaan air minum, rumah, jalan, listrik, hingga pengelolaan sampah serta lainnya harus tersedia cukup sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Tabel 2.39 Proyeksi Jumlah Penduduk Kab. Tanjung Jabung Barat

Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
331.058	339.630	361.350	380.790	397.538	411.509

Sumber : Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2020 – 2045
BPS Prov. Jambi, dan data diolah.

Tahun 2023 angka fertilitas Kab. Tanjung Jabung Barat sebesar 2,37% dan diperkirakan rata – rata sekitar 2% sampai dengan tahun 2045, dan laju pertumbuhan penduduk diperkirakan akan terus melambat, Pada tahun 2023 laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan hasil penghitungan BPS sebesar 1,39%. Diperkirakan laju pertumbuhan penduduk tahun 2025 – 2045 sama dengan lebih kecil 1%, sehingga jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2045 diproyeksi mencapai sekitar 411.509 jiwa.

Tabel 2.40 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kab. Tanjung Jabung Barat

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	170.606	174.420	184.450	193.160	200.050	204.520
Perempuan	160.452	165.210	176.900	187.630	196.980	204.630
Rasio	106.32	105.57	104.27	102.95	101.56	99.95

Sumber : Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2020 – 2045 BPS Prov. Jambi, dan data diolah.

Proyeksi jumlah penduduk tahun 2025 – 2045 berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), pada tahun 2025 dengan rasio laki-laki - perempuan sebesar 105,57 artinya jumlah laki-laki sebesar 105,57 jiwa berbanding jumlah perempuan 100 jiwa. Rasio jumlah laki-laki – perempuan diproyeksi terus menurun dari 2030 sampai dengan 2045, bahkan jumlah penduduk perempuan lebih banyak berbanding laki-laki yaitu dengan rasio 99,95.

Tabel 2.41 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Kab. Tanjung Jabung Barat

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0–14 Tahun	85.840	87.61	89.36	90.54	90.46	88.48
15-64 Tahun	228.804	232.73	245.48	255.77	264.15	271.22
> 65 Tahun	16.775	19.29	26.51	34.50	42.5	49.73
Angka Ketergantungan	44	46	47	49	50	51

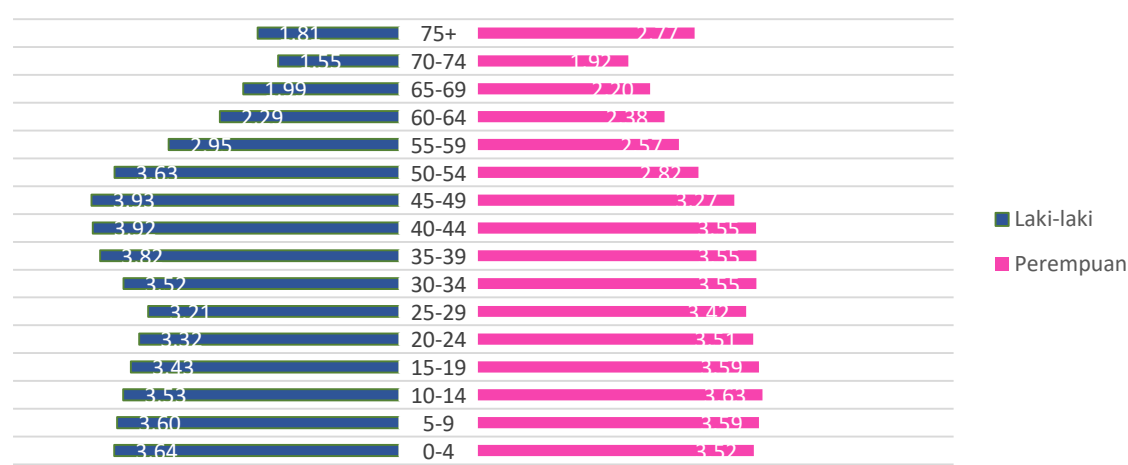
Sumber : Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2020 – 2045 BPS Prov. Jambi, dan data diolah.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat diproyeksi dari tahun 2025 – 2045 mempunyai penduduk usia produktif cukup tinggi, dimana rasio ketergantungan selama 2025 sampai dengan 2040 dibawah 50%, rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting, semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang

belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Bonus demografi penduduk usia produktif tersebut merupakan pendorong utama pembangunan, hasil positif dari pemanfaatan bonus demografi dapat di raih apabila produktivitas penduduk usia produktif dapat ditingkatkan.

Gambar. 2.31 Piramida Penduduk Kab. Tanjung Jabung Barat 2045



Tabel 2.42 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kab. Tanjung Jabung Barat

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	331.058	339.630	361.350	380.790	397.030	409.150
Proyeksi Kebutuhan Rumah	80.226	81.426	82.647	83.887	85.145	86.422

Sumber : Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2020 – 2045 BPS Prov. Jambi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tanjung Jabung Barat, dan data diolah.

Tabel 2.43 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kab. Tanjung Jabung Barat

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	331.058	339.630	361.350	380.790	397.030	409.150

Proyeksi Kebutuhan Air Minum	816,325	849.075	903.375	951.975	992.575	1.022.875
------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Sumber : Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2020 – 2045 BPS Prov. Jambi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Tanjung Jabung Barat, dan data diolah.

Tabel 2.44 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kab. Tanjung Jabung Barat

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	331.058	339.630	361.350	380.790	397.030	409.150
Jumlah Rumah	80.226	81.426	82.647	83.887	85.145	86.422
Proyeksi Kebutuhan Listrik	99.98	120.8	188.49	278.52	390.91	525.64

Sumber : Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2020 – 2045 BPS Prov. Jambi, dan data diolah.

Tabel 2.45. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kab. Tanjung Jabung Barat

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi timbulan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	331.058	339.630	361.350	380.790	397.030	409.150
Timbulan Sampah (ton)	91.231	94.917	104.794	115.688	127.687	141.071
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (unit)	0	2	3	4	5	6

Sumber : Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2020 – 2045 BPS Prov. Jambi, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat, dan data diolah.

Tabel 2.46. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	331.058	339.630	361.350	380.790	397.030	409.150

Proyeksi Fasilitas Kesehatan :						
▪ Rumah sakit	2	2	2	2	2	2
▪ Puskesmas	16	17	17	17	18	18

Sumber : Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2020 – 2045 BPS Prov. Jambi, Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat, dan data diolah.

Tabel 2.47. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Barat

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	331.058	339.630	361.350	380.790	397.030	409.150
Proyeksi Fasilitas Pendidikan :						
▪ TK	74	76	84	89	91	94
▪ SD/MI	216	216	218	220	221	222
▪ SMP/MTs	66	67	68	68	69	70
▪ SMA/MA/S MK	41	41	44	45	46	48

Sumber : Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2020 – 2045 BPS Prov. Jambi, Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Baratdan data diolah.

2.6 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 – 2043, struktur ruang, meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana jaringan prasarana.

Sistem pusat permukiman dikembangkan secara hierarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan wilayah kabupaten. Sistem pusat permukiman meliputi pusat kegiatan wilayah (PKW), pusat kegiatan lokal (PKL), pusat pelayanan kawasan (PPK), dan pusat pelayanan lingkungan (PPL).

2.6.1 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW),

PKW berada di Perkotaan Kuala Tungkal berfungsi sebagai pusat pemerintahan skala kabupaten, perdagangan dan jasa skala regional, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, pusat industri pengolahan perikanan, pusat peribadatan, dan simpul pelayanan transportasi.

2.6.2 Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan, PKL dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi :

- a. Perkotaan Serdang Jaya di Kecamatan Betara yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa sub regional, pusat kesehatan, industri pengolahan, pusat pendidikan, pusat peribadatan, dan simpul transportasi;
- b. Perkotaan Merlung di Kecamatan Merlung yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa sub regional, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, pusat peribadatan, dan simpul transportasi; dan
- c. Perkotaan Tebing Tinggi di Kecamatan Tebing Tinggi yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan, perdagangan dan jasa sub regional pelayanan transportasi.

2.6.3 Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi :

- a. Perkotaan Dusun Kebun di Kecamatan Batang Asam yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum, perdagangan dan distribusi barang lokal, dan simpul transportasi;
- b. Perkotaan Bram Itam Kiri di Kecamatan Bram Itam yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat

pelayanan fasilitas umum, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga;

- c. Perkotaan Pelabuhan Dagang di Kecamatan Tungkal Ulu yang berfungsi pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum, perdagangan dan jasa, industri kecil dan kerajinan rumah tangga;
- d. Perkotaan Teluk Nilau di Kecamatan Pengabuan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga; dan
- e. Perkotaan Dusun Mudo di Kecamatan Muara Papalik yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/beberapa desa, dan pasar lokal.

2.6.4 Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, PPL dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi :

- a. Perdesaan Senyerang di Kecamatan Senyerang berfungsi sebagai transportasi lokal, pasar lokal dan pusat pelayanan fasilitas umum;
- b. Perdesaan Tungkal V di Kecamatan Seberang Kota berfungsi sebagai transportasi lokal dan pusat pelayanan fasilitas umum;
- c. Perdesaan Betara Kiri di Kecamatan Kuala Betara berfungsi sebagai pusat pelayanan fasilitas umum skala beberapa desa;
- d. Perdesaan Lubuk Kambing di Kecamatan Renah Mendaluh berfungsi berfungsi transportasi lokal dan pusat pelayanan fasilitas umum; dan
- e. Perdesaan Rantau Badak di Kecamatan Muara Papalik berfungsi untuk transportasi lokal dan pusat pelayanan fasilitas umum dan perdagangan dan pendidikan

2.7 Kawasan Industri

Kawasan peruntukan industri besar terdapat di Kecamatan Senyerang dan Kecamatan Tebing Tinggi dengan luas 1.347 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh) hektar. Pembangunan kawasan peruntukan industri besar diprioritaskan berada di sekitar simpul TOL Sumatera di Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Muara Papalik dan Kecamatan Tebing Tinggi.

2.8 Tol Trans Sumatera

Pembangunan Tol Trans Sumatera merupakan major project nasional dalam rangka memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan manfaat (1) menurunkan ongkos angkut dengan pengurangan waktu tempuh Aceh-Lampung dari 48 jam menjadi 30 jam, (2) menjadi enabler bagi perkembangan 6 Kawasan Industri (KI Dumai, KI Jambi Kemingking, KI Tenayan, KI Way Pisang, KI Sei Mangkei, KI Tanjung Api-Api).

Ruas jalan tol Jambi – Rengat termasuk bagian pembangunan Tol Trans Sumatera yang melewati wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat pada 4 kecamatan, yaitu Kec. Muara Papalik (Desa Dusun Mudo), Kec. Tungkal Ulu (Kuala Dasal, Kel. Pelabuhan Dagang, desa Brasau, dan Desa Taman Raja), Kec. Tebing Tinggi (Kel. Tebing Tinggi), dan Kec. Batang Asam (desa Suban).

Dengan Interchange berada di Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian rest area salah satunya terdapat di Desa Brasau dan Desa Taman Raja Kecamatan Tungkal Ulu.

Keberadaan ruas jalan tol Jambi – Rengat yang melewati 4 kecamatan dalam Kab. Tanjung Jabung Barat akan memberikan dampak sosial ekonomi terhadap daerah, dampak positif bisa berupa peningkatan perekonomian masyarakat sekitar khususnya dan bagi Kab. Tanjung Jabung Barat.

2.9 Wisata kawasan lindung pantai mangrove dan Cagar alam Pantai Timur

Cagar alam pantai timur wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat seluas 126,11 Ha, memiliki karakteristik pantai berlumpur dan berbakau. Salah satu lokasi hutan bakau tersebut adalah Pangkal Babu, tutupan lahan di kawasan Pangkal Babu terdiri dari tutupan lahan hutan mangrove dan perkebunan kelapa, serta eks tambak ikan. Tanjung Jabung Barat memiliki spesies yang cukup bervariasi, diantaranya yang paling umum adalah: a. Api - api (*Avicennia* Sp), b. *Rhizophora* sp, c. Pidada, d. Nipah dan e. *Cylocarpus granatum* (spesies yang tidak umum memiliki buah yang besar), sedangkan jenis fauna (hewan) yang ada terdiri dari ikan belanak, kepiting, udang, ikan sembilang, Gurame, udang ketak, lokan, kerang, siput, dan lainnya.

Mangrove Pangkal Babu mempunyai potensi ekonomi, potensi fisik, dan potensi biologi. Mangrove Pangkal Babu dapat menjadi eko wisata dan pendidikan, menjadi sumber pencaharian masyarakat sekitar, penahan abrasi, penahan intrusi air laut, penyerap gas karbon dioksida, penghasil oksigen, tempat hidup biota laut dan habitat satwa.

B A B III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJPD karena menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Permasalahan dan isu-isu strategis yang disajikan adalah permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Permasalahan - permasalahan pembangunan lain yang tidak diprioritaskan atau tidak menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan tidak perlu disajikan.

3.1. Permasalahan Pembangunan

3.1.1 Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kab. Tanjung Jabung Barat masih cukup tinggi, pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin sebesar 33.607 (9,79%). Bila menurut kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, Tingkat kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada diurutan ke 11 dari 12 kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi. Serta masih diatas rata – rata tingkat kemiskinan 12 kabupaten/kota (7,58%). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2109 sampai dengan 2023, tingkat kemiskinan Kab. Tanjung Jabung Barat berfluktuasi dan secara tren menunjukkan penurunan.



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, Tahun 2024

Dalam kemiskinan Kab. Tanjung Jabung Barat terdapat kemiskinan ekstrem, tahun 2022 jumlah penduduk miskin ekstrem sejumlah 5.583 jiwa atau 1,64 persen. penduduk miskin ekstrem dalam kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan, dengan kata lain, penduduk miskin ekstrem mempunyai pengeluaran lebih rendah dari penduduk miskin umum.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu strategis. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan.

Kemiskinan perlu ditangani secara serius dan komprehensif oleh Pemerintah Daerah bersama – sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Permasalahan kemiskinan yang terlalu lama akan menimbulkan permasalahan sosial baru, seperti memicu terjadinya tindak kriminal, tingkat pengangguran bertambah, kemunduran kualitas SDM karena banyak yang tidak mampu bersekolah lebih tinggi, dan angka kematian meningkat karena rendahnya kualitas kesehatan masyarakat.

3.1.2 Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Belum Merata

Kualitas sumber daya manusia Kab. Tanjung Jabung Barat yang masih rendah, kualitas sumber daya manusia dapat ditunjukkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia Kab. Tanjung Jabung Barat sebesar 71,44. Bila menurut kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, IPM Kab. Tanjung Jabung Barat berada diurutan ke 11 dari 12 kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi, serta masih dibawah rata – rata IPM Prov. Jambi (73,77) dan Nasional (74,39).



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2023

Dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 IPM Kab. Tanjung Jabung Barat cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hanya saja tahun 2020 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Secara tren IPM Kab. Tanjung Jabung Barat mengalami peningkatan.

IPM merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia yang diukur dengan menggunakan empat variabel dalam perhitungannya, yaitu Usia Harapan Hidup Saat Lahir (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), dan pengeluaran per Kapita.

Usia Harapan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan dari angka 68,03 menjadi 73,21.

Rata – rata lama sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2023 masih tergolong rendah yaitu hanya selama 8,31 tahun, artinya rata – rata penduduk hanya menyelesaikan pendidikan

sampai kelas 2 pada jenjang sekolah menengah pertama. Sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 selalu mengalami peningkatan. Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak Penduduk Tanjung Jabung Barat yang bersekolah. Pada Tahun 2023 angka harapan lama sekolah mencapai 12,67 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau Diploma 1.

Untuk pengeluaran per kapita penduduk untuk makanan/pangan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 setiap tahunnya mengalami peningkatan, dari Rp.9.539.000 rupiah menjadi Rp.10.229.000,-

3.1.3 Daya Jual Komoditi Pinang dan Kelapa Yang Rendah

Komoditi pinang dan kelapa dalam merupakan komoditas unggulan Kab. Tanjung Jabung Barat selain kelapa sawit dan kopi, dan disebut sebagai perkebunan rakyat yang mana dibudidaya dan dikelola masyarakat sebagai sumber perekonomian, untuk skala nasional komoditi pinang dan kelapa dalam sebagai salah satu komoditas andalan negara dalam memperoleh devisa. Pada tahun 2022 terdata lahan perkebunan pinang Kab. Tanjung Jabung Barat seluas 9.823 ha dan perkebunan kelapa dalam seluas 55.384 ha, luas lahan kedua komoditi tersebut merupakan terbesar kedua menurut kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi setelah Kab. Tanjung Jabung Timur. Besaran luas lahan perkebunan pinang dan kelapa dalam tersebut adalah potensi sumber daya alam yang menyokong perekonomian Kab. Tanjung Jabung Barat, sekitar 6.646 kk petani bekerja/mencari penghasilan dari usaha perkebunan pinang dan sekitar 16.770 kk dari usaha kelapa dalam.

Tabel. 3.1. Perkembangan Luas Lahan Perkebunan Pinang dan Kelapa Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 - 2023

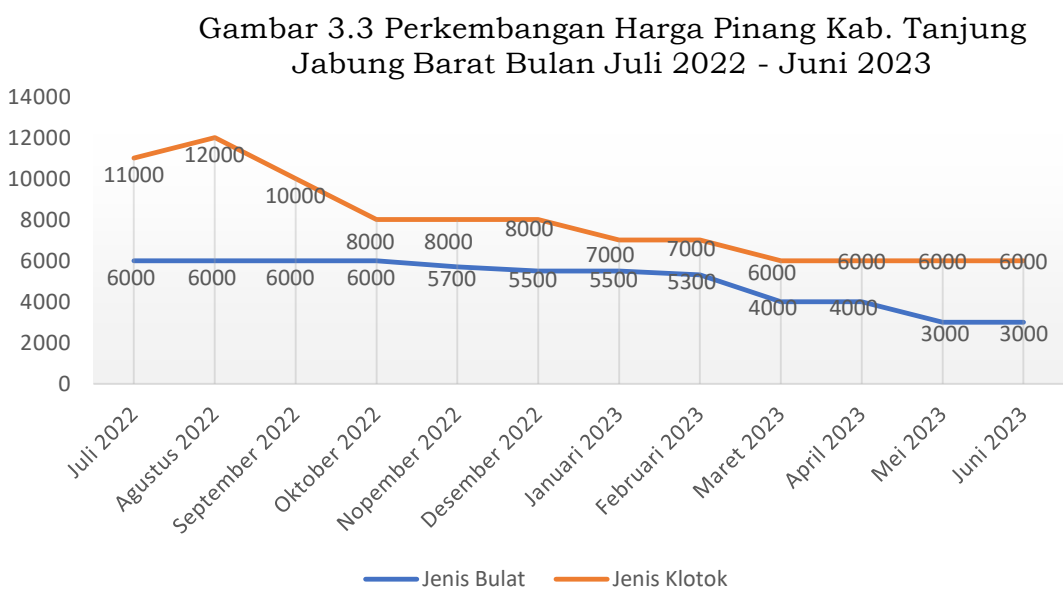
No	Jenis Perkebunan	Luas Lahan (Ha)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pinang	11.353	11481	9.823	13.645	13.750
2	Kelapa Dalam	55.349	55.394	55.384	51.539	51.479

Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Tanjung Jabung Barat, Tahun 2024

Dilihat dari tabel diatas luas lahan perkebunan pinang mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 11.353 Ha di tahun 2019 menjadi 13.750 Ha di tahun 2023, menunjukkan ketertarikan masyarakat untuk berusaha dibidang perkebunan pinang yang dianggap mempunyai prospek yang baik. Sama seperti halnya perkebunan pinang, luas lahan perkebunan kelapa dalam cukup stabil tahun 2019 sampai dengan 2023 berada di kisaran diatas 55.000 ha.

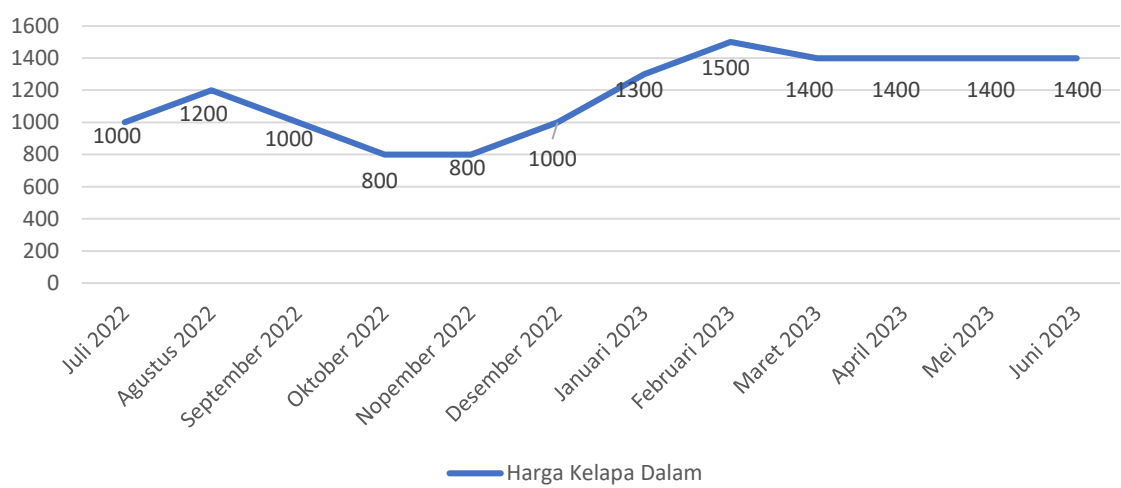
Harga jual pinang dan kelapa dalam ditingkat petani cukup fluktuatif, tercatat sejak pertengahan tahun 2022 sampai dengan 2023 harga pinang dan kelapa dalam cenderung mengalami penurunan, terutama komoditi pinang yang harga jualnya turun drastis. Harga pinang kering menyentuh pada harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) per kilogram, bahkan jika kualitasnya rendah mendorong harga pinang lebih murah lagi. Rendahnya harga pinang dan kelapa dalam mempengaruhi pendapatan para petani akibatnya daya beli masyarakat menjadi turun.

Dampak buruk dari rendahnya harga pinang dan kelapa dalam untuk waktu yang cukup lama sudah dirasakan masyarakat, seperti gerak perekonomian Kab. Tanjung Jabung Barat, kemudian menyebabkan banyak mahasiswa dan santri memilih tidak melanjutkan karena tidak mampu lagi membayar uang kuliah dan biaya hidup.



Sumber : Disbunak Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2023

Gambar 3.4. Perkembangan Harga Kelapa Dalam Kab. Tanjung Jabung Barat Bulan Juli 2022 - Juni 2023



Sumber : Disbunak Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2023

3.1.3.1 Ketahanan Pangan / Alih Fungsi Lahan Pertanian

Berkurangnya lahan-lahan pertanian tanaman pangan oleh aktivitas ekonomi masyarakat terutama untuk pengembangan lahan perkebunan, permukiman, pembangunan infrastruktur ataupun industri. Data statistik pertanian menunjukkan bahwa selama tahun 2013 s/d 2020, terjadi konversi lahan sawah menjadi lahan perkebunan maupun lahan non pertanian mencapai ± 9.556 Ha. Terakhir pada tahun 2023 luas lahan baku sawah sebesar 7511,25 ha menurun dari luas 18.435 ha di tahun 2013, dampaknya produksi padi juga ikut menurun.

3.1.3.2 Permukiman Kumuh

Tahun 2023 Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai jumlah penduduk 331.058 jiwa yang tersebar di 13 wilayah Kecamatan, dengan rata – rata kepadatan penduduk sebesar 59.35 jiwa per km2. Kecamatan Tungkal Ilir merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, kemudian diikuti Kec. Tebing Tinggi dan Kec. Batang Asam.

Berdasarkan pada Lampiran I peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018-2038, tercatat jumlah rumah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 72.986 unit, dari 72.986 unit tersebut sebanyak 52.946 unit (72,54%)

yang memenuhi syarat sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya, dan sebanyak 20.040 unit (27,46%) yang tidak memenuhi syarat sebagai tempat tinggal/Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.

Berdasarkan SK Bupati Nomor 438/Kep.Bup/Bappeda.2017 tentang Penetapan Lokasi Perkumuhan Dan Permukiman Kumuh, ditetapkan lokasi kawasan kumuh menurut kelurahan/kecamatan sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 3.2

Luas Kawasan Kumuh Menurut Kelurahan/Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Kecamatan	Kelurahan	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Tingkat Kekumuhan	Legalitas Lahan	Prioritas Penanganan
1.	Tungkal Ilir	Tungkal Harapan	Pusat Kota Kuala Tungkal	122,9	Kumuh Berat	Legal	Prioritas 1
		Patunas					
		Sriwijaya					
		Tungkal IV Kota					
2.	Tungkal Ilir	Tungkal II	Pusat Kota Kuala Tungkal	77,3	Kumuh Berat	Legal	Prioritas 1
		Tungkal III					
		Kampung Nelayan		35,1	Kumuh Sedang		
		Sungai Nibung		9,85			
3.	Bram Itam	Bram Itam Kiri	Pusat Kota Bram Itam Kiri	10,05	Kumuh Sedang	Legal	Prioritas 1
	Luas Total Kawasan Kumuh			255,2			

Sumber Data : SK Bupati Tanjung Jabung Barat No. 438/Kep.Bup/BAPPEDA/ 2017 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kawasan kumuh (di perkotaan) sebagian besar berada dalam pusat Kota Kuala Tungkal (Ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat), seperti Kel. Tungkal Harapan, Kel. Patunas, Kel. Sriwijaya, dan Kel. Tungkal IV Kota, dengan luas kumuh 122,9 ha (48,16%) dengan tingkat kekumuhan “kumuh berat”.

Sampai dengan tahun 2022 luas kawasan kumuh berkurang dari 255,20 ha (ditetapkan) menjadi 9,94 ha (3,53 persen). Beberapa upaya penanganan kawasan kumuh yang telah dilakukan seperti peningkatan/perbaikan jalan, pembangunan drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, rehabilitasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan rehabilitasi gedung sekolah/ pembangunan RKB, serta peningkatan kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2022 telah disusun Dokumen Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) oleh Dinas Perkim Kab.Tanjab Barat, pendataan kawasan kumuh didapati seluas 174,61 ha pada 6 (enam) kecamatan 8 (delapan) kelurahan/kawasan kumuh, sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kab. Tanjung Jabung Barat

No.	Kecamatan	Kawasan di kelurahan	Luas (ha)	Keterangan
1.	Tungkal Ilir	1. Sriwijaya 2. Tungkal II 3. Kpg. Nelayan	9,79 40,7 9,95	Ringan Ringan Ringan
2.	Merlung	4. Merlung	8,2	Ringan
3.	Tebing tinggi	5. Tebing Tinggi	3,4	Ringan
4.	Pengabuan	6. Teluk Nilau	12,6	Ringan
5.	Kuala betara	7. Betara Kiri	29,34	Sedang
6.	Betara	8. Mekar Jaya	9.77	Ringan
Jumlah			123,75	

Sumber Data : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 71/Kep.Bup/Perakim/2024 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kab.Tanjung Jabung Barat

3.2. Isu Strategis
3.2.1. Lingkup Global

Perkembangan Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disruptsi teknologi diberbagai bidang kehidupan masyarakat, perkembangan teknologi yang masih terus diperbaharui seperti teknologi digital *artificial intelligince (AI)*, dan *robotics*, teknologi tersebut dapat memudahkan cara kerja dan meningkatkan produktivitas.

Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaatif dari masyarakat, kemampuan untuk beradaptasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan litaerasi dan pola pikir yang baik, penggunaan teknologi baru dapat menghilangkan beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan secara konvensional. Selain itu perlu didorong pemanfaatan teknologi untuk kegiatan UMKM dan koperasi agar mampu bersaing, teknologi digital

memberi peluang menciptakan pangsa pasar yang lebih luas dan meningkatkan produktivitas, perkembangan teknologi juga sangat mempengaruhi sektor pendidikan, inovasi pembelajaran dan pengajaran menggunakan *artificial intelligence* menjadikan transfer ilmu pengetahuan dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu, sehingga penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis.

3.2.2. Lingkup Nasional

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera

Pembangunan Tol Trans Sumatera merupakan major project nasional dalam rangka memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan manfaat (1) menurunkan ongkos angkut dengan pengurangan waktu tempuh Aceh-Lampung dari 48 jam menjadi 30 jam, (2) menjadi enabler bagi perkembangan 6 Kawasan Industri (KI Dumai, KI Jambi Kemingking, KI Tenayan, KI Way Pisang, KI Sei Mangkei, KI Tanjung Api-Api).

Ruas jalan tol Jambi – Rengat termasuk bagian pembangunan Tol Trans Sumatera yang melewati wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat pada 4 kecamatan, yaitu Kec. Muara Papalik (Desa Dusun Mudo), Kec. Tungkal Ulu (Kuala Dasal, Kel. Pelabuhan Dagang, desa Brasau, dan Desa Taman Raja), Kec. Tebing Tinggi (Kel. Tebing Tinggi), dan Kec. Batang Asam (desa Suban).

Dengan Interchange berada di Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian rest area salah satunya terdapat di Desa Brasau dan Desa Taman Raja Kecamatan Tungkal Ulu.

Keberadaan ruas jalan tol Jambi – Rengat yang melewati 4 kecamatan dalam Kab. Tanjung Jabung Barat akan memberikan dampak sosial ekonomi terhadap daerah, dampak positif bisa berupa peningkatan perekonomian masyarakat sekitar khususnya dan bagi Kab. Tanjung Jabung Barat.

Transformasi ekonomi Wilayah Sumatra*

Dalam RPJPN 2025-2045 terdapat kebijakan transformasi ekonomi Wilayah Sumatra diarahkan sebagai koridor ekonomi “Industri Bebas SDA dan Hub Ekonomi Biru Barat Indonesia”

diarahkan melalui kebijakan pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan yang dikembangkan pada beberapa kawasan strategis industri, antara lain kawasan strategis industri Medan-Dumai (klaster industri pengolahan sawit, kelapa kopi, karet dan hasil perkebunan lainnya, hilirisasi sumber daya mineral, dan pengolahan minyak dan gas bumi), kawasan strategis industri Bengkulu-Muara Enim-Palembang-Jambi (klaster industri hilirisasi batu bara dan pembangkitan energi listrik pada mulut tambang) dan kawasan strategis industri Batam-Bintan (Klaster industri pengolahan petrokimia, pengolahan material dan metalurgi, industri berbasis ICT)*.

3.2.3. Lingkup Regional

Perdagangan Bebas

Indonesia ikut dalam perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), adalah perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan sepuluh negara anggota ASEAN (Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam) dan enam negara mitranya (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru). Hal ini akan semakin memperluas dan memperdalam keterkaitan dan konektivitas ekonomi Indonesia dengan negara mitra di kawasan, membuka peluang dan menyediakan akses istimewa bagi bisnis di kawasan. RCEP mewakili 29.6% penduduk dunia, 30,2% GDP dunia, 27.4% perdagangan dunia serta 29.8%.

Bergabungnya Indonesia dalam RCEP berdampak pada peningkatan ekspor barang Indonesia yang diproyeksi sebesar 5,01 miliar dolar AS pada tahun 2040. Sebagai langkah implementasi RCEP, pada Pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat ke-29 pada tanggal 22 Maret 2023 disepakati untuk menugaskan Komite Bersama RCEP untuk segera menyelesaikan mekanisme pendanaan untuk pembentukan Unit Pendukung RCEP/RCEP Support Unit (RSU) di Sekretariat ASEAN yang merupakan salah satu capaian prioritas ekonomi Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.

3.2.4. Lingkup Daerah

Pelabuhan Roro Kuala Tungkal

Pelabuhan Ro-Ro adalah salah satu dermaga penyeberangan orang dan barang dengan menggunakan kapal Ro-Ro, ditahun 2023 terdapat tiga kapal Ro-Ro yang beroperasi melayani angkutan orang dan barang/kendaraan dari Kuala Tungkal menuju Dabo Singkep dan Batam.

Pelabuhan ro-ro dimanfaatkan sebagai jalur logistik hasil pertanian dan barang dagangan lainnya dari luar daerah seperti Kabupaten Kerinci, Padang, bahkan Medan untuk dipasarkan ke Dabo Singkep, Batam dan sekitarnya. Sejak mulai beroperasi di tahun 2017 sampai tahun 2023, pelabuhan ro-ro mengalami perkembangan baik dari frekwensi maupun jumlah penumpang dan barang.

Tabel. 3.4 Perkembangan Frekuensi Keberangkatan / Kedatangan Dalam Seminggu Pelabuhan Ro-ro Kuala Tungkal Tahun 2020 - 2023

No.	Rute	Frekwensi Keberangkatan/Kedatangan Dalam Seminggu Tahun..			
		2020	2021	2022	2023
1	Kuala Tungkal - Batam (P/P)	5 kali	6 kali	7 kali	7 kali
2	Kuala Tungkal - Dabo Singkep (P/P)	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

Tabel. 3.5 Perkembangan Jumlah Penumpang dan Kendaraan Pelabuhan Ro-Ro Kuala Tungkal Tahun 2020 - 2023

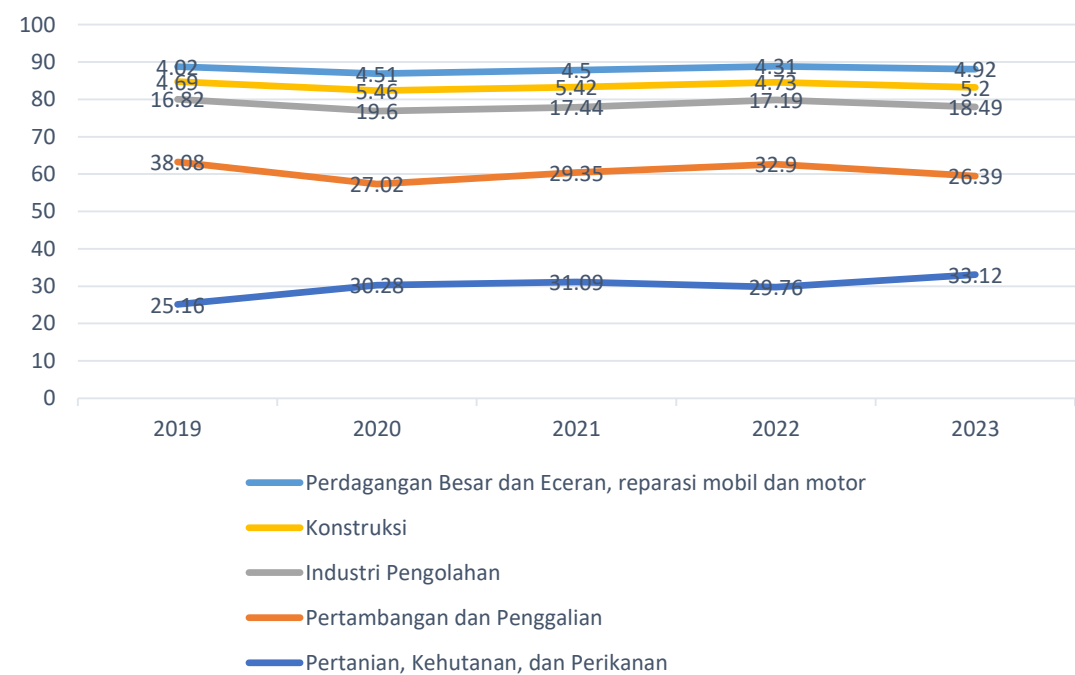
No.	Uraian	Jumlah Penunpang dan Kendaraan			
		2020	2021	2022	2023
1	Penumpang (orang)			3.620	5.033
	- Keberangkatan				
	- Kedatangan			3.800	5.602
2	Kendaraan (unit)		4.792	3.626	4.023
	- Keberangkatan				
	- Kedatangan		3.889	2.731	3.135

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

**Pemanfaatan Terus Menerus Cadangan Sumber Daya Alam
Pertambangan dan Penggalian**

sektor Pertambangan dan penggalian menjadi penyumbang terbesar Pembentukan PDRB Kab. Tanjung Jabung Barat yaitu dikisaran 26 sampai dengan 32 persen, salah satu penyebab meningkatnya peranan pertambangan dan penggalian adalah meningkatnya produksi dan kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut.

Gambar 3.5. Perkembangan Distribusi 5 Besar Lapangan Usaha PDRB Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 – 2023



Sumber : PDRB Kab. Tanjung Jabung Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

Kategori pertambangan dan penggalian mencakup pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam, dan pertambangan dan penggalian lainnya. Sektor pertambangan dan penggalian terutama sub sektor migas dianggap sebagai sektor yang sangat padat modal dengan dampak langsung yang rendah terhadap kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan seharusnya peran sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terutama sub sektor pertanian juga dianggap sebagai sektor primer lebih dominan karena secara struktur perekonomian Kab. Tanjung Jabung Barat sangat bergantung pada kegiatan ekonomi berbasis lahan.

Untuk menjaga pembangunan berkelanjutan di masa akan datang dimana migas suatu saat akan habis dan tidak mungkin lagi untuk diperbaharui atau dibuat ulang, berdasarkan Peraturan Daerah Prov. Jambi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Prov. Jambi Tahun 2019 – 2050, dengan asumsi produksi sebagaimana pada Tabel 3.6. Sumber Daya dan Cadangan Energi Fosil di Prov. Jambi, diperkirakan cadangan minyak bumi yang ada di wilayah Prov.Jambi cukup untuk 36 tahun kedepan, cadangan gas bumi cukup untuk 62 tahun kedepan, dan cadangan batubara cukup untuk 20 tahun kedepan.

Tabel 3.6. Sumber Daya dan Cadangan Energi Fosil di Prov. Jambi

No.	Jenis Energi	Satuan	Sumber Daya	Cadangan	Produksi / Tahun	Umur (tahun)
1	Minyak Bumi	Juta barel	-	228	6,31	36
2	Gas Bumi	BCF	-	5.517,80	89,00	62
3	Batu Bara	Juta Ton	2.224,90	94,30	6,78	20

Sumber : Perda Prov. Jambi No.13 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Tahun 2019 – 2050

Hilangnya sumber daya alam migas menyebabkan produktivitas secara umum akan menurun, produktivitas adalah 119 nomal pendorong terjadinya pembangunan. Sedangkan pertanian merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

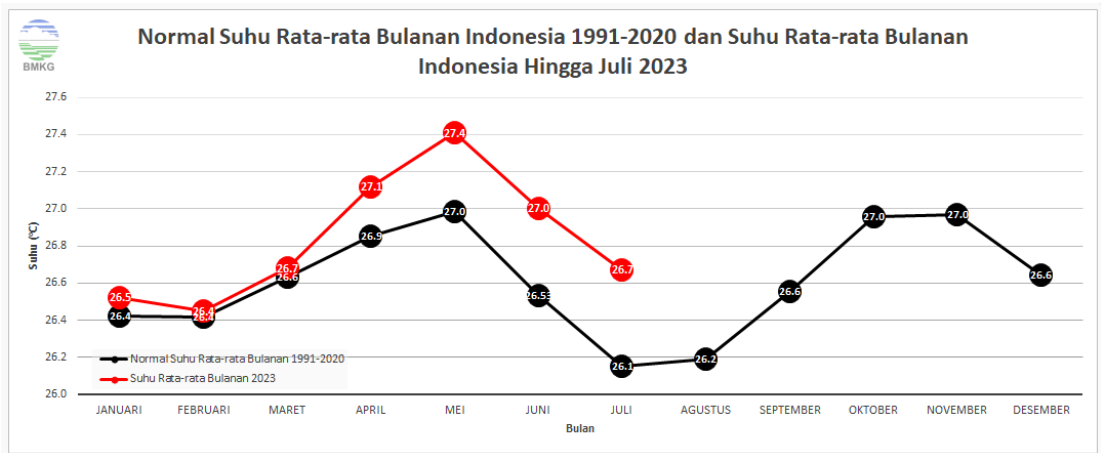
Perubahan Iklim

Perubahan iklim semakin menantang ditandai dengan peningkatan suhu global, disertai cuaca ekstrem, dan bencana, tidak hanya di Indonesia ataupun di daerah – daerah isu perubahan iklim juga menjadi perhatian utama banyak 119nomal – 119nomal di dunia. Isu perubahan iklim yang mengemuka adalah meningkatnya suhu bumi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Indonesia mencatat secara keseluruhan, tahun 2016 merupakan tahun terpanas untuk Indonesia, dengan nilai 119nomaly sebesar 0.8 °C sepanjang periode pengamatan 1981 hingga 2020, kemudian tahun 2020 menempati urutan kedua tahun terpanas dengan nilai 119nomaly sebesar 0.7 °C, selanjutnya tahun 2019 berada di peringkat ketiga dengan nilai 119nomaly sebesar 0.6 °C, dan tahun 2022 menempati

peringkat ke-6 tahun terpanas dunia.

Untuk wilayah Indonesia, berdasarkan analisis data suhu dari 118 stasiun pengamatan BMKG yang tersebar diseluruh 38 provinsi di Indonesia, pada bulan juli 2023 dengan suhu udara rata-rata adalah sebesar 26.7 °C. Normal suhu udara klimatologis untuk bulan Juli 2023 periode 1991-2020 di Indonesia adalah sebesar 26.2 °C (dalam kisaran normal 20.08 °C – 28.63 °C), berdasarkan nilai-nilai tersebut, 120nomaly suhu udara rata-rata pada bulan Juli 2023 menunjukkan 120nomaly positif dengan nilai sebesar 0.5 °C. Anaomali suhu udara Indonesia pada bulan Juli 2023 ini merupakan nilai 120 nomaly tertinggi ke-4 sepanjang periode pengamatan sejak 1981.

Gambar 3.6 Suhu Rata-rata Bulanan Indonesia



Sumber : www.bmkg.go.id

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Indonesia tersebut diatas menunjukkan tren peningkatan pemanasan, menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), jika suhu bumi naik melebihi ambang batas tersebut risiko cuaca ekstrem bisa meningkat signifikan, diiringi naiknya risiko kekeringan, gagal panen, kerusakan ekosistem, kebakaran hutan semakin intensif, badai semakin kuat serta naiknya permukaan air laut yang dapat mengancam kehidupan masyarakat pesisir.

Ditingkat internasional, skema penanganan perubahan iklim sudah dirancang seperti perjanjian global Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan Perjanjian Paris, dengan tiga aksinya yaitu mengurangi emisi, beradaptasi dengan dampak iklim, dan mendanai penyesuaian yang diperlukan. Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) menargetkan emisi gas rumah kaca harus dikurangi

menjadi nol bersih pada tahun 2050.

Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Meningkatnya jumlah penduduk berdampak kepada meningkatnya laju penggunaan sumberdaya alam, termasuk pemanfaatan ruang bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antara keduanya.



Daya dukung (*carrying capacity*) adalah daya tampung maksimum lingkungan untuk diberdayakan oleh manusia. Pertambahan jumlah penduduk akan diikuti pertambahan sarana prasarana, yang paling dasar adalah membutuhkan perluasan lahan sebagai wadah aktivitas untuk tumbuh dan berkembang. Apabila perkembangan tersebut tidak dikendalikan dengan baik maka dapat terjadi konversi lahan untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan fungsi dan daya dukungnya yang akan berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan.

Berdasarkan kajian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2021 mengenai daya dukung dan

daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) Kab. Tanjung Jabung Barat, terdapat dua isu pokok yang menjadi perhatian yaitu daya dukung jasa penyediaan air bersih dan daya dukung jasa penyedia pangan.

Daya Dukung Penyediaan Air

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam pemenuhan kebutuhan air manusia biasanya memanfaatkan sumber-sumber air yang berada di sekitar permukiman baik itu air alam dari sungai danau atau sumur maupun air bersih setelah mengalami proses pengolahan terlebih dahulu.

Tabel 3.7 Distribusi dan luas lahan penyediaan Air Bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat

N o.	Kecamat an	Kategori					
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Total
1	Kec. Batang Asam	25,022	22976,507	19553,643	33069,146	10922,604	86546,922
2	Kec.Betara	614,193	1850,896	1196,092	17563,106	17631,702	38855,989
3	Kec. Bram Itam	67,333	3048,391	3048,391	30205,998	24973,964	69637,927
4.	Kec. Kuala Betara	14,781	1,262	136,155	136,155	19943,395	22119,813
5.	Kec. Merlung	-	29,68	1787,767	21294,283	166,105	23277,835
6.	Kec. Muara Papalik	74,673	74,673	2084,069	32224,243	113,847	34625,41
7.	Kec. Pengabuan	309,331	3138,909	1633,441	14110,832	18891,077	38083,59
8.	Kec. Renah Mendaluh	6,495	2344,968	8071,8	15185,172	138,421	25746,856
9.	Kec. Seberang Kota	789,524	415,065	1193,504	2205,22	10211,995	14815,308
10	Kec.	463,96	3953,88	4240,09	8802,779	38432,25	55892,97

.	Senyera ng	3	2	6		6	6
11	Kec. Tebing Tinggi	518,39 5	901,405	2426,07 2	19427,20 3	11381,44 7	34654,52 2
12	Kec. Tungkal Ilir	1930,1 24	11,192	191,911	1650,855	9069,596	12853,67 8
13	Kec. Tungkal Ulu	554,37 6	460,075	1767,95	33118,80 9	4969,836	40871,04 6
	Kab. Tanjung Jabung Barat	5368,2 1	39260, 81	55624,7 41	230881, 866	166846, 245	497981, 872

Sumber : *Buku Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) Kab. Tanjung Jabung Barat, Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021*

Table 3.7 diatas menunjukkan dari 497.981,872 Ha luas (lahan) jasa penyediaan air bersih di Kab. Tanjung Jabung Barat sebesar 33,50 persen kategori sangat rendah, 46,36 persen kategori rendah, 11,17 persen kategori sedang, 7,88 persen kategori tinggi, dan 1,08 persen kategori sangat tinggi. Secara akumulasi jasa penyediaan air bersih dengan kategori rendah dan sangat rendah lebih besar (79,87 persen) dibanding kategori sedang, tinggi, dan sangat tinggi (20,13 persen).

Daya Dukung Penyediaan Pangan

Kebutuhan pokok bagi setiap mahluk hidup adalah berupa pangan yang digunakan sebagai nutrisi dalam mempertahankan hidup. Sebagian besar kebutuhan bahan pokok berupa pangan sudah disediakan oleh alam dalam bentuk yang beraneka ragam yang satu kesatuan ekosistem. Tinggi rendahnya suatu ekosistem menyediakan jasa ditentukan oleh tipe atau jenis ekoregion. Potensi utama sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah padi sawah, padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedele, kacang tanah, dan kacang hijau.

Tabel 3.8 Distribusi dan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Kecamatan	Kategori					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Kec. Batang Asam	977	1207	63427	18235	2701	86547
2	Kec.Betara	19	1346	25428	25428	6972	38856
3	Kec. Bram Itam	91	2951	33097	21196	12302	69638
4.	Kec. Kuala	25	923	16669	7	4496	22120

	Betara						
5.	Kec. Merlung	-	131	11568	11413	166	23278
6.	Kec. Muara Papalik	4	97	24178	10233	114	34625
7.	Kec. Pengabuan	2793	2565	15463	5300	11963	38084
8.	Kec. Renah Mendaluh	39	485	13632	11452	138	25747
9.	Kec. Seberang Kota	139	1784	12493	90	310	14815
10.	Kec. Senyerang	3939	2706	21134	2349	25765	55893
11.	Kec. Tebing Tinggi	57	1291	23530	6732	3044	34655
12.	Kec. Tungkal Ilir	65	293	11331	295	870	12854
13.	Kec. Tungkal Ulu	17	63	31140	8308	1343	40871
	Kab. Tanjung Jabung Barat	8164	15842	303090	100701	70185	497982

Sumber : *Buku Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) Kab. Tanjung Jabung Barat, Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021*

Tabel 3.8 diatas menunjukkan dari 497.982 Ha luas jasa ekosistem penyediaan pangan Kab. Tanjung Jabung Barat sebesar 14,09 persen kategori sangat rendah, 20,22 persen kategori rendah, 60,86 persen kategori sedang 3,18 persen kategori tinggi, dan 1,64 persen kategori sangat tinggi. Secara akumulasi jasa ekositem penyediaan pangan dengan kategori rendah dan sangat rendah (34,32 persen) masih dibawah kategori sedang, tinggi, dan sangat tinggi (65,68 persen), artinya secara umum Kab. Tanjung Jabung Barat masih mampu menyediakan jasa ekosistem penyediaan pangan.

Kesenjangan Pembangunan di beberapa kecamatan

Secara pengamatan terdapat tiga kecamatan yang masih cukup tertinggal dari sepuluh kecamatan lainnya dilihat dari sisi pembangunan, yaitu Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Renah Mendaluh. Adanya kesenjangan wilayah dalam Kab. Tanjung Jabung Barat tersebut dapat ditunjukkan dengan indeks gini terakhir pada tahun 2023, yaitu sebesar 0,316, angka tersebut menggambarkan adanya ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat.

Kesenjangan pembangunan atas tiga kecamatan tersebut diatas,

bisa dilihat dari ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan keberadaan industri. Ketersediaan infrastruktur dasar berupa jalan dan jembatan, jaringan telekomunikasi, perpipaan air bersih, dan jaringan listrik yang ada pada tiga kecamatan tersebut diatas masih minim, kemudian sarana dan prasarana pelayanan pendidikan seperti sekolah dasar dan sekolah tingkat lanjutan atas, dan pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan pustu belum cukup memadai. Majunya suatu daerah salah satunya diindikasikan dengan adanya industri yang berdiri di daerah tersebut, di Kec. Seberang Kota tidak terdapat industri, kemudian Kec. Kuala Betara hanya terdapat perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, dan Kecamatan Renah Mendaluh hanya terdapat satu pabrik pengolahan kelapa sawit.

Kecamatan Seberang Kota

Kecamatan Seberang Kotas secara geografis terletak di bagian Barat Daya Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Luas wilayah Kecamatan Seberang Kota adalah 121,29 Km². Desa/kelurahan yang berada di wilayah Kec. Seberang Kota adalah: Kelurahan Tungkal V, Desa Teluk Pulau Raya, Desa Kuala Kahar, Desa Harapan Jaya, Desa Mekar Alam, Desa Tungkal IV Desa, Desa Muara Seberang, Desa Kuala Baru.

Penduduk Kecamatan Seberang Kota tahun 2023 tercatat sebanyak 9.223 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 4.798* jiwa dan penduduk perempuan 4.324* jiwa. Perbandingan penduduk laki-laki dan penduduk perempuan (sex ratio) adalah 111,48 yang berarti bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan atau dari 111,1 jiwa penduduk laki terdapat 100 jiwa perempuan. Persebaran Penduduk di Kecamatan Seberang Kotatertcatat 99,79 jiwa per Km.

Di Kecamatan Seberang Kota terdapat 10 Sekolah Dasar, 799 siswa dan 84 guru, pada tingkat SLTP terdapat 3 buah, 131 siswa dan 23 orang guru. Sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Seberang Kota antara lain 1 puskesmas dan 10 puskesmas pembantu dan 31 unit posyandu. Sementara tenaga kesehatan tercatat sebanyak 5 orang dokter dan 42 orang bidan.

Sarana komunikasi dan transportasi yang baik akan mendukung perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kondisi sinyal operator seluler di sebagian besar wilayah Kecamatan Seberang Kota sudah cukup baik. Sebanyak 8 desa/kelurahan semua sudah terjangkau dengan kualitas baik.

Keberadaan sarana ekonomi di wilayah Kecamatan akan mendukung pembangunan dan perkembangan wilayah. Kecamatan Seberang Kota mempunyai pasar sebanyak 5 pasar yang berada di Teluk Pulau Raya, Kuala kahar, Harapan Jaya, Tungkal V dan Tungkal IV Desa. Koperasi di daerah perdesaan memiliki peran dan manfaat yang sangat besar bagi pembangunan desa khususnya dalam bidang perekonomian.

Sampai dengan saat ini, Kec. Seberang Kota belum mendapatkan layanan air bersih perpipaan (PDAM), semua desa dalam Kecamatan Seberang Kota belum bisa dilalui dengan kendaraan roda empat.

Kecamatan Kuala Betara

Kecamatan Kuala Betara adalah salah satu Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi dengan luas wilayah 214,21 Km². Desa/kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Kuala Betara adalah : Desa Sungai Gebar, Desa Sungai Dualap, Desa Betara Kanan, Kelurahan Betara Kiri, Desa Sungai Gebar Barat, Desa Sungai Dungun, Desa Tanjung Pasir, Desa Dataran Pinang, Desa Kuala Indah, dan Desa Suak Labu.

Penduduk Kecamatan Kuala Betara tahun 2023 tercatat sebanyak 14.026 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 7.094* jiwa dan penduduk perempuan 6.608* jiwa. Perbandingan penduduk laki-laki dan penduduk perempuan (sex ratio) adalah 107,4 yang berarti bahwa penduduk lakilaki lebih banyak dari penduduk perempuan atau dari 107 jiwa penduduk laki terdapat 100 jiwa perempuan. Persebaran Penduduk di Kecamatan Kuala Betara tercatat 94 jiwa per Km², sedangkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga tercatat sebesar 3 jiwa.

Di Kecamatan Kuala Betara terdapat 21 Sekolah Dasar/MI, 1.100 siswa dan 132 guru, pada tingkat SMP/ MTs terdapat 8 buah,

236 siswa dan 34 orang guru, sementara itu pada tingkat SMA/MAN tercatat sebanyak 8 buah, dan 87 orang siswa. Sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Kuala Betara antara lain 1 puskesmas dan 6 puskesmas pembantu dan 24 unit posyandu. Sementara tenaga kesehatan tercatat sebanyak 3 orang dokter 1 orang dokter gigi dan 37 orang bidan.

Sarana komunikasi dan transportasi yang baik akan mendukung perkembangan ekonomi suatu wilayah. Jumlah menara BTS di Kecamatan Kuala Betara ada 1 menara yang tersebar di beberapa desa. Kondisi sinyal operator seluler di sebagian besar wilayah Kecamatan Kuala Betara sudah cukup baik. Sebanyak 10 desa semua sudah terjangkau dengan kualitas baik.

Keberadaan sarana ekonomi di wilayah Kecamatan akan mendukung pembangunan dan perkembangan wilayah. Kecamatan Kuala Betara mempunyai pasar sebanyak 3 pasar yang berada di Betara Kiri, Tanjung Pasir, dan Sungai Dualap. Koperasi di daerah perdesaan memiliki peran dan manfaat yang sangat besar bagi pembangunan desa khususnya dalam bidang perekonomian.

Sama seperti Kec. Seberang Kota, Kec. Kuala Betara sampai saat ini juga belum mendapatkan layanan air bersih perpipaan (PDAM). Terdapat dua desa yaitu desa Dataran pinang dan desa Sei. Dualap belum bisa dilalui dengan kendaraan roda empat.

Kecamatan Renah Mendaluh

Kecamatan Renah Mendaluh secara geografis terletak di bagian Barat Daya Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Luas wilayah Kecamatan Renah Mendaluh adalah 473,72 Km². Desa/kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Renah Mendaluh adalah : Kelurahan Lubuk Kambing 2. Desa Sungai Rotan 3. Desa Cinta Damai 4. Desa Lampisi 5. Desa Pulau Pauh 6. Desa Rantau Benar 7. Desa Muara Danau 8. Desa Tanah Tumbuh 9. Desa Sungai Paur 10. Desa Bukit Bakar.

Penduduk Kecamatan Renah Mendaluh tahun 2023 tercatat sebanyak 16.250 jiwa, dengan persebaran penduduk 34 jiwa per Km², sedangkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga tercatat sebesar 4 jiwa.

Berdasarkan catatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.

Tanjung Jabung Barat, untuk kondisi sinyal di Kec. Renah Mendaluh hanya terdapat 1 desa dengan kondisi baik, selebihnya 1 kelurahan dan 8 desa dengan kondisi sinyal lemah. Untuk akses jalan desa yang dapat dilalui kendaraan roda empat di Kecamatan Renah Mendaluh sudah semua desa dapat dilalui kendaraan roda empat, namun terdapat beberapa desa dengan akses yang payah disebabkan kondisi jalan masih berupa tanah lokal seperti Desa Bukit Bakar, Desa Sungai Paur, dan sebagian Desa Tanah Tumbuh. Untuk akses jaringan air bersih, terdapat Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Lubuk Kambing berfungsi untuk mengaliri rumah tangga sekitar Kelurahan Lubuk Kambaing.

Perkembangan Teknologi

Teknologi yang terus berkembang pesat adalah teknologi digital seperti Artificial Intelligence (AI), Quantum computing, Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR), Blockchain, Internet of Things (IoT), selain teknologi digital teknologi Robotics, Autonomous Vehicles, dan Biotechnology terus berkembang. Dari sisi manfaat teknologi terdepan mempunyai dampak baik dan buruk, perkembangan digital memerlukan kesiapan adatif agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal untuk mendorong efektifitas dan efisiensi usaha produktivitas.

Penerapan Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru

Dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan keberlangsungan hidup dengan sejahtera, pemerintah menerapkan konsep ekonomi hijau pada industri besar maupun industri kecil, dengan mewajibkan industri menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dalam proses produksi. Selain konsep ekonomi biru pemerintah juga menerapkan konsep ekonomi biru untuk sektor perikanan dan kelautan guna menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan kesehatan ekosistem laut.

Kab. Tanjung Jabung Barat mempunyai industri besar dan sumber daya perikanan dan kelautan, banyak masyarakat bergantung pada industri baik sebagai pekerja maupun sebagai relasi industri, untuk daerah pesisir sebagian besar mata pencaharian masyarakat

bergantung pada hasil perikanan dan kelautan. Nelayan dan pelaku usaha sektor perikanan dan kelautan harus ikut terlibat dalam penerapan ekonomi biru .

B A B IV

VISI DAN MISI DAERAH

RPJPN 2025 – 2045

Indonesia mencita – citakan Indonesia Emas 2045 yang tercermin dalam RPJPN 2025 – 2045, rumusan visi Indonesia Emas 2045 mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya tampung, dan daya dukung serta pencapaian pembangunan sebelumnya, sehingga visi RPJPN 2025 – 2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Kinerja pencapaian visi Indonesia Emas 2045 diukur dengan lima sasaran visi yaitu (1) Pendapatan perkapita setara negara maju, kemiskinan nol persen dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju zero net emission.

Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 tersebut ditetapkan 8 misi (agenda) pembangunan, melalui pendekatan transformasi menyeluruh disegala bidang pembangunan. Fokus utama transformasi meliputi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Transformasi tersebut agar berjalan baik harus ditopang dengan landasan stabilitas nasional yang kuat yaitu (1) Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, dan (2) Ketahanan sosial budaya dan ekologi.

4.1. VISI

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jabung pada masa lalu dan saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki dan amanat UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025 – 2045 Provinsi Jambi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045, maka Visi Pembangunan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2045 adalah:

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, SEJAHTERA, MERATA, DAN BERKELANJUTAN

Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju ditunjukkan dengan rata – rata tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ,didukung sektor industri yang produktif, fasilitas pelayanan publik, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang baik, dimana teknologi mempunyai peranan besar pada semua sektor tersebut diatas.

Sejahtera ditunjukkan dengan masyarakat mempunyai tingkat pendapatan yang cukup tinggi, dengan mayoritas masyarakat dalam kondisi sehat, berpendidikan, dan damai.

Merata ditunjukkan dengan pembangunan disemua bidang yang berkeadilan di semua wilayah dari Ibu kota kabupaten sampai ke desa – desa. Masyarakat mempunyai kesetaraan akses yang hampir sama terhadap pendidikan dan kesehatan, serta peluang ekonomi.

Berkelanjutan ditunjukkan Pembangunan daerah dapat terus berlanjut dengan di topang keterseidaan sumber daya dan terjaga dalam jangka panjang.

Visi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dari visi Pembangunan Nasional Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2025–2045 yang kesemuanya secara sistematis dan sinergis diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Visi RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tujuh sasaran yaitu (1) mencapai pendapatan per kapita setara dengan kabupaten/kota maju, (2) meningkatnya daya saing daerah (3) menurunnya kemiskinan dan ketimpangan, (4) Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai akses utama distribusi logistik untuk wilayah Provinsi Jambi melalui jalur laut ke luar daerah (5) meningkatnya daya saing manusia, (6) menurunnya intensitas emisi GRK menuju net zero emission.

Tabel 4.1
Sasaran Visi Dan Target (Tahun 2045)

No	Sasaran	Indikator	Target				
			Baseline Tahun 2025	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
1.	Mencapai Pendapatan Per Kapita Setara Dengan Kabupaten/Kota Maju	PDRB per kapita atas dasar harga berlaku	154,57 juta rupiah	246,05 - 258,62 juta rupia	337,53 – 362,68 juta rupiah	429,01 – 466,74 juta rupiah	520,50 – 570,80 juta rupiah
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	15,26	22,06	28,85	35,65	42,44
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	19 %	19,50 %	20,50 %	21,00 %	25 %
2	Menurunnya Kemiskinan dan Ketimpangan	Angka kemiskinan	9,0 %	8,00 %	5,00 %	2,00 %	0,565 %
		Indeks Gini	0,300	0,287	0,265	0,242	0,220
		Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)	17,35	17	17	17	17
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,36- 4,5	4,59 – 4,89	5,06 – 5,29	5,06 – 5,68	5,3 – 6,07
3	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2,90	3,30	3,70	4,10	4,50
4	Meningkatnya Daya Saing Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72,78	75,78	77,78	80,28	82,78
5	Menurunnya Intensitas Emisi GRK Menuju Net Zero Emission	Intensitas Emisi GRK (ton CO2e)	59.589,77	56.640,12	53.690,46	50.740,81	47.791,15
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,05	74,91	76,77	78,63	80,50

4.2. MISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut dan mendukung pencapaian visi RPJPN 2025 - 2045 ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan inovatif. Misi ini untuk mewujudkan transformasi sosial melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas untuk semua masyarakat, pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, penguasaan teknologi, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar.
2. Mewujudkan ekonomi maju dan berkelanjutan. Misi ini untuk mewujudkan transformasi ekonomi melalui hilirisasi komoditi unggulan, optimalisasi keunggulan komparatif masing – masing wilayah didukung dengan inovasi dan penguasaan teknologi. Dengan menerapkan ekonomi hijau dan ekonomi biru diharapkan pembangunan dapat berkelanjutan.
3. Mewujudkan pemerintahan yang integritas dan adaptif. Misi ini untuk mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan melalui regulasi berkualitas dan adaptif, birokrasi yang berintegritas dan adaptif, dan pelayanan publik yang berkualitas, mudah, cepat dan terjangkau.
4. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi daerah. Misi ini untuk mendukung memantapkan supremasi hukum, stabilitas, demokrasi dan kepemimpinan Indonesia melalui penegakan peraturan perundang – undangan akan menciptakan kondisi sosial yang tenteram dan tertib, masyarakat merasa nyaman beraktivitas dan kondusif bagi investor untuk berinvestasi di Kab. Tanjung Jabung Barat.
5. Mewujudkan ketangguhan sosial budaya dan ekologi. Misi ini untuk mendukung memantapkan ketahanan sosial budaya dan

ekologi. Melalui penguatan individu, keluarga, komunitas masyarakat, dan lingkungan.

6. Mewujudkan pemerataan pembangunan. Misi ini untuk mendukung pembangunan kewilayahan melalui pemerataan dan keadilan pembangunan untuk mencapai transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.
7. Terpenuhi sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dengan akses yang sama bagi semua terhadap berbagai pelayanan sosial dan sarana dan prasarana ekonomi.
8. Kestinambungan pembangunan untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas. Kestinambungan pembangunan diwujudkan dengan kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan. Kaidah pelaksanaan yang efektif melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, mekanisme perubahan dan komunikasi publik. Pembiayaan pembangunan melalui peningkatan kapasitas pembiayaan publik, peningkatan kapasitas pembiayaan nonpublik dan manajemen investasi berkualitas.

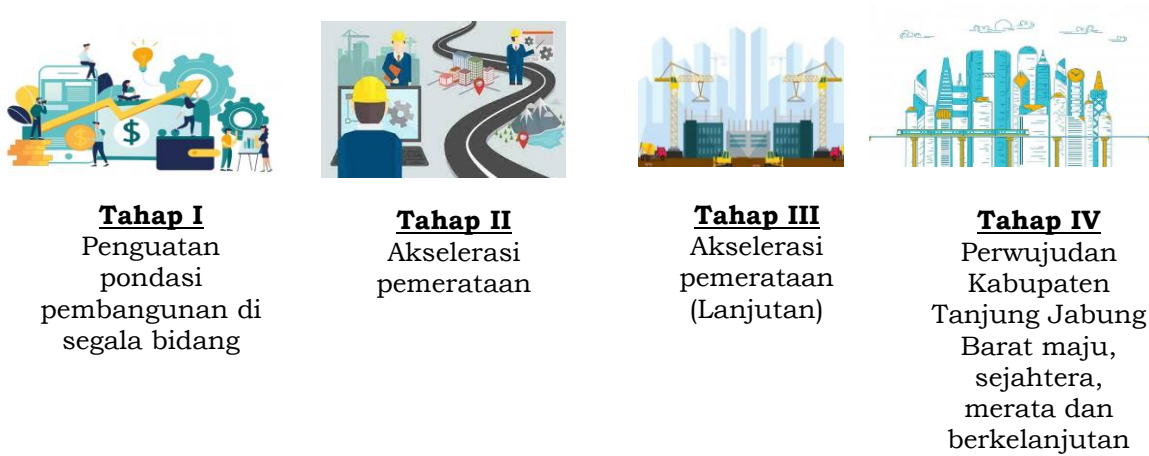
BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Sejahtera, Merata, Dan Berkelanjutan yang merupakan bagian integral dari tujuan pembangunan Propinsi Jambi dan pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 akan di tahapkan lima tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (RPJMD).

Gambar. 5.1
Pentahapan Impelementasi RPJPD 2025-2045



5.1.1. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke I (RPJMD 2025 - 2029)

Pada intinya, tahap pertama ini adalah tahap persiapan dan penataan modal dasar dalam mewujudkan visi RPJPD. Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada dasarnya sudah melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan sejak awal terbentuknya. Oleh karenanya, pemahaman pembentukan modal dasar pembangunan dalam konteks ini, adalah persiapan dan pembentukan modal dasar pembangunan guna mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten

Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045 yaitu Kab. Tanjung Jabung Maju, Sejahtera, Merata, Dan Berkelanjutan.

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJMD tahap I ditujukan untuk penguatan pondasi pembangunan di segala bidang yang ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Sejahtera, Merata, Dan Berkelanjutan. Kab. Tanjung Jabung Barat yang maju dan sejahtera ditandai standar hidup penduduknya yang relatif tinggi dan makmur, ditambah dengan kemajuan teknologi serta pertumbuhan ekonomi meningkat.

Standar hidup penduduk yang relatif tinggi dan makmur dapat ditunjukkan dengan pendapatan perkapita yang tinggi setiap tahunnya, memiliki akses jalan yang bagus dan fasilitas – fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, dengan tingkat pengangguran yang sangat rendah, keamanan yang terjamin, kemajuan yang didukung dengan riset dan pengembangan serta inovasi, dan mempunyai peran dan pengaruh di Prov. Jambi, dan kawasan SIJORI.

Kab. Tanjung Jabung Barat yang merata dan berkelanjutan ditandai dengan tersedianya akses transportasi, akses pendidikan, akses kesehatan, akses telekomunikasi, akses air bersih sampai ke desa. Dimana setiap desa mendapatkan pembangunan yang sama. Pemerataan pembangunan untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial dan memastikan pertumbuhan ekonomi secara adil.

Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan ditandai dengan proses pembangunan akan berlangsung secara berkesinambungan, dan lingkungan hidup masih mempunyai kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar

dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Pada tahap RPJMD 2025 – 2029 ditarget pertumbuhan ekonomi diakhir periode mencapai angka 5 persen, menitikberatkan terutama pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hilirisasi pengolahan skala besar komoditi pinang dan kelapa dalam untuk meningkatkan daya tawar komoditi tersebut, Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan. penggiatan dan pemanfaatan inovasi terutama dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, pembekalan tenaga kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran, mendukung penerapan ekonomi hijau bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan, pemenuhan akses telekomunikasi sampai ke desa untuk mendukung percepatan perkembangan desa, perluasan cakupan air bersih, penanganan stunting dan pengendalian sfh stunting, menurunkan jumlah masyarakat miskin, meningkatkan kapasitas akses konektivitas desa-desa, desa-kota, Kab. Tanjung Jabung Barat – kabupaten tetangga, meningkatkan pembangunan di wilayah tiga kecamatan yaitu Kec. Seberang Kota, Kec. Kuala Betara, dan Kec. Renah Mendaluh guna mengejar ketertinggalan dari kecamatan – kecamatan lainnya, pemanfaatan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan daya saing UMKM, melakukan upaya – upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, melakukan upaya – upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan penghematan energi, perekrutan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guna memenuhi kebutuhan pegawai pemerintah daerah, implementasi perencanaan berbasis kinerja, penyelesaian konflik sosial dan konflik pertanahan, Memajukan pariwisata dengan pemanfaatan budaya, UMKM dan daya tarik olahraga. Peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan. Pengembangan bantuan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat yang lebih integrasi dan adaptif terhadap bencana, dan perubahan iklim. Beradaptasi dengan konsekuensi iklim guna

melindungi rumah, bisnis, mata pencaharian, infrastruktur, dan ekosistem alam.

Dengan arah kebijakan :

- Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
- Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal
- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan primer serta mengembangkan program komunikasi, Informasi dan edukasi untuk mencapai kemandirian kesehatan
- Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
- Penguatan sumber daya kesehatan dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat untuk kemandirian
- Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
- Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
- Peningkatan pendidikan kesehatan dan informasi kesehatan dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat yang mandiri.
- Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas
- Penguatan Sumber Daya Manusia kesehatan yang kompeten dan peningkatan sarana prasarana sesuai standar untuk mendukung pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat.
- Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
- Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
- Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
- Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
- Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).

- Peningkatan layanan literasi melalui digitalisasi perpustakaan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat melalui penguatan literasi dan pemerataan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- Penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan yang merata dan berkeadilan, peningkatan efektivitas pemberian subsidi pendidikan, serta peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran untuk membentuk manusia produktif.
- Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah
- Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
- Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
- Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)..
- Penguatan pembelajaran berbasis digital melalui peningkatan kapasitas pendidik, peserta didik dan orang tua, serta penerapan pedagogi modern.
- Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
- Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
- Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
- Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
- Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
- Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.
- Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).

- Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.
- Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.
- Revitalisasi pendidikan nonformal serta penguatan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan berbasis komunitas, dan life skills
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.
- Penciptaan lapangan kerja menengah ke atas di sektor-sektor produktif (termasuk lapangan kerja hijau, biru dan digital)
- Pemenuhan dan penyiapan sarana prasarana dan SDM pengawas ketenagakerjaan yang berkompeten, profesional dan adaptif teknologi.
- Penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, termasuk tenaga kerja rentan.
- Mendorong inovasi daerah dan produktivitas tenaga kerja
- Percepatan penyediaan informasi pasar kerja yang mutakhir, kredibel, mudah diakses dan dengan jangkauan luas
- Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal dan rentan dengan memanfaatkan sistem regsosek agar tepat sasaran, tepat guna dan efisien
- Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
- Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.
- Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
- Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan

- Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
- Pengembangan kawasan sentra produksi pangan sebagai sumber ekonomi dan proses digitasi pertanian serta pembangunan teknologi pertanian yang berkualitas
- Optimalisasi pemanfaatan persetujuan perhutanan sosial
- Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
- Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
- Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.
- Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.
- Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
- Pengelolaan Sumber Daya Pertanian yang berkualitas dan pengembangan teknologi tepat guna
- Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian.
- Penerapan dan Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer

yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.

- Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.
- Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.
- Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.
- Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.
- Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.
- Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
- Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Bengkulu-Muaraenim-Palembang-Jambi (klaster industri hilirisasi batu bara, industri hilirisasi bioproduct, dan pembangkitan energi listrik).
- Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)
- Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses

telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.

- Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan.
- Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)
- Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.
- Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.
- Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.
- Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.
- Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi public massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.
- Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan system transportasi publik massal di kawasan perkotaan.
- Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.
- City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.

- Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.
- Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
- Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
- Peningkatan partisipasi, prestasi, dan pengelolaan keolahragaan.
- Penataan kelembagaan dan regulasi dalam peningkatan kualitas pemuda dan olahraga
- Pengembangan kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda berbasis digitasi teknologi
- Penataan sistem pembinaan pemuda dan olahraga yang terintegrasi dan berkesinambungan
- Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis.
- Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.
- Memanfaatkan keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Jambi untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik.
- Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global.
- Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.
- Penerapan ekonomi hijau dan biru
- Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.
- Mendorong penggunaan kendaraan listrik dan penyiapan infrastruktur pendukungnya
- Penyediaan angkutan massal
- Pendayagunaan dan pengelolaan SDA yang berkualitas
- Penerapan Teknologi Tepat Guna
- Penguatan infrastruktur teknologi

- Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
- Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
- Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
- Meningkatkan pertumbuhan Koperasi modern dan UKM naik kelas serta meningkatkan nilai tambah produk melalui industrialisasi KUKM
- Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual, penumbuhan start up kreatif dan digital, serta penguatan kelembagaan ekonomi kreatif
- Peningkatan produktivitas BUMD.
- Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.
- Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.
- Hilirisasi sumberdaya alam unggulan
- Penyiapan Infrastruktur dan SDM Industri
- Penguatan ekosistem Industrialisasi
- Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.

- Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
- Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah
- Pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
- Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
- Peningkatan kualitas pengelolaan Diklat
- Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
- Terwujudnya integrasi data kependudukan
- Penguatan integritas partai politik.
- Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
- Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
- optimalisasi PAD dan sumber pendanaan non pemerintah
- Penguatan pengendalian inflasi daerah.
- Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
- Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
- Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.

- Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.
- Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
- Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
- Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
- Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
- Penetapan upah kabuapten berbasis produktivitas dan berkeadilan
- Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
- Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
- Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.
- Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.
- Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)
- Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.
- Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan,

industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.

- Penggunaan kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga berbasis listrik
- Peningkatan sarana prasarana perhubungan
- Mendukung percepatan pelaksanaan reforma agraria.
- Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas peneliti, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
- Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
- Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.
- Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
- Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas nasional.
- Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

5.1.2. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke II (RPJMD 2030 - 2034)

Pada tahap kedua, dengan telah menguatnya pondasi pembangunan di RPJMD Tahap I, kemudian berdasarkan pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJMD 2025 - 2029, maka RPJMD ke II ditujukan untuk percepatan pemerataan pembangunan, dengan pertumbuhan ekonomi ditargetkan rata-rata atau sama dengan 5 % pertahun, dengan menekankan pada peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi, peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan, meningkatkan pembangunan sarana prasarana pendukung perkembangan Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Kuala Betara

dan Kecamatan Renah Mendaluh guna mempercepat kesetaraan pembangunan dengan kecamatan – kecamatan lainnya, menggalakkan ekonomi hijau dan ekonomi biru, memperluas pemanfaatan teknologi digital di berbagai bidang penyelenggaraan pemerintah daerah dan untuk kemajuan UMKM, meningkatkan kegiatan dan pemanfaatan inovasi, peningkatan kompetensi ASN dan PPPK, penguatan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, penguatan aksi penurunan emisi GRK dan penghematan energi, peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, percepatan penyelesaian konflik sosial dan konflik pertanahan, peningkatan kualitas budaya, mendorong berkembangnya hilirisasi skala besar komoditi pinang dan kelapa dalam, memperluas ruang lingkup pembekalan tenaga kerja untuk dapat bekerja di banyak bidang, peningkatan penerapan ekonomi hijau dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, penguatan akses telekomunikasi diseluruh desa, perluasan cakupan air bersih, peningkatan penanganan stunting dan pengendalian resiko stunting, percepatan penurunan jumlah masyarakat miskin dan melaksanakan upaya pencegahan, meningkatkan kapasitas akses – akses konektivitas desa – desa, desa – kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Kabupaten tetangga. Memajukan pariwisata dengan pemanfaatan budaya, UMKM dan daya tarik olahraga. Peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan.

Dengan arah kebijakan :

- Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
- Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal
- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan primer serta mengembangkan program komunikasi, Informasi dan edukasi untuk mencapai kemandirian kesehatan
- Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
- Penguatan sumber daya kesehatan dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat untuk kemandirian

- Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
- Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
- Peningkatan pendidikan kesehatan dan informasi kesehatan dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat yang mandiri.
- Penguatan Sumber Daya Manusia kesehatan yang kompeten dan peningkatan sarana prasarana sesuai standar untuk mendukung pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat.
- Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
- Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
- Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
- Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
- Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
- Peningkatan layanan literasi melalui digitalisasi perpustakaan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat melalui penguatan literasi dan pemerataan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- Penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan yang merata dan berkeadilan, peningkatan efektivitas pemberian subsidi pendidikan, serta peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran untuk membentuk manusia produktif.
- Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah
- Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
- Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

- Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
- Penguatan pembelajaran berbasis digital melalui peningkatan kapasitas pendidik, peserta didik dan orang tua, serta penerapan pedagogi modern.
- Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
- Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
- Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
- Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
- Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
- Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.
- Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).
- Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.
- Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.
- Revitalisasi pendidikan nonformal serta penguatan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan berbasis komunitas, dan life skills.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.
- Penciptaan lapangan kerja menengah ke atas di sektor-sektor produktif (termasuk lapangan kerja hijau, biru dan digital)
- Pemenuhan dan penyiapan sarana prasarana dan SDM pengawas ketenagakerjaan yang berkompeten, profesional dan adaptif teknologi.

- Penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, termasuk tenaga kerja rentan.
- Mendorong inovasi daerah dan produktivitas tenaga kerja
- Penyediaan informasi pasar kerja yang mutakhir, kredibel, mudah diakses dan dengan jangkauan luas.
- Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal dan rentan dengan memanfaatkan sistem regsosek agar tepat sasaran, tepat guna dan efisien
- Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
- Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.
- Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
- Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan
- Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
- Pengembangan kawasan sentra produksi pangan sebagai sumber ekonomi dan proses digitasi pertanian serta pembangunan teknologi pertanian yang berkualitas.
- Optimalisasi pemanfaatan persetujuan perhutanan sosial
- Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
- Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
- Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas,

pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.

- Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.
- Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
- Pengelolaan Sumber Daya Pertanian yang berkualitas dan pengembangan teknologi tepat guna
- Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian.
- Penerapan dan Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.
- Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.
- Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.
- Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.

- Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.
- Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.
- Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
- Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Bengkulu-Muaraenim-Palembang-Jambi (klaster industri hilirisasi batu bara, industri hilirisasi bioproduct, dan pembangkitan energi listrik).
- Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)
- Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.
- Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan.
- Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)

- Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.
- Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.
- Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.
- Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.
- Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi public massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.
- Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan system transportasi publik massal di kawasan perkotaan.
- Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.
- City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.
- Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.
- Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
- Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
- Peningkatan parstisipasi, prestasi, dan pengelolaan keolahragaan.
- Penataan kelembagaan dan regulasi dalam peningkatan kualitas pemuda dan olahraga
- Pengembangan kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda berbasis digitasi teknologi
- Penataan sistem pembinaan pemuda dan olahraga yang terintegrasi dan berkesinambungan

- Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis.
- Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.
- Memanfaatkan keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Jambi untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik.
- Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global.
- Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.
- Penerapan ekonomi hijau dan biru
- Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.
- Mendorong penggunaan kendaraan listrik dan penyiapan infrastruktur pendukungnya
- Penyediaan angkutan massal
- Pendayagunaan dan pengelolaan SDA yang berkualitas
- Penerapan Teknologi Tepat Guna
- Penguatan infrastruktur teknologi
- Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
- Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
- Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
- Meningkatkan pertumbuhan Koperasi modern dan UKM naik kelas serta meningkatkan nilai tambah produk melalui industrialisasi KUKM
- Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual, penumbuhan start up kreatif dan digital, serta penguatan kelembagaan ekonomi kreatif

- Peningkatan produktivitas BUMD.
- Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.
- Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).
- Hilirisasi sumberdaya alam unggulan
- Penyiapan Infrastruktur dan SDM Industri
- Penguatan ekosistem Industrialisasi
- Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.
- Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
- Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah
- Pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
- Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
- Peningkatan kualitas pengelolaan Diklat

- Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
- Penerapan manajemen resiko perencanaan dan pengendalian pembangunan
- Regulasi berbasis teknologi informatif
- Terwujudnya integrasi data kependudukan
- Penguatan integritas partai politik.
- Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
- Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
- optimaliasi PAD dan sumber pendanaan non pemerintah
- Penguatan pengendalian inflasi daerah.
- Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
- Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
- Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.
- Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.
- Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
- Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
- Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.

- Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
- Penetapan upah kabuapten berbasis produktivitas dan berkeadilan
- Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
- Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
- Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.
- Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.
- Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)
- Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.
- Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.
- Penggunaan kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga berbasis listrik
- Peningkatan sarana prasarana perhubungan
- Mendukung percepatan pelaksanaan reforma agraria.
- Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas peneliti, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.

- Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
- Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.
- Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
- Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas nasional.
- Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

5.1.3. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke III (RPJMD 2035 - 2039)

Pada tahap ketiga, dengan telah menguatnya pondasi pembangunan di RPJMD Tahap II, kemudian berdasarkan pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJMD 2030 - 2034, maka RPJMD ke III sebagai lanjutan percepatan pemerataan pembangunan, dengan pertumbuhan ekonomi ditargetkan rata-rata atau sama dengan 5 % pertahun, dengan menekankan pada peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi, peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan, meningkatkan pembangunan sarana prasarana pendukung perkembangan Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Renah Mendaluh guna mempercepat kesetaraan pembangunan dengan kecamatan – kecamatan lainnya, menggalakkan aksi ekonomi hijau dan ekonomi biru, memperluas pemanfaatan teknologi digital di berbagai bidang penyelenggaraan pemerintah daerah dan untuk kemajuan UMKM, meningkatkan penggiatan dan pemanfaatan inovasi, peningkatan kompetensi ASN dan PPPK, penguatan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, implementasi aksi penurunan emisi GRK dan penghematan energi, peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, percepatan penyelesaian konflik sosial dan konflik pertanahan, peningkatan kualitas budaya, mendorong berkembangnya hilirisasi skala besar komoditi pinang dan kelapa dalam, memperluas ruang

lingkup pembekalan tenaga kerja untuk dapat bekerja di banyak bidang, peningkatan penerapan ekonomi hijau dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, penguatan akses telekomunikasi diseluruh desa, perluasan cakupan air bersih, peningkatan penanganan stunting dan pengendalian resiko (calon) stunting, percepatan penurunan jumlah masyarakat miskin dan melaksanakan upaya pencegahan, meningkatkan kapasitas akses – akses konektivitas desa – desa, desa – kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Kabupaten tetangga. Pengembangan bantuan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat yang lebih integrasi dan adaptif terhadap bencana, dan perubahan iklim. Beradaptasi dengan konsekuensi iklim guna melindungi rumah, bisnis, mata pencaharian, infrastruktur, dan ekosistem alam. Memajukan pariwisata dengan pemanfaatan budaya, UMKM dan daya tarik olahraga. Peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan.

Dengan arah kebijakan :

- Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
- Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal
- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan primer serta mengembangkan program komunikasi, Informasi dan edukasi untuk mencapai kemandirian kesehatan
- Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
- Penguatan sumber daya kesehatan dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat untuk kemandirian
- Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
- Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.

- Peningkatan pendidikan kesehatan dan informasi kesehatan dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat yang mandiri.
- Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas
- Penguatan Sumber Daya Manusia kesehatan yang kompeten dan peningkatan sarana prasarana sesuai standar untuk mendukung pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat.
- Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
- Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
- Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
- Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
- Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
- Peningkatan layanan literasi melalui digitalisasi perpustakaan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat melalui penguatan literasi dan pemerataan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- Penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan yang merata dan berkeadilan, peningkatan efektivitas pemberian subsidi pendidikan, serta peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran untuk membentuk manusia produktif.
- Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah
- Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
- Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
- Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).

- Penguatan pembelajaran berbasis digital melalui peningkatan kapasitas pendidik, peserta didik dan orang tua, serta penerapan pedagogi modern.
- Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
- Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
- Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
- Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
- Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
- Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.
- Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).
- Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.
- Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.
- Revitalisasi pendidikan nonformal serta penguatan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan berbasis komunitas, dan life skills.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.
- Penciptaan lapangan kerja menengah ke atas di sektor-sektor produktif (termasuk lapangan kerja hijau, biru dan digital)
- Pemenuhan dan penyiapan sarana prasarana dan SDM pengawas ketenagakerjaan yang berkompeten, profesional dan adaptif teknologi.
- Penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, termasuk tenaga kerja rentan.
- Mendorong inovasi daerah dan produktivitas tenaga kerja
- Penyediaan informasi pasar kerja yang mutakhir, kredibel, mudah diakses dan dengan jangkauan luas.

- Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal dan rentan dengan memanfaatkan sistem regsosek agar tepat sasaran, tepat guna dan efisien
- Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
- Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.
- Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
- Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan
- Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
- Pengembangan kawasan sentra produksi pangan sebagai sumber ekonomi dan proses digitasi pertanian serta pembangunan teknologi pertanian yang berkualitas.
- Optimalisasi pemanfaatan persetujuan perhutanan sosial
- Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
- Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
- Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.
- Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.

- Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
- Pengelolaan Sumber Daya Pertanian yang berkualitas dan pengembangan teknologi tepat guna
- Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian.
- Penerapan dan Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.
- Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.
- Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.
- Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.
- Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.
- Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.

- Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
- Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Bengkulu-Muaraenim-Palembang-Jambi (klaster industri hilirisasi batu bara, industri hilirisasi bioproduct, dan pembangkitan energi listrik).
- Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)
- Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.
- Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan.
- Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)
- Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.
- Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.

- Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.
- Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.
- Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi public massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.
- Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan system transportasi publik massal di kawasan perkotaan.
- Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.
- City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.
- Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.
- Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
- Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
- Peningkatan parstisipasi, prestasi, dan pengelolaan keolahragaan.
- Penataan kelembagaan dan regulasi dalam peningkatan kualitas pemuda dan olahraga
- Pengembangan kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda berbasis digitasi teknologi
- Penataan sistem pembinaan pemuda dan olahraga yang terintegrasi dan berkesinambungan
- Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis.
- Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.

- Memanfaatkan keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Jambi untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik.
- Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global.
- Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.
- Penerapan ekonomi hijau dan biru
- Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.
- Mendorong penggunaan kendaraan listrik dan penyiapan infrastruktur pendukungnya
- Penyediaan angkutan massal
- Pendayagunaan dan pengelolaan SDA yang berkualitas
- Penerapan Teknologi Tepat Guna
- Penguatan infrastruktur teknologi
- Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
- Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
- Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
- Meningkatkan pertumbuhan Koperasi modern dan UKM naik kelas serta meningkatkan nilai tambah produk melalui industrialisasi KUKM
- Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual, penumbuhan start up kreatif dan digital, serta penguatan kelembagaan ekonomi kreatif
- Peningkatan produktivitas BUMD.
- Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.

- Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).
- Hilirisasi sumberdaya alam unggulan
- Penyiapan Infrastruktur dan SDM Industri
- Penguatan ekosistem Industrialisasi
- Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.
- Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
- Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah
- Pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
- Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
- Peningkatan kualitas pengelolaan Diklat
- Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.

- Penerapan manajemen resiko perencanaan dan pengendalian pembangunan
- Regulasi berbasis teknologi informatif
- Terwujudnya integrasi data kependudukan
- Penguatan integritas partai politik.
- Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
- Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
- optimalisasi PAD dan sumber pendanaan non pemerintah
- Penguatan pengendalian inflasi daerah.
- Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
- Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
- Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.
- Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.
- Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
- Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
- Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
- Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan

dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.

- Penetapan upah kabuapten berbasis produktivitas dan berkeadilan
- Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
- Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
- Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.
- Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.
- Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)
- Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.
- Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.
- Penggunaan kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga berbasis listrik
- Peningkatan sarana prasarana perhubungan
- Mendukung percepatan pelaksanaan reforma agraria.
- Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas peneliti, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
- Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.

- Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.
- Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
- Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas nasional.
- Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

5.1.4. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke IV (RPJMD 2040 - 2045)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD 2035 - 2039, maka arah kebijakan pembangunan lima tahunan yang ke IV ini adalah perwujudan Kab. Tanjung Jabung Barat maju, sejahtera, merata, dan berkelanjutan, dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga yaitu dengan rata – rata 5 persen pertahun. RPJMD 2040 – 2045 menjadi rencana pembangunan lima tahunan yang terakhir dari periode RPJPD Kab. Tanjung Jabung Barat 2025 – 2045, maka tahap ini difokuskan untuk pemerataan kualitas SDM dalam penguasaan ilmu dan teknologi bagi masyarakat, penerapan inovasi bidang pertanian, peternakan, dan perikanan guna mempertahankan produktivitas, mewujudkan kesetaraan kemajuan Kec. Seberang Kota, Kec. Kuala Betara, dan Kec. Renah Mendaluh sama seperti kecamatan – kecamatan lainnya. Implementasi ekonomi hijau dan ekonomi biru, penguatan teknologi digital di berbagai bidang penyelenggaraan pemerintah daerah dan untuk kemajuan UMKM, penggiatan dan pemanfaatan inovasi, ASN dan PPPK yang profesional, penguatan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, penguatan aksi penurunan emisi GRK dan penghematan energi, peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, menuntaskan penyelesaian konflik sosial dan pertanahan serta melakukan upaya pencegahan konflik sosial dan konflik pertanahan, mempertahankan budaya daerah, penguatan hilirisasi skala besar komoditi pinang dan kelapa dalam agar tetap berkembang, mengadakan sistem pembekalan tenaga kerja yang sampai dengan penempatan atau dapat mandiri,

mempertahankan kualitas lingkungan hidup, penguatan akses telekomunikasi diseluruh desa, perluasan cakupan air bersih, peningkatan penanganan stunting dan pengendalian resiko (calon) stunting, penuntasan jumlah masyarakat miskin dan melaksanakan upaya pencegahan, meningkatkan kapasitas akses – akses konektivitas desa – desa, desa – kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Kabupaten tetangga. Pengembangan bantuan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat yang lebih integrasi dan adaptif terhadap bencana, dan perubahan iklim. Beradaptasi dengan konsekuensi iklim guna melindungi rumah, bisnis, mata pencaharian, infrastruktur, dan ekosistem alam. Memajukan pariwisata dengan pemanfaatan budaya, UMKM dan daya tarik olahraga. Peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan.

Dengan arah kebijakan :

- Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
- Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan primer serta mengembangkan program komunikasi, Informasi dan edukasi untuk mencapai kemandirian kesehatan
- Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
- Penguatan sumber daya kesehatan dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat untuk kemandirian
- Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
- Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
- Peningkatan pendidikan kesehatan dan informasi kesehatan dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat yang mandiri.
- Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas

- Penguatan Sumber Daya Manusia kesehatan yang kompeten dan peningkatan sarana prasarana sesuai standar untuk mendukung pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat.
- Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
- Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
- Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
- Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
- Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
- Peningkatan layanan literasi melalui digitalisasi perpustakaan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat melalui penguatan literasi dan pemerataan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- Penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan yang merata dan berkeadilan, peningkatan efektivitas pemberian subsidi pendidikan, serta peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran untuk membentuk manusia produktif.
- Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah
- Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
- Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
- Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
- Penguatan pembelajaran berbasis digital melalui peningkatan kapasitas pendidik, peserta didik dan orang tua, serta penerapan pedagogi modern.

- Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
- Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
- Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
- Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
- Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
- Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.
- Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).
- Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.
- Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.
- Revitalisasi pendidikan nonformal serta penguatan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan berbasis komunitas, dan life skills.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.
- Penciptaan lapangan kerja menengah ke atas di sektor-sektor produktif (termasuk lapangan kerja hijau, biru dan digital)
- Pemenuhan dan penyiapan sarana prasarana dan SDM pengawas ketenagakerjaan yang berkompeten, profesional dan adaptif teknologi.
- Penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, termasuk tenaga kerja rentan.
- Mendorong inovasi daerah dan produktivitas tenaga kerja
- Penyediaan informasi pasar kerja yang mutakhir, kredibel, mudah diakses dan dengan jangkauan luas.
- Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal dan rentan

dengan memanfaatkan sistem regsosek agar tepat sasaran, tepat guna dan efisien

- Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
- Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.
- Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
- Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan
- Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
- Pengembangan kawasan sentra produksi pangan sebagai sumber ekonomi dan proses digitasi pertanian serta pembangunan teknologi pertanian yang berkualitas.
- Optimalisasi pemanfaatan persetujuan perhutanan sosial
- Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
- Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
- Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.
- Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.

- Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
- Pengelolaan Sumber Daya Pertanian yang berkualitas dan pengembangan teknologi tepat guna
- Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian.
- Penerapan dan Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.
- Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.
- Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.
- Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.
- Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.
- Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.

- Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
- Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Bengkulu-Muaraenim-Palembang-Jambi (klaster industri hilirisasi batu bara, industri hilirisasi bioproduct, dan pembangkitan energi listrik).
- Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)
- Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.
- Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan.
- Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)
- Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.
- Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.

- Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.
- Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.
- Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi public massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.
- Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan system transportasi publik massal di kawasan perkotaan.
- Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.
- City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.
- Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.
- Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
- Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
- Peningkatan parstisipasi, prestasi, dan pengelolaan keolahragaan.
- Penataan kelembagaan dan regulasi dalam peningkatan kualitas pemuda dan olahraga
- Pengembangan kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda berbasis digitasi teknologi
- Penataan sistem pembinaan pemuda dan olahraga yang terintegrasi dan berkesinambungan.
- Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis.
- Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.

- Memanfaatkan keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Jambi untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik.
- Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global.
- Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.
- Penerapan ekonomi hijau dan biru
- Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.
- Mendorong penggunaan kendaraan listrik dan penyiapan infrastruktur pendukungnya
- Penyediaan angkutan massal
- Pendayagunaan dan pengelolaan SDA yang berkualitas
- Penerapan Teknologi Tepat Guna
- Penguatan infrastruktur teknologi
- Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
- Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
- Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
- Meningkatkan pertumbuhan Koperasi modern dan UKM naik kelas serta meningkatkan nilai tambah produk melalui industrialisasi KUKM
- Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual, penumbuhan start up kreatif dan digital, serta penguatan kelembagaan ekonomi kreatif
- Peningkatan produktivitas BUMD.
- Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.

- Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).
- Hilirisasi sumberdaya alam unggulan
- Penyiapan Infrastruktur dan SDM Industri
- Penguatan ekosistem Industrialisasi
- Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.
- Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
- Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah
- Pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
- Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
- Peningkatan kualitas pengelolaan Diklat
- Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.

- Penerapan manajemen resiko perencanaan dan pengendalian pembangunan
- Regulasi berbasis teknologi informatif
- Terwujudnya integrasi data kependudukan
- Penguatan integritas partai politik.
- Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
- Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
- optimalisasi PAD dan sumber pendanaan non pemerintah
- Penguatan pengendalian inflasi daerah.
- Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
- Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
- Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.
- Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.
- Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
- Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
- Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
- Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan

dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.

- Penetapan upah kabuapten berbasis produktivitas dan berkeadilan
- Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
- Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
- Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.
- Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.
- Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)
- Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.
- Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.
- Penggunaan kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga berbasis listrik
- Peningkatan sarana prasarana perhubungan
- Mendukung percepatan pelaksanaan reforma agraria.
- Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas peneliti, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
- Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.

- Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.
- Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
- Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas nasional.
- Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

Tabel 5.1 Arah Kebijakan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025 – 2029	2030 - 2034	2035 – 2039	2040 - 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Sejahtera, Merata, Dan Berkelanjutan	1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan inovatif. 2. Mewujudkan ekonomi maju dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan pemerintahan yang integritas dan adaftif. 4. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi daerah. 5. Mewujudkan ketangguhan sosial budaya dan ekologi. 6. Mewujudkan pemerataan pembangunan. 7. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. 8. Kestinambungan pembangunan untuk mendukung	RPJMD tahap I diarahkan untuk penguatan pondasi pembangunan di segala bidang yang ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Sejahtera, Merata, Dan Berkelanjutan. Pada tahap RPJMD 2025 – 2029 ditarget pertumbuhan ekonomi diakhir periode mencapai angka 5 persen, dengan arah kebijakan : - Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. - Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal - Meningkatkan akses	Pada tahap kedua, dengan telah menguatnya pondasi pembangunan di RPJMD Tahap I, kemudian berdasarkan pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJMD 2025 - 2029, maka RPJMD ke II ditujukan untuk percepatan pemerataan pembangunan, dengan pertumbuhan ekonomi ditargetkan rata-rata atau sama dengan 5 % pertahun, dengan arah kebijakan : - Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. - Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Pada tahap ketiga, dengan telah menguatnya pondasi pembangunan di RPJMD Tahap II, kemudian berdasarkan pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJMD 2030 - 2034, maka RPJMD ke III sebagai lanjutan percepatan pemerataan pembangunan, dengan pertumbuhan ekonomi ditargetkan rata-rata atau sama dengan 5 % pertahun, dengan arah kebijakan : - Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. - Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD 2035 - 2039, maka arah kebijakan pembangunan lima tahunan yang ke IV ini adalah perwujudan Kab. Tanjung Jabung Barat maju,sejahtera, merata, dan berkelanjutan, dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga yaitu dengan rata – rata 5 persen pertahun. RPJMD 2040 – 2045 menjadi rencana pembangunan lima tahunan yang terakhir dari periode RPJPD Kab. Tanjung Jabung Barat 2025 – 2045, dengan arah kebijakan : - Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan

	pencapaian Indonesia Emas dan kualitas pelayanan kesehatan primer serta mengembangkan program komunikasi, Informasi dan edukasi untuk mencapai kemandirian kesehatan - Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. - Penguatan sumber daya kesehatan dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat untuk kemandirian - Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. - Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. - Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. - Peningkatan pendidikan kesehatan dan informasi kesehatan dalam	- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan primer serta mengembangkan program komunikasi, Informasi dan edukasi untuk mencapai kemandirian kesehatan - Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. - Penguatan sumber daya kesehatan dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat untuk kemandirian - Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. - Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. - Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. - Peningkatan pendidikan kesehatan dan informasi	- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan primer serta mengembangkan program komunikasi, Informasi dan edukasi untuk mencapai kemandirian kesehatan - Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. - Penguatan sumber daya kesehatan dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat untuk kemandirian - Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. - Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. - Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. - Peningkatan pendidikan kesehatan dan informasi	fasilitas komunal pendukung kesehatan. - Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. - Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan primer serta mengembangkan program komunikasi, Informasi dan edukasi untuk mencapai kemandirian kesehatan - Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. - Penguatan sumber daya kesehatan dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat untuk kemandirian - Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. - Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
--	---	---	---	---

		mendukung upaya kesehatan masyarakat yang mandiri. - Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas - Penguatan Sumber Daya Manusia kesehatan yang kompeten dan peningkatan sarana prasarana sesuai standar untuk mendukung pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat. - Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. - Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. - Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. - Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	kesehatan dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat yang mandiri. - Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas - Penguatan Sumber Daya Manusia kesehatan yang kompeten dan peningkatan sarana prasarana sesuai standar untuk mendukung pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat. - Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. - Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. - Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. - Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis	kesehatan dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat yang mandiri. - Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas - Penguatan Sumber Daya Manusia kesehatan yang kompeten dan peningkatan sarana prasarana sesuai standar untuk mendukung pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat. - Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. - Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. - Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. - Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis	- Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. - Peningkatan pendidikan kesehatan dan informasi kesehatan dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat yang mandiri. - Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas - Penguatan Sumber Daya Manusia kesehatan yang kompeten dan peningkatan sarana prasarana sesuai standar untuk mendukung pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat. - Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. - Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. - Peningkatan ketahanan pangan dan
--	--	--	--	--	---

		- Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). - Peningkatan layanan literasi melalui digitalisasi perpustakaan. - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat melalui penguatan literasi dan pemerataan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. - Penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat. - Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan yang merata dan berkeadilan, peningkatan efektivitas pemberian subsidi pendidikan, serta peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran untuk membentuk manusia	terabaikan. - Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). - Peningkatan layanan literasi melalui digitalisasi perpustakaan. - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat melalui penguatan literasi dan pemerataan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. - Penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat. - Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan yang merata dan berkeadilan, peningkatan efektivitas pemberian subsidi pendidikan, serta peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran untuk	terabaikan. - Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). - Peningkatan layanan literasi melalui digitalisasi perpustakaan. - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat melalui penguatan literasi dan pemerataan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. - Penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat. - Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan yang merata dan berkeadilan, peningkatan efektivitas pemberian subsidi pendidikan, serta peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran untuk	gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. - Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan. - Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). - Peningkatan layanan literasi melalui digitalisasi perpustakaan. - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat melalui penguatan literasi dan pemerataan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. - Penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat. - Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan yang merata dan berkeadilan,
--	--	---	--	--	--

		produktif. - Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah - Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. - Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. - Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).. - Penguatan	membentuk manusia produktif. - Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah - Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. - Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. - Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	membentuk manusia produktif. - Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah - Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. - Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. - Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	peningkatan efektivitas pemberian subsidi pendidikan, serta peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran untuk membentuk manusia produktif. - Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah - Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. - Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. - Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta
--	--	--	--	--	---

		pembelajaran berbasis digital melalui peningkatan kapasitas pendidik, peserta didik dan orang tua, serta penerapan pedagogi modern. - Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). - Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. - Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. - Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. - Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. - Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan. - Peningkatan akses	- Penguatan pembelajaran berbasis digital melalui peningkatan kapasitas pendidik, peserta didik dan orang tua, serta penerapan pedagogi modern. - Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). - Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. - Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. - Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. - Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. - Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.	- Penguatan pembelajaran berbasis digital melalui peningkatan kapasitas pendidik, peserta didik dan orang tua, serta penerapan pedagogi modern. - Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). - Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. - Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. - Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. - Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. - Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.	dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). - Penguatan pembelajaran berbasis digital melalui peningkatan kapasitas pendidik, peserta didik dan orang tua, serta penerapan pedagogi modern. - Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). - Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. - Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. - Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. - Pemerataan dan peningkatan
--	--	---	--	--	---

		pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics). - Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global. - Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK. - Revitalisasi pendidikan nonformal serta penguatan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan berbasis komunitas, dan life skills - Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. - Penciptaan lapangan kerja menengah ke	- Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics). - Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global. - Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK. - Revitalisasi pendidikan nonformal serta penguatan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan berbasis komunitas, dan life skills. - Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. - Penciptaan lapangan	- Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics). - Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global. - Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK. - Revitalisasi pendidikan nonformal serta penguatan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan berbasis komunitas, dan life skills. - Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. - Penciptaan lapangan	kompetensi guru dan tenaga kependidikan. - Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan. - Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics). - Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global. - Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK. - Revitalisasi pendidikan nonformal serta penguatan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan berbasis komunitas, dan life skills. - Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif,
--	--	--	---	---	--

		atas di sektor-sektor produktif (termasuk lapangan kerja hijau, biru dan digital) - Pemenuhan dan penyiapan sarana prasarana dan SDM pengawas ketenagakerjaan yang berkompeten, profesional dan adaptif teknologi. - Penguatan sistem perlindungan adaptif bagi ternaga kerja, termasuk tenaga kerja rentan. - Mendorong inovasi daerah dan produktivitas tenaga kerja - Percepatan penyediaan informasi pasar kerja yang mutakhir, kredibel, mudah diakses dan dengan jangkauan luas - Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal dan rentan dengan memanfaatkan sistem regsosek agar tepat sasaran, tepat	kerja menengah ke atas di sektor-sektor produktif (termasuk lapangan kerja hijau, biru dan digital) - Pemenuhan dan penyiapan sarana prasarana dan SDM pengawas ketenagakerjaan yang berkompeten, profesional dan adaptif teknologi. - Penguatan sistem perlindungan adaptif bagi ternaga kerja, termasuk tenaga kerja rentan. - Mendorong inovasi daerah dan produktivitas tenaga kerja - Penyediaan informasi pasar kerja yang mutakhir, kredibel, mudah diakses dan dengan jangkauan luas. - Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal dan rentan dengan memanfaatkan sistem regsosek agar	kerja menengah ke atas di sektor-sektor produktif (termasuk lapangan kerja hijau, biru dan digital) - Pemenuhan dan penyiapan sarana prasarana dan SDM pengawas ketenagakerjaan yang berkompeten, profesional dan adaptif teknologi. - Penguatan sistem perlindungan adaptif bagi ternaga kerja, termasuk tenaga kerja rentan. - Mendorong inovasi daerah dan produktivitas tenaga kerja - Penyediaan informasi pasar kerja yang mutakhir, kredibel, mudah diakses dan dengan jangkauan luas. - Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal dan rentan dengan memanfaatkan sistem regsosek agar	terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. - Penciptaan lapangan kerja menengah ke atas di sektor-sektor produktif (termasuk lapangan kerja hijau, biru dan digital) - Pemenuhan dan penyiapan sarana prasarana dan SDM pengawas ketenagakerjaan yang berkompeten, profesional dan adaptif teknologi. - Penguatan sistem perlindungan adaptif bagi ternaga kerja, termasuk tenaga kerja rentan. - Mendorong inovasi daerah dan produktivitas tenaga kerja - Penyediaan informasi pasar kerja yang mutakhir, kredibel, mudah diakses dan dengan jangkauan luas. - Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi dan inklusif bagi seluruh kelompok
--	--	--	---	---	---

		guna dan efisien - Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. - Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. - Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. - Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan - Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi	tepat sasaran, tepat guna dan efisien - Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. - Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. - Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. - Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan - Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian	tepat sasaran, tepat guna dan efisien - Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. - Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. - Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. - Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan - Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian	masyarakat, terutama bagi kelompok marginal dan rentan dengan memanfaatkan sistem regsosek agar tepat sasaran, tepat guna dan efisien - Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. - Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. - Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. - Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan
--	--	--	--	--	--

		teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). - Pengembangan kawasan sentra produksi pangan sebagai sumber ekonomi dan proses digitasi pertanian serta pembangunan teknologi pertanian yang berkualitas - Optimalisasi pemanfaatan persetujuan perhutanan sosial - Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. - Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. - Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknolo	dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). - Pengembangan kawasan sentra produksi pangan sebagai sumber ekonomi dan proses digitasi pertanian serta pembangunan teknologi pertanian yang berkualitas. - Optimalisasi pemanfaatan persetujuan perhutanan sosial - Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. - Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. - Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui	dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). - Pengembangan kawasan sentra produksi pangan sebagai sumber ekonomi dan proses digitasi pertanian serta pembangunan teknologi pertanian yang berkualitas. - Optimalisasi pemanfaatan persetujuan perhutanan sosial - Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. - Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. - Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui	- Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). - Pengembangan kawasan sentra produksi pangan sebagai sumber ekonomi dan proses digitasi pertanian serta pembangunan teknologi pertanian yang berkualitas. - Optimalisasi pemanfaatan persetujuan perhutanan sosial - Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. - Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. - Peningkatan kapasitas
--	--	---	---	---	---

		gi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform. - Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian. - Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. - Pengelolaan Sumber Daya Pertanian yang berkualitas dan pengembangan teknologi tepat guna - Pengembangan closed loop model pertanian	ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform. - Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian. - Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. - Pengelolaan Sumber Daya Pertanian yang berkualitas dan pengembangan teknologi tepat guna - Pengembangan closed	ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform. - Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian. - Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. - Pengelolaan Sumber Daya Pertanian yang berkualitas dan pengembangan teknologi tepat guna - Pengembangan closed	dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform. - Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian. - Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. - Pengelolaan Sumber
--	--	---	---	---	---

		melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian. - Penerapan dan Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern,	loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian. - Penerapan dan Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan	loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian. - Penerapan dan Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan	Daya Pertanian yang berkualitas dan pengembangan teknologi tepat guna - Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian. - Penerapan dan Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan
--	--	--	---	---	--

		pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform. - Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak. - Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan. - Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk	perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform. - Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak. - Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan. - Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya	perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform. - Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak. - Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan. - Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya	kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform. - Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak. - Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan. - Penyediaan terintegrasi
--	--	--	---	---	--

		perikanan. - Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif. - Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan. - Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. - Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Bengkulu-Muaraenim-Palembang-Jambi (klaster industri hilirisasi batu bara, industri hilirisasi bioproduct, dan	saing produk perikanan. - Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif. - Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan. - Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. - Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Bengkulu-Muaraenim-Palembang-Jambi (klaster industri hilirisasi batu bara, industri hilirisasi	saing produk perikanan. - Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif. - Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan. - Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. - Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Bengkulu-Muaraenim-Palembang-Jambi (klaster industri hilirisasi batu bara, industri hilirisasi	infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan. - Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif. - Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan. - Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. - Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri
--	--	--	---	---	---

		pembangkitan energi listrik). - Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi) - Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan	bioproduct, dan pembangkitan energi listrik). - Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi) - Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian,	bioproduct, dan pembangkitan energi listrik). - Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi) - Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian,	Bengkulu-Muaraenim-Palembang-Jambi (klaster industri hilirisasi batu bara, industri hilirisasi bioproduct, dan pembangkitan energi listrik). - Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi) - Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri;
--	--	--	--	--	--

		fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. - Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan. - Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.) - Percepatan penyediaan infrastruktur air baku	fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. - Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan. - Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.) - Percepatan penyediaan	fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. - Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan. - Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.) - Percepatan penyediaan	Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. - Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan. - Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum,
--	--	---	--	--	---

		dan air minum pada kawasan perkotaan. - Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan. - Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan. - Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan. - Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi public massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan. - Peningkatan tata	infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. - Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan. - Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan. - Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan. - Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi public massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.	infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. - Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan. - Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan. - Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan. - Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi public massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.	layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.) - Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. - Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan. - Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan. - Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan. - Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi public massal rendah
--	--	--	---	---	--

		kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan system transportasi publik massal di kawasan perkotaan. - Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. - City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan. - Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. - Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. - Peningkatan konektivitas	- Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan system transportasi publik massal di kawasan perkotaan. - Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. - City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan. - Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. - Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. - Peningkatan	- Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan system transportasi publik massal di kawasan perkotaan. - Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. - City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan. - Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. - Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. - Peningkatan	emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan. - Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan system transportasi publik massal di kawasan perkotaan. - Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. - City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan. - Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. - Penguatan pemasaran
--	--	--	--	--	--

		menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. - Peningkatan partisipasi, prestasi, dan pengelolaan keolahragaan. - Penataan kelembagaan dan regulasi dalam peningkatan kualitas pemuda dan olahraga - Pengembangan kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda berbasis digitasi teknologi - Penataan sistem pembinaan pemuda dan olahraga yang terintegrasi dan berkesinambungan - Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis. - Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. - Memanfaatkan keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Jambi untuk mendukung integrasi	konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. - Peningkatan partisipasi, prestasi, dan pengelolaan keolahragaan. - Penataan kelembagaan dan regulasi dalam peningkatan kualitas pemuda dan olahraga - Pengembangan kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda berbasis digitasi teknologi - Penataan sistem pembinaan pemuda dan olahraga yang terintegrasi dan berkesinambungan - Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis. - Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. - Memanfaatkan keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Jambi untuk	konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. - Peningkatan partisipasi, prestasi, dan pengelolaan keolahragaan. - Penataan kelembagaan dan regulasi dalam peningkatan kualitas pemuda dan olahraga - Pengembangan kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda berbasis digitasi teknologi - Penataan sistem pembinaan pemuda dan olahraga yang terintegrasi dan berkesinambungan - Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis. - Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. - Memanfaatkan keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Jambi untuk	pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. - Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. - Peningkatan partisipasi, prestasi, dan pengelolaan keolahragaan. - Penataan kelembagaan dan regulasi dalam peningkatan kualitas pemuda dan olahraga - Pengembangan kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda berbasis digitasi teknologi - Penataan sistem pembinaan pemuda dan olahraga yang terintegrasi dan berkesinambungan - Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis. - Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan
--	--	---	--	--	---

		rantai nilai dan rantai pasok logistik. - Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global. - Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. - Penerapan ekonomi hijau dan biru - Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. - Mendorong penggunaan kendaraan listrik dan penyiapan infrastruktur pendukungnya - Penyediaan angkutan massal - Pendayagunaan dan pengelolaan SDA yang berkualitas - Penerapan Teknologi Tepat Guna	mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik. - Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global. - Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. - Penerapan ekonomi hijau dan biru - Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. - Mendorong penggunaan kendaraan listrik dan penyiapan infrastruktur pendukungnya - Penyediaan angkutan massal - Pendayagunaan dan pengelolaan SDA yang berkualitas - Penerapan Teknologi	mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik - Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global. - Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. - Penerapan ekonomi hijau dan biru - Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. - Mendorong penggunaan kendaraan listrik dan penyiapan infrastruktur pendukungnya - Penyediaan angkutan massal - Pendayagunaan dan pengelolaan SDA yang berkualitas - Penerapan Teknologi	desa. - Memanfaatkan keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Jambi untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik. - Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global. - Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. - Penerapan ekonomi hijau dan biru - Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. - Mendorong penggunaan kendaraan listrik dan penyiapan infrastruktur pendukungnya - Penyediaan angkutan
--	--	---	--	---	---

		- Penguatan infrastruktur teknologi - Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. - Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. - Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. - Meningkatkan pertumbuhan Koperasi modern dan UKM naik kelas serta meningkatkan nilai tambah produk melalui industrialisasi	Tepat Guna - Penguatan infrastruktur teknologi - Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. - Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. - Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. - Meningkatkan pertumbuhan Koperasi modern dan UKM naik kelas serta meningkatkan nilai tambah produk	Tepat Guna - Penguatan infrastruktur teknologi - Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. - Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. - Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. - Meningkatkan pertumbuhan Koperasi modern dan UKM naik kelas serta meningkatkan nilai tambah produk	massal - Pendayagunaan dan pengelolaan SDA yang berkualitas - Penerapan Teknologi Tepat Guna - Penguatan infrastruktur teknologi - Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. - Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. - Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. - Meningkatkan
--	--	---	---	---	---

		KUKM - Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual, penumbuhan start up kreatif dan digital, serta penguatan kelembagaan ekonomi kreatif - Peningkatan produktivitas BUMD. - Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. - Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan	melalui industrialisasi KUKM - Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual, penumbuhan start up kreatif dan digital, serta penguatan kelembagaan ekonomi kreatif - Peningkatan produktivitas BUMD. - Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. - Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya	melalui industrialisasi KUKM - Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual, penumbuhan start up kreatif dan digital, serta penguatan kelembagaan ekonomi kreatif - Peningkatan produktivitas BUMD. - Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. - Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya	pertumbuhan Koperasi modern dan UKM naik kelas serta meningkatkan nilai tambah produk melalui industrialisasi KUKM - Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual, penumbuhan start up kreatif dan digital, serta penguatan kelembagaan ekonomi kreatif - Peningkatan produktivitas BUMD. - Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. - Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke
--	--	--	---	---	--

		digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital. - Hilirisasi sumberdaya alam unggulan - Penyiapan Infrastruktur dan SDM Industri - Penguatan ekosistem Industrialisasi - Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. - Peningkatan	meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital. - Hilirisasi sumberdaya alam unggulan - Penyiapan Infrastruktur dan SDM Industri - Penguatan ekosistem Industrialisasi - Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital. - Hilirisasi sumberdaya alam unggulan - Penyiapan Infrastruktur dan SDM Industri - Penguatan ekosistem Industrialisasi - Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital. - Hilirisasi sumberdaya alam unggulan - Penyiapan Infrastruktur dan SDM Industri - Penguatan ekosistem
--	--	---	---	---	---

		partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. - Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. - Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. - Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah - Pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. - Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan	- Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. - Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. - Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. - Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah - Pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. - Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui	- Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. - Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. - Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. - Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah - Pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. - Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui	Industrialisasi - Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. - Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. - Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. - Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. - Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah - Pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. - Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui
--	--	---	---	---	---

		n kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. - Peningkatan kualitas pengelolaan Diklat - Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. - Penerapan manajemen resiko perencanaan dan pengendalian pembangunan. - Regulasi berbasis teknologi informatif - Terwujudnya integrasi data kependudukan - Penguatan integritas partai politik. - Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. - Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon,	peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. - Peningkatan kualitas pengelolaan Diklat - Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. - Penerapan manajemen resiko perencanaan dan pengendalian pembangunan. - Regulasi berbasis teknologi informatif - Terwujudnya integrasi data kependudukan - Penguatan integritas partai politik. - Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. - Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem,	peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. - Peningkatan kualitas pengelolaan Diklat - Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. - Penerapan manajemen resiko perencanaan dan pengendalian pembangunan. - Regulasi berbasis teknologi informatif - Terwujudnya integrasi data kependudukan - Penguatan integritas partai politik. - Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. - Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem,	manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. - Peningkatan kualitas pengelolaan Diklat - Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. - Penerapan manajemen resiko perencanaan dan pengendalian pembangunan. - Regulasi berbasis teknologi informatif - Terwujudnya integrasi data kependudukan - Penguatan integritas partai politik. - Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. - Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif
--	--	---	---	---	---

		dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. - optimaliasi PAD dan sumber pendanaan non pemerintah - Penguatan pengendalian inflasi daerah. - Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. - Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. - Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis. - Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. - Pengelolaan risiko bencana dengan	perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. - optimaliasi PAD dan sumber pendanaan non pemerintah - Penguatan pengendalian inflasi daerah. - Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. - Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. - Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis. - Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. - Pengelolaan risiko	perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. - optimaliasi PAD dan sumber pendanaan non pemerintah - Penguatan pengendalian inflasi daerah. - Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. - Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. - Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis. - Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. - Pengelolaan risiko	& kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. - optimaliasi PAD dan sumber pendanaan non pemerintah - Penguatan pengendalian inflasi daerah. - Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. - Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. - Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis. - Peningkatan upaya
--	--	---	--	--	---

		meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. - Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. - Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. - Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas,	bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. - Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. - Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. - Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan	bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. - Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. - Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. - Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan	pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. - Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. - Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. - Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. - Pemberdayaan
--	--	---	---	---	---

		kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. - Penetapan upah kabuapten berbasis produktivitas dan berkeadilan - Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. - Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. - Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy. - Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. - Percepatan penyusunan panduan dan rencana	kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. - Penetapan upah kabuapten berbasis produktivitas dan berkeadilan - Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. - Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. - Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy. - Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. - Percepatan penyusunan panduan	kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. - Penetapan upah kabuapten berbasis produktivitas dan berkeadilan - Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. - Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. - Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy. - Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. - Percepatan penyusunan panduan	perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. - Penetapan upah kabuapten berbasis produktivitas dan berkeadilan - Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. - Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. - Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy. - Penguatan kerja sama
--	--	---	--	--	---

		pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.) - Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir. - Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.) - Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir. - Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru	dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.) - Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir. - Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru	antardaerah dalam pengelolaan wilayah. - Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.) - Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir. - Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif
--	--	--	--	--	--

		- Penggunaan kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga berbasis listrik - Peningkatan sarana prasarana perhubungan - Mendukung percepatan pelaksanaan reforma agraria. - Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas peneliti, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri. - Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. - Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan	- dan terbarukan. - Penggunaan kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga berbasis listrik - Peningkatan sarana prasarana perhubungan - Mendukung percepatan pelaksanaan reforma agraria. - Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas peneliti, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri. - Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. - Pengembangan pembiayaan inovatif,	- dan terbarukan. - Penggunaan kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga berbasis listrik - Peningkatan sarana prasarana perhubungan - Mendukung percepatan pelaksanaan reforma agraria. - Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas peneliti, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri. - Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. - Pengembangan pembiayaan inovatif,	(pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan. - Penggunaan kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga berbasis listrik - Peningkatan sarana prasarana perhubungan - Mendukung percepatan pelaksanaan reforma agraria. - Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas peneliti, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri. - Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan
--	--	--	---	---	---

		blended finance. - Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. - Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas nasional. - Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	termasuk KPBU dan blended finance. - Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. - Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas nasional. - Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	termasuk KPBU dan blended finance. - Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. - Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas nasional. - Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	bencana dan iklim. - Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. - Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. - Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas nasional. - Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.
--	--	---	---	---	---

5.2. Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2045 dirumuskan dari arah pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah, dan indikator utama pembangunan (IUP) hasil penyelarasan RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2045 dengan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2045 dan RPJPN 2025 - 2045 :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial dan ketenagakerjaan, dengan arah pembangunan :
 - 1.1.** Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi masyarakat, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator	Target Tahun 2045
1) Usia Harapan Hidup (UHH)	79,39
2) Kesehatan ibu dan anak :	
a) Jumlah Kematian Ibu	1
b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	2,25
3) Penanganan Tuberkulosis :	
a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90%
b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	95%
4) Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100

1.2. Pendidikan yang berkualitas dan merata, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator	Target Tahun 2045
1. Hasil Pembelajaran:	
a) Sekolah Dasar	75,53-83,39
Literasi Membaca	72,27-85,84
Numerasi	
b) Sekolah Menengah Pertama	84,66-88,58
Literasi Membaca	83,38-94,34
Numerasi	
2. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,21 – 11,39
3. Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,75 – 14,78
4. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	19,77
5. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%)	61,64

1.3. Perlindungan Sosial dan ketenagakerjaan yang adaptif dan berkeadilan, dengan indikator sebagai berikut :

Indikator	Target Tahun 2045
1. Tingkat Kemiskinan (%)	0,565
2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	80

Kabupaten (%)	
3. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	58%

2. Meningkatkan produktivitas ekonomi kabupaten dan hilirisasi industri berbasis SDA, dengan arah pembangunan :
- 2.1. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi, dengan idikator kinerja sebagai berikut :

Indikator	Target Tahun 2045
1. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	25,00
2. Pengembangan Pariwisata	
a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	3,06
b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Orang)	1750
3. Rasio PDRB sektor tersier (%)	18,25
4. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	
a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	14,10
b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	9,00
c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	12,00
d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,46
e. Return on Aset (ROA) BUMD (%)	2,50
5. Tingkat Pengangguran Terbuka	1,50

(%)	
6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	58
7. Tingkat Penguasaan IPTEK:	
a. Pengeluaran IPTEK dan Inovasi (persentase dari APBD)	1
b. Indeks Kapabilitas Inovasi	70

2.2. Penerapan ekonomi hijau daerah, dengan idikator kinerja sebagai berikut :

Indikator	Target Tahun 2045
Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau:	
a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	92,8
b. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	80,00

2.3. Digitalisasi diberbagai sektor. dengan idikator kinerja sebagai berikut :

Indikator	Target Tahun 2045
Persentase ketersediaan akses infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	7,3

2.4. Konektivitas ekonomi domestik dengan daerah luar, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator	Target Tahun 2045
1. Indeks Perkembangan Harga	105,00*
2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	7,95
3. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	29,50

- 2.5. Perkotaan dan perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator	Target Tahun 2045
Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan :	
a. Proporsi Kontribusi PDRB Daerah terhadap Provinsi (%)	17
b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	97
c) Persentase Desa Mandiri	14,91

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan arah pembangunan :
- 3.1. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator	Target Tahun 2045
1. Indeks Reformasi Hukum	75
2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	5,00
3. Indeks Pelayanan Publik	4,51
4. Indeks Integritas Daerah (hasil Survei Penilaian Integritas KPK)	90

4. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta investasi, dengan arah pembangunan :
- 4.1. Ketentraman dan ketertiban daerah tangguh, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator	Target Tahun 2045
1. Jumlah pelanggaran Perda	80

4.2. Strategi	mengenai ketentraman dan ketertiban umum	
	2. Persentase capaian pelaksanaan aksi HAM	90
	3. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	85

litas ekonomi daerah, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator	Target Tahun 2045
1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,094
2. Tingkat Inflasi (%)	2,00
3. PAD terhadap pendapatan daerah (%)	11,04
4. Pajak Daerah terhadap PAD (%)	27,68
5. Retribusi daerah terhadap PAD (%)	6,08

5. Meningkatnya ketangguhan sosial budaya dan ekologi, dengan arah pembangunan :

5.1. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator	Target Tahun 2045
(a) Persentase keberlangsungan kelompok budaya.	100
(b) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,5

5.2. Keluarga berkualitas, Kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif Keluarga berkualitas, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator	Target Tahun 2045
1. Pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk serta penduduk tumbuh seimbang	
a. Angka kelahiran total (total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15 – 49 tahun	2,05
b. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	81,73
c. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	4,88
d. Angka kelahiran remaja umur 15 – 19 tahun (ASFR)	20,25
2. Pembangunan keluarga berkualitas	
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	75
3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,250

5.3. Lingkungan hidup berkualitas, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator	Target Tahun 2045
1. Kualitas Lingkungan Hidup	
a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	75,00
b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	50
2. Pengelolaan Sampah	
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	85,00
3. Proporsi Rumah Tangga (RT)	80

dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	
---	--

5.4. Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator	Target Tahun 2045
Ketahanan Energi, Air, dan Pangan	
a) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	2,5
b) Pola Pangan Harapan	96,00
c) Indeks Ketahanan Pangan	85,00
b) Ketahanan Air	
- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	200
- Akses rumah tangga terhadap akses air minum layak atau aman (%)	100
- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Bersih Perpipaan (%)	100

5.5. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator	Target Tahun 2045
1. Indeks Risiko Bencana (IRB)	108,79 - 87,70
2. Intensitas Emisi GRK ((metrik ton karbon dioksida (CO2e))	47.791,15

6. Menurunnya ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan pendapatan, dengan arah pembangunan sebagai berikut :

6.1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator	Target Tahun 2045
Indeks Infrastruktur	88

6.2. Pemerataan pembangunan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator	Target Tahun 2045
Indeks Gini	0,220
Implementasi kerjasama daerah dari kerjasama yang dibangun	100

6.3. Pelabuhan pengumpan dan pelabuhan lainnya dengan kapasitas memadai, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator	Target Tahun 2045
Berth Occupancy Ratio	80

6.4. Jaringan transportasi darat dan laut terintegrasi, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator	Target Tahun 2045
Indeks Konektivitas	70

Tabel 5.2 Target Sasaran Pokok RPJPD Kab. Tanjung Jabung Barat Thaun 2025 - 2045 Pada Tiap Tahapan RPJMD

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Kinerja	Baseline 2025	Target Tiap Tahapan RPJMD			
				2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Sejahtera, Merata, Dan Berkelanjutan							
1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial dan ketenagakerjaan	1.1. Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi masyarakat	1. Usia Harapan Hidup (UHH)	73,50	74,20	76,23	78,91	79,93
		2. Kesehatan ibu dan anak :					
		a. Jumlah Kematian Ibu	5	4	3	2	1
		b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	11,5	6	4,75	3,50	2,25
		3. Penanganan Tuberkulosis :					
		a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90	90	90	90	90
		b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	95	95	95	95	95
		4) Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,50	99	99,50	100	100
	1.2. Pendidikan	1. Hasil Pembelajaran:					

	yang berkualitas dan merata	c. Sekolah Dasar (SD) - Literasi Membaca - Numerasi	54,00 41,47	56,12-60,75 43,14-49,50	61,96-67,07 51,23-58,79	68,41-74,05 60,85-69,83	75,53-83,39 72,27-85-84
		d. Sekolah Menengah Pertama - Literasi Membaca - Numerasi	69,20 64,52	72,51-76,48 65,14-71,90	76,49-80,65 73,70-81-35	80,66-84,65 73,71-81-35	84,66-88,58 83,38-94,34
		2. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,50	8,75 – 9,15	8,25 – 9,25	9,75 – 10,00	10,21 – 11,39
		3. Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,95	13,00 – 13,25	14,00–14,25	14,50 –14.60	14,75 – 14,78
		4. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	3,17	7,32	11,47	15,62	19,77
		5. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%)	37,33	41,93	46,50	53,12	61,64
	1.3. Perlindungan Sosial dan ketenagakerja an yang adaptif dan berkeadilan	1. Tingkat Kemiskinan (%)	9,00	8,00	5,00	2,00	0,565
		2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	15	20	40	60	80
		3. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	20	33	40	50	58

2. Meningkatnya produktivitas ekonomi kabupaten dan hilirisasi industri berbasis SDA	2.1. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	1. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	19,00	19,50	20,50	21,00	25,00
		2. Pengembangan Pariwisata					
		a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	0,75	1,10	1,60	2,25	3,06
		b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Orang)	210	400	750	1200	1750
		3. Rasio PDRB sektor tersier (%)	16,69	17,18	17,70	18,00	18,25
		4. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					
		a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	10,45	11,66	12,87	13,24	14,10
		b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00
		c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	7,00	9,00	10,00	11,00	12,00
		d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,85	0,96	1,20	1,35	1,46
		e. Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,35	1,75	2,00	2,25	2,50
		5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,50	2,25	2,00	1,75	1,50
		6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	51,75	52	54	56	58

		Perempuan (%) 7. Tingkat Penguasaan IPTEK: - Pengeluaran IPTEK dan Inovasi (persentase dari APBD) - Indeks Kapabilitas Inovasi	0,025 51	0,25 58	0,55 62	0,75 67	1 70
	2.2. Penerapan ekonomi hijau daerah	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau: a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah b. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	73,61 20,00	77,40 35,00	82,00 50,00	87,50 65,00	92,8 80,00
	2.3. Digitalisasi diberbagai sektor.	Persentase ketersediaan akses infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	77,01	82,20	87,47	92,50	99,90
	2.4. Konektivitas ekonomi domestik dengan daerah luar	1. Indeks Perkembangan Harga 2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) 3. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	105,55* 7,60 24,20	105,00* 7,65 25,40	105,00* 7,75 26,90	105,00* 7,85 27,40	105,00* 7,95 29,50
	2.5. Perkotaan dan perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan : a. Proporsi Kontribusi PDRB Daerah terhadap Provinsi (%)	17	17	17	17	17

		b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	73	76	83	90	97
		c. Persentase Desa Mandiri	0.00	0.87	6,14	8.77	14,91
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	7.1. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	1. Indeks Reformasi Hukum	56,75	60	65	70	75
		2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,80	2,00	3,00	4,00	5,00
		3. Indeks Pelayanan Publik	3,30	3,51	4,01	4,25	4,51
		4. Indeks Integritas Daerah (hasil Survei Penilaian Integritas KPK)	71,35	75	82	86	90
4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta investasi	4.1. Ketentraman dan ketertiban daerah tangguh	1. Jumlah pelanggaran Perda mengenai ketentraman dan ketertiban umum	200	150	125	100	80
		2. Persentase capaian pelaksanaan aksi HAM	70	75	80	85	90
		3. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	73	76	79	82	85
	4.2. Stabilitas ekonomi daerah	1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,075	0,088	0,090	0,092	0,094
		2. Tingkat Inflasi (%)	2,50	2,50	2,35	2,15	2,00
		3. PAD terhadap pendapatan daerah (%)	7,04	8,04	9,04	10,04	11,04

		4. Pajak Daerah terhadap PAD (%)	23,68	24,68	25,68	26,68	27,68
		5. Retribusi daerah terhadap PAD (%)	2,08	3,08	4,08	5,08	6,08
5. Meningkatnya ketangguhan sosial budaya dan ekologi	5.1. Beragama masalahat dan berkebudayaan maju	1. Persentase keberlangsungan kelompok budaya.	100	100	100	100	100
		2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	70	72	73,5	74,5	75,5
	Keluarga berkualitas, Kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	Pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk serta penduduk tumbuh seimbang					
		a. Angka kelahiran total (total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15 – 49 tahun	2,23	2,18	2,14	2,09	2,05
		b. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	69,50	72,55	75,61	78,67	81,73
		c. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	8,66	7,715	6,770	5,825	4,88
		d. Angka kelahiran remaja umur 15 – 19 tahun (ASFR)	26,12	24,65	23,18	21,71	20,25
		Pembnagunan keluarga berkualitas					
		e. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	57,00	61	65	70	75
		Indeks Ketimpangan Gender	0,505	0,420	0,380	0,320	0,250

		(IKG)					
	5.2. Lingkungan hidup berkualitas	1. Kualitas Lingkungan Hidup a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) 2. Pengelolaan Sampah a. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) b. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	72,69	73,00	74,00	74,50	75,00
			34	40	43	47	50
			66,00	70,00	75,00	80,00	85,00
			50	55	65	75	80
	5.3. Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan.	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan a) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) b) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) c) Indeks Ketahanan Pangan d) Ketahanan Air - Kapasitas Air Baku (m3/detik)* - Akses rumah tangga	14	12,5	8,0	5,0	2,5
			88,20	92,00	96,00	96,00	96,00
			65,00	69,00	75,00	80,00	85,00
			200	200	200	200	200
			97	100	100	100	100

		terhadap akses air minum layak atau aman (%) - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Bersih Perpipaan (%)	78	100	100	100	100
	5.4. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	1. Indeks Risiko Bencana (IRB) 2. Intensitas Emisi GRK (metrik ton karbon dioksida setara (CO2e))	100,50 59.589,77	108,79 - 87,70 56.640,12	108,79 - 87,70 53.690,46	108,79 - 87,70 50.740,81	108,79 - 87,70 47.791,15
6. Menurunnya ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan pendapatan	6.2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas	Indeks Infrastruktur	79,50	81	83	85	88
	6.3. Pemerataan pembangunan	1. Indeks Gini	0,300	0,287	0,265	0,242	0,220
		2. Implementasi kerjasama daerah dari kerjasama yang dibangun	100	100	100	100	100
	6.4. Pelabuhan pengumpan dan pelabuhan lainnya dengan kapasitas memadai	Berth Occupancy Ratio	55	60	64	72	80
	6.5. Jaringan transportasi darat dan laut terintegrasi	Indeks Konektivitas	54	55,00	60,00	65,00	70,00

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2045 menyesuaikan kondisi terkini dituangkan dalam gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, yang kesemuanya dikombinasikan menghasilkan sasaran pokok yang lebih realistis dan arah kebijakan yang lebih kapabel diharapkan mampu mencapai Visi dan Misi Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi RPJPD

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan (Bappeda) mulai dari tahap penyusunan rancangan awal RPJPD sampai dengan rancangan akhir. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi melalui instrumen/formulir Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah tersebut dilaporkan oleh Kepala Bappeda kepada Bupati.

Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

Untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat 2025 – 2045 maka penyusunan rencana pembangunan lima tahunan (RPJMD 2024 – 2029, RPJMD 2030 – 2034, RPJMD 2035 – 2039, dan RPJMD 2040 – 2045) mempedomani RPJPD. Untuk mendukung pencapaian misi

dan visi pembangunan jangka panjang daerah melalui RPJMD perlu diselaraskan antara tujuan, sasaran serta indikator dan target, arah kebijakan, dan program RPJMD dengan arah kebijakan dan sasaran pokok serta target RPJPD.

Dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah dan mendukung prioritas nasional, diperlukan sinergitas pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan mengingat kemampuan keuangan daerah (APBD) yang terbatas, perlu mengusahakan sumber – sumber pendanaan dari APBN dan juga dukungan dari dunia usaha melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2045 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 20 tahun ke depan sebagai bagian integral dari pembangunan Provinsi Jambi dan pembangunan nasional, ditahapkan dalam pembangunan lima tahunan dalam RPJMD. Keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan visi **KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, SEJAHTERA, MERATA, DAN BERKELANJUTAN** perlu didukung oleh komitmen yang kuat dari kepemimpinan yang bersih, inovatif, dan konsistensi dalam kebijakan dan implementasinya, serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

ANWAR SADAT